



Kementerian Kelautan dan Perikanan  
 Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
 Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

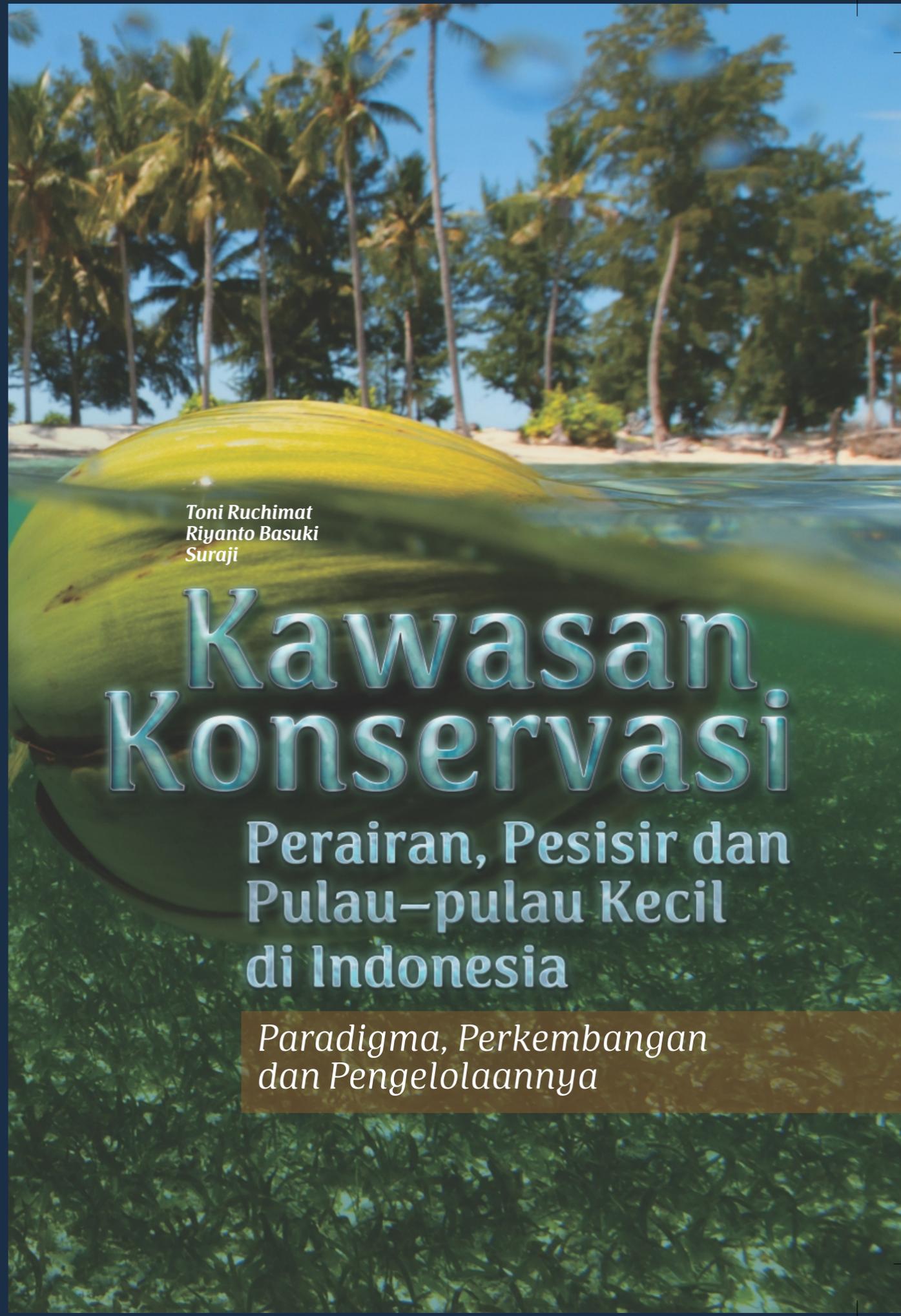
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, GMB III Lt. 10, Jakarta Pusat 10110  
 T. (+62 21) 3513211, ext. 6104 F. (+62 21) 3522045  
[www.kp3k.kkp.go.id/kkji](http://www.kp3k.kkp.go.id/kkji)

ISBN 978-602-7913-07-3



KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA: PARADIGMA, PERKEMBANGAN DAN PENGELOLAANNYA

**2012**



*Toni Ruchimat  
 Riyanto Basuki  
 Suraji*

# Kawasan Konservasi

Perairan, Pesisir dan  
 Pulau-pulau Kecil  
 di Indonesia

*Paradigma, Perkembangan  
 dan Pengelolaannya*



*Toni Ruchimat  
Riyanto Basuki  
Suraji*

# **Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia:**

*Paradigma, Perkembangan  
dan Pengelolaannya*

**KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN,  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA:  
PARADIGMA, PERKEMBANGAN DAN  
PENGELOLAANNYA**

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan  
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2012

**Pengarah**

Sudirman Saad  
Direktur Jenderal Kelautan,  
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**Penyusun**

Toni Ruchimat  
Riyanto Basuki  
Suraji

**Tim Pendukung, Pengumpulan Data dan Informasi**

Suko Wardhono, Agus Widayanto  
Tim Subdit Konservasi Kawasan-Direktorat KKJI  
Tim Subdit Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan-Direktorat KKJI  
Tim Subdit Jejaring, Data dan Informasi Konservasi-Direktorat KKJI  
Tim Subdit Konservasi jenis Ikan-Direktorat KKJI

**Photography**

Cipto Aji Gunawan (Cover Depan), Andi AW. Masry (Cover Belakang)

**Graphic Design**

Andi AW. Masry

ISBN 978-602-7913-07-3

Diterbitkan oleh  
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan  
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,  
Gd Mina Bahari III, Lt. 10 Jakarta Pusat 10110 – Indonesia  
Telp./Fax.: 021-3522045

<http://kkji.kp3k.kkp.go.id>

Dipersilahkan mengutip sebagian atau keseluruhan isi buku ini dengan menyebutkan sumber sitasi



Sambutan  
Menteri Kelautan dan Perikanan

# Blue Economy

untuk Negara  
Kepulauan  
Indonesia

Sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut (*marine biodiversity*) yang tinggi, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki ekosistem lengkap yang berperan sebagai habitat bagi ikan dan organisme lainnya mencari makan (*feeding ground*), bertelur (*nesting ground*) dan berpijah (*spawning ground*).

Sekitar 55% dari seluruh produksi perikanan yang ada berasal dari wilayah pesisir, khususnya dari ekosistem padang lamun, mangrove, terumbu karang, laguna dan estuaria. Lebih dari 2000 jenis ikan dan 500 jenis terumbu karang menjadikan Negara Indonesia terkenal sebagai kawasan pusat segitiga terumbu karang (*The Coral Triangle Center*). Ekosistem terumbu karang selain memiliki fungsi bagi biota laut, juga memiliki fungsi sebagai penyerap karbon, pemecah gelombang laut, penghasil ikan yang sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus dan bagi seluruh rakyat Indonesia secara umum.

Kita menyadari, pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut juga harus sejalan dengan upaya perlindungan dan pelestarian. Oleh karena itu, ketersediaan sumberdaya ikan wajib kita jaga demi kesejahteraan masyarakat saat ini dan di kemudian hari. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per.17/MEN/2008 telah mengamatkan dan mengatur bagaimana semestinya konservasi dijalankan untuk

menjamin ketersediaan sumberdaya ikan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada event *World Ocean conference* (WOC) di Manado tahun 2009 telah menyampaikan komitmen pencapaian luas 20 juta hektar kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil kepada masyarakat dunia pada tahun 2020. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus bekerja keras mewujudkan target tersebut demi menjaga keberlangsungan potensi sumberdaya ikan di Indonesia.

Harapan Saya, buku ini dapat membuka paradigma konservasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat, serta dijadikan acuan bersama untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Biru (*Blue Economic Zone*). Dibawah kepemimpinan Saya, pembangunan kelautan dan perikanan akan menggunakan paradigma *Blue Economy* dalam rangka pengejawantahan Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Saya menyambut baik penerbitan buku yang berjudul “Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia: Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya” ini. Semoga karya berharga ini mampu mengilhami dan memotivasi berbagai pihak dalam pemanfaatan ekonomi yang berbasis konservasi dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat manusia kini dan mendatang.

Sharif C. Sutardjo

# Sambutan

*Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar dengan 17.480 pulau, besar dan kecil, yang tersebar dari Pulau Sabang di ujung barat, hingga Merauke di ujung timur, serta Pulau Rote di ujung selatan hingga Pulau Miangas di ujung utara, saling teruntai merajut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari letak geografis, Indonesia juga merupakan Negara tropis dengan ekosistem yang lengkap dan biodiversitas yang sangat tinggi. Namun sangat disayangkan, akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan berlebih (*overfishing*), pembuangan limbah dan penambangan pasir laut serta aktifitas manusia yang merusak lainnya telah mengancam keberlanjutan sumberdaya ekosistem, khususnya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Disamping itu, tingkat pola penangkapan subsisten, sistem rantai penjualan hasil tangkapan yang kurang berpihak pada nelayan dan pendidikan yang rendah membuat kehidupan masyarakat pesisir masih belum mengembirakan. Jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang yang berasal dari sekitar 10.600 desa nelayan yang terdapat di kawasan

pesisir pada berbagai daerah di tanah air atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.

Tidak berlebihan rasanya apabila wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diumpamakan sebagai salah satu jantung perekonomian sebagian masyarakat Indonesia. Di wilayah inilah sebagian masyarakat kita bermukim sekaligus bermata pencaharian sehingga denyut kehidupan Indonesia sesungguhnya bisa kita rasakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menjawab berbagai tantangan tersebut, salah satu program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dilakukan melalui konservasi yang bertujuan melindungi, melestarikan dan mengelola secara berkelanjutan sumberdaya ikan, meliputi ekosistem, jenis dan genetik ikan secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu upaya konservasi ekosistem adalah dengan mengembangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan sistem zonasi, diantaranya zona perikanan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya dan penangkapan ikan ramah lingkungan serta zona pemanfaatan untuk kegiatan wisata bahari. Program ini tentunya sejalan dengan penerapan prinsip Blue Economy untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan.

Buku berjudul “Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia: Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya” ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan atas perkenaanannya memberi sambutan pengantar dalam buku ini dan kepada semua pihak yang telah mencurahkan waktu dan pikiran demi suksesnya penerbitan buku ini, semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

**Sudirman Saad**

# Pengantar

*Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan,*

**Isu** konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Dengan potensi sumberdaya yang berlimpah, Indonesia dituntut mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Konservasi sumberdaya ikan didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Penerapan paradigma lama yang mbingkai pengelolaan kawasan konservasi bersifat sentralistik dan tertutup (larangan) bagi semua pihak dalam konteks pemanfaatannya, harus jujur diakui telah berdampak kurangnya manfaat sosial ekonomi kawasan konservasi perairan bagi masyarakat. Pun pada akhirnya kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Kini paradigma lama tersebut telah berubah sehingga upaya konservasi dapat sejalan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan secara bertanggung jawab. Kementerian Kelautan dan

Perikanan melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan hadir menjawab tantangan perubahan paradigma konservasi ini.

Berkat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan jenis ikan, hingga saat ini kita telah melahirkan sekitar 15,78 juta hektar luasan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2012. Pemerintah Indonesia berkomitmen menggenapkan luasan ini menjadi 20 juta hektar pada Tahun 2020. Komitmen tersebut tentunya selaras dengan komitmen bagaimana meningkatkan status pengelolaan efektif terhadap kawasan-kawasan tersebut. Sesuai judulnya, buku “Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia: Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya” ini menuturkan paradigma baru konservasi dari aspek desentralisasi kebijakan dan sistem zonasi dalam pengelolaannya, perkembangan capaian dan upaya-upaya pengelolaan efektif kawasan konservasi, dilengkapi dengan profil dan data informasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang utuh dalam menyajikan kekayaan sumberdaya hayati di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus menjadi pembelajaran dalam pengembangan kawasan konservasi di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas penerbitan buku ini. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada semua pihak atas upaya kerasnya membantu penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat.

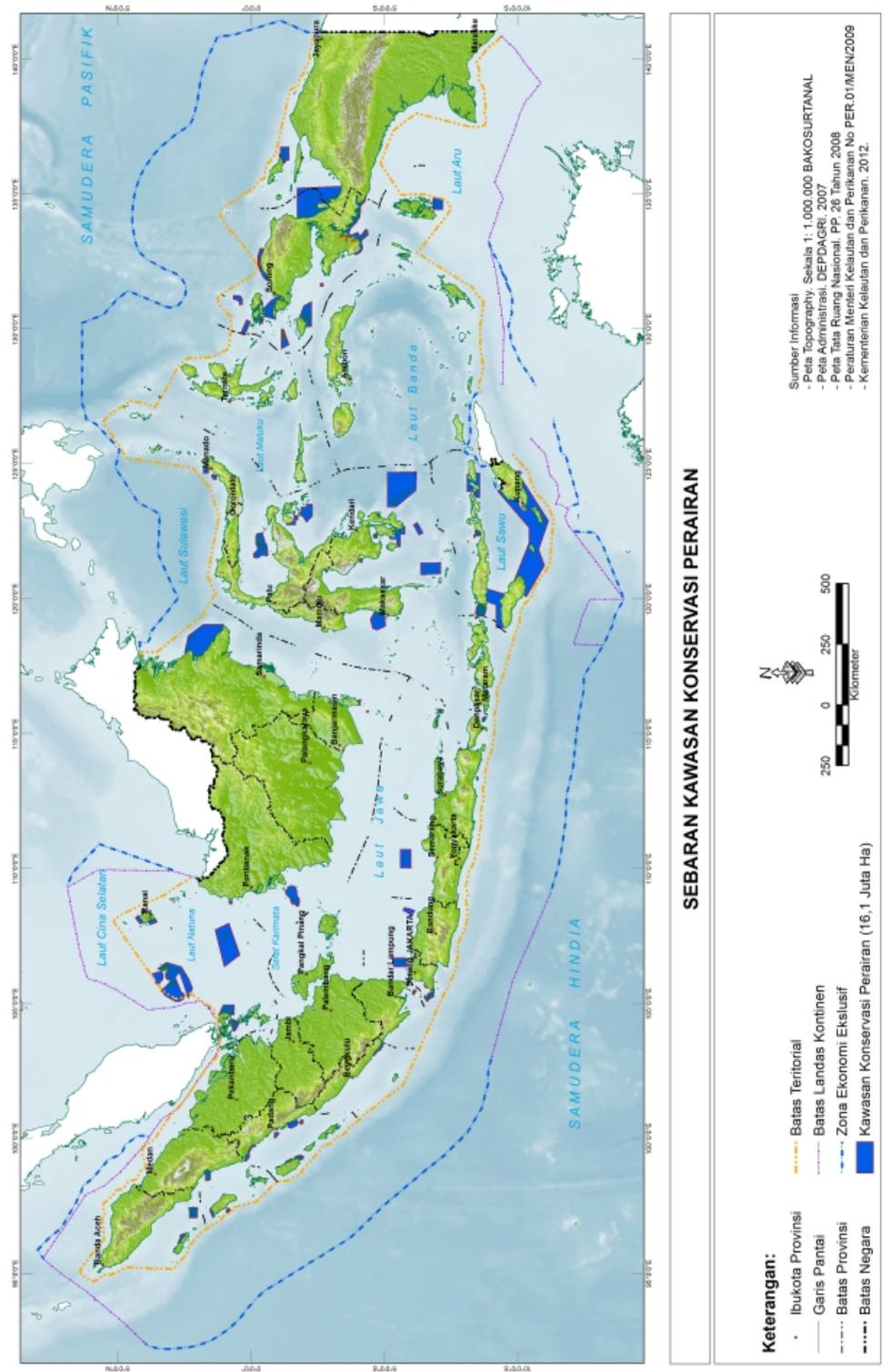
**Toni Ruchimat**

# Daftar Isi

1. Latar Belakang – Konservasi di Negara Kepulauan yang Kaya Potensi	03
2. Paradigma dan Perkembangan Pengelolaan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.	07
3. Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	27
Box. 1 Mengenal Potensi Kawasan Konservasi Perairan Nasional	36
Box.2 Beberapa Potensi Kawasan Konservasi Perairan Daerah – Upaya Pengelolaan Efektif Kawasan Mendukung Program <i>Blue Ekonomi</i>	59
Box.3 Potensi Ekowisata dan Edukasi Kawasan Konservasi Berbasis Spesies	78
4. Pengelolaan Kawasan Konservasi ke Depan: Harapan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat Atas Efektifitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	81
<b>Lampiran.</b> Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil	83
A. Kawasan Konservasi Perairan Laut – Inisiasi Kementerian Kehutanan	84
B. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil – Inisiasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Pemerintah Daerah	86
C. Kawasan Konservasi Perairan Daratan	97



Photo | andi.aw.masry





## Konservasi,

telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Kawasan Konservasi perairan dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif, yaitu melalui pengalokasian sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik.

“Alternatif pengelolaan perikanan yang banyak diterapkan akhir-akhir ini sebagian besar adalah pengelolaan berbasis ekosistem melalui pembentukan suatu jejaring Kawasan Konservasi Perairan”



# 01

## Latar Belakang **Konservasi** di Negara Kepulauan yang Kaya Potensi

**Luas** Wilayah Indonesia tidak kurang dari 5,18 juta km<sup>2</sup> dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.480 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairannya 3.257.483 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut sejauh 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara samudera hindia dan samudera pasifik dengan panjang garis lebih kurang 95.186 km, yang merupakan garis pantai tropis terpanjang di dunia setelah Kanada.

Didalam wilayah tersebut terkandung berbagai potensi perikanan tangkap lestari sebesar 6,4 juta ton, lahan budidaya sekitar 1,1 juta Ha, dan potensi lain baik dari udang-udangan, kerang-kerangan, maupun mamalia laut. Sekitar 80% industri dan 75% kota besar Indonesia berada di wilayah pesisir. Dari sekitar 60 cekungan minyak dan gas bumi yang dimiliki Indonesia, 70% nya berada di laut. Cadangan minyak bumi di laut Indonesia diperkirakan masih bisa mencapai 9,1 milyar barrel. Potensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah jasa transportasi laut, industri maritim, wisata bahari, industri alternatif, dan sumber obat-obatan.

**wilayah** pesisir merupakan ekosistem sangat produktif yang berfungsi sebagai penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 55% dari hasil perikanan nasional berasal dari perikanan tangkap di wilayah pesisir. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk terumbu karang, mangrove, padang lamun, laguna, dan estuari. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan rumah bagi 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustasea, 6 jenis penyu, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Dengan 70 genera dan 500 spesies karang keras yang meliputi 32.935 km<sup>2</sup> (atau 16,5% dari luas terumbu karang dunia). Indonesia merupakan bagian dari segi tiga terumbu karang (*coral triangle*), wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (*megadiversity country*). Sebagai bagian dari kawasan *Coral Triangle*, daerah keanekaragaman hayati laut yang luar biasa ini dianggap sebagai bentangan terumbu karang terbesar kedua di dunia setelah *Great Barrier Reef* di Australia. Ekosistem terumbu karang tersebut memberikan multi manfaat, termasuk diantaranya untuk perlindungan pantai dari gelombang badai, sumber makanan dan habitat biota, bahan genetik untuk obat, hamparan pantai karang dan pasir, serta surga bawah air untuk menyelam bagi jutaan wisatawan.

Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut meliputi genetik, spesies dan ekosistem. Pengertian keanekaragaman hayati dan nilai manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya, dan estetika perlu memperoleh perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu sumberdaya hayati yang beranekaragam, diantaranya adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove dan berbagai

jenis ikan, serta potensi jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian masyarakat pesisir yaitu pengembangan pariwisata bahari dan jasa perhubungan laut.

Secara sosial ekonomi, sebagai negara berkembang masyarakat Indonesia sebagian besar masih tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, seperti pemanfaatan ikan hidup untuk konsumsi dan akuarium yang telah berlangsung lama. Sumberdaya hayati laut telah memainkan peran perekonomian bagi masyarakat di wilayah pesisir, sebagai penyumbang protein dari hasil ikan

tangkapan, maupun berbagai turunan produksi yang dapat dikembangkan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti jasa wisata bahari maupun aspek-aspek sosial ekonomi lainnya yang berkembang di wilayah pesisir. Pemanfaatan sumber-daya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber-daya alam tersebut bagi generasi mendatang.

Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah, sampai saat ini masih belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat masih bergelut dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas kesehatan yang kurang baik serta cenderung tidak berdaya menghadapi berbagai masalah. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pemahaman terhadap pelestarian lingkungan, menjadi salah satu pembeda tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumberdaya laut serta tidak memperhatikan kelestarian

sumberdaya, sehingga dapat mengakibatkan penurunan fungsi, kualitas, dan keanekaragaman hayati.

Konservasi, telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Berbagai permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan dan kelautan, yang terkait dengan kelestarian sumberdaya hayati laut sebagai masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perairan antara lain: adanya pemanfaatan berlebih (*over exploitation*) di beberapa wilayah terhadap sumber daya hayati pesisir dan laut, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, introduksi spesies asing, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan perubahan iklim global serta bencana alam. Upaya-upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat telah dilakukan guna

**Konservasi, telah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian sumberdaya yang ada bagi masa depan.**



pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kawasan Konservasi perairan dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif, yaitu melalui pengalokasian sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Kondisi ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, akan berdampak pada peningkatan sumberdaya ikan di wilayah sekitarnya yang merupakan areal penting penangkapan bagi masyarakat pesisir, sehingga dampak konservasi kawasan perairan akan mendukung kegiatan perikanan secara langsung, maupun berbagai pemanfaatan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata bahari yang pada akhirnya mampu memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.



# 02

## Paradigma dan Perkembangan **Pengelolaan Konservasi** *Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil*

**SEJARAH PERKEMBANGAN** - Upaya konservasi perairan di Indonesia tumbuh selaras dengan pembangunan nasional di bidang konservasi sumberdaya ikan, tuntutan masyarakat pesisir serta perkembangan konservasi dunia yang berwawasan global. Kesadaran konservasi di Indonesia bahkan telah muncul jauh sebelum masa penjajahan belanda, hal ini ditunjukkan, misalnya pada abad ke-13 (zaman majapahit) telah muncul undang-undang yang mengatur pengelolaan air dan terbitnya ordonansi tentang pengaturan satwa liar pada zaman penjajahan Belanda. Perjalanan konservasi di Indonesia terus bergulir pada masa sebelum kemerdekaan, dan orde-orde pemerintahan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga kini, jejak kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut masih berjalan di beberapa desa pesisir. Di Sulawesi Utara, misalnya, masyarakat Sangihe-Talaud memiliki tradisi eha laut sebagai masa jeda panen ikan selama tiga hingga enam bulan. Usai eha, dilakukan upacara mane'e, sebuah pola pemanenan ikan tradisional yang telah disepakati bersama oleh para tetua adat. Maluku dan Irian juga memiliki aturan adat yang dinamakan sasi yang mengatur tata cara pemanenan ikan dengan sistem buka tutup (*open and close system*), serta banyak contoh kearifan tradisional lainnya di berbagai daerah. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya kawasan konservasi perairan dalam mendukung pelestarian sumberdaya kelautan dan pesisir, hal ini tercermin dalam deklarasi kawasan konservasi laut pertama tahun 1973 di Pulau Pombo, Maluku.

Perjalanan regulasi di bidang konservasi dan pengelolaannya juga tidak kalah dinamis. Hal ini sudah dimulai pada zaman kerajaan dengan "kitab-kitab-nya" hingga terbit beberapa Undang-undang, turunan undang-undang serta perubahannya. Perkembangan pemahaman konservasi saat ini, sangat maju dan telah terjadi pergeseran

paradigma pemahaman konservasi sebelumnya, khususnya yang terkait pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan, sebagaimana sering menjadi momok, khususnya bagi masyarakat nelayan. Begitu pula halnya dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat pesisir memiliki kewenangan pengelolaan dan tanggung jawab yang jelas untuk menjaga, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya pesisir di sekitarnya secara berkelanjutan.

Sejarah kegiatan konservasi Indonesia telah dimulai sejak lama, bahkan sebelum Indonesia berada dalam pendudukan Belanda. Masyarakat Indonesia sudah secara turun temurun secara arif memanfaatkan sumberdaya alam sekitar. Banyak bukti di masyarakat tentang pemanfaatan lestari sumberdaya alam ini, seperti adanya panglima laot di Aceh, lubuk larangan di Sumatera, kelong di Batam, mane'e di Sulawesi Utara, sasi di Maluku dan Papua, awig-awig di Lombok. Deskripsi evolusi program-program konservasi di Indonesia ini selanjutnya sebagian besar disadur dari Mulyana dan Dermawan (2008).

Di jaman pendudukan Belanda, sejarah konservasi dimulai pada tahun 1714 ketika Chastelein mendonasikan 6 ha tanah di daerah Banten untuk dijadikan cagar alam. Setelah itu, suaka alam pertama di Cibodas dideklarasikan secara resmi oleh Direktur Kebun Raya Bogor pada tahun 1889 dalam rangka melindungi hutan serta flora dan fauna yang terdapat di dalamnya.

Pada tahun 1913, dibawah pimpinan Dr. S.H. Koorders, Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda mengajukan 12 kawasan perlindungan, yaitu Pulau Krakatau, Gunung Papandayan, Ujung Kulon, Gunung Bromo, Nusa Barung, Alas Purwo, Kawah Ijen beserta dataran tingginya, dan beberapa situs di daerah Banten. Dalam bidang konservasi perairan, pada tahun 1920 keluar Staatsblad No. 396 dalam rangka melindungi sumberdaya perikanan dan melarang penangkapan ikan dengan bahan beracun, obat bius, dan bahan peledak. Setelah itu keluar Staatsblad No. 167 Tahun 1941 tentang penataan cagar alam dan suaka margasatwa.

Sejak saat itu, sampai masa pendudukan Jepang, dan dua puluh tahun setelah merdeka, Indonesia masih mewarisi langkah-langkah konservasi dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa perkembangan yang signifikan di era ini diantaranya kemudahan kegiatan penelitian laut, riset kelautan melalui operasi Baruna dan Cenderawasih, dan konsep Wawasan Nusantara melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diperkuat dengan UU No. 4 tahun 1960.

Selanjutnya, pada tahun 1971 dibentuk Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam dibawah Departemen Pertanian sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap kegiatan perlindungan alam. Dan pada tahun 1973 Indonesia ikut meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora dan Fauna*) dan dikukuhkan melalui Keppres No. 43 Tahun 1978.

Selama kurun waktu 1974 – 1983, pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan Program Pengembangan Taman Nasional dari FAO. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah meresmikan 10 Taman Nasional baru. Selain itu terbentuk pula Departemen Kehutanan dan Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, yang sekarang dikenal dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Departemen Kehutanan pada tahun 1984, telah merilis Sistem Kawasan Pelestarian Bahari Nasional

yang berisi kerangka kerja bagi berbagai aktifitas perlindungan perairan, dasar-dasar pemilihan dan penetapannya, serta daerah-daerah prioritas pengembangan daerah konservasi laut.

Nilai penting sumberdaya perairan dalam pembangunan nasional mulai dimasukkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa wilayah pesisir, laut, daerah aliran sungai, dan udara harus dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alamnya. Pengelolaan areal laut secara khusus harus ditingkatkan supaya berdaya guna dan berkelanjutan.

Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendapat dukungan secara hukum dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 1990, yang mengatur seluruh aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Menurut peraturan ini, konservasi dilakukan dengan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini juga menggeser paradigma pelestarian yang hanya bertumpu pada pencadangan area menjadi konservasi ekosistem, spesies, dan genetik.

Pengembangan kawasan konservasi perairan terus berjalan seiring dengan waktu. Sampai dengan 1997 Indonesia telah memiliki lebih dari 2,6 juta perairan yang masuk dalam 24 kawasan konservasi, enam diantaranya sebagai taman nasional yaitu Kepulauan Seribu, Karimunjawa, Teluk Cenderawasih, Bunaken, Wakatobi, dan Takabonerate. Pembagian jenis kawasan konservasi semakin jelas dengan keluarnya PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa KSA terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sedangkan KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Sumberdaya pesisir dan laut mendapat perhatian lebih besar dengan berdirinya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan pada tahun 1999, yang kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan dan terakhir berubah nama menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menangani kegiatan-kegiatan konservasi sumberdaya pesisir dan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut (DIT. KTNL) yang kemudian berubah menjadi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Dit. KKJI). Pada awalnya, Dit. KKJI mengembangkan konsep-konsep konservasi dan memfasilitasi upaya konservasi di daerah, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Laut yang sering disebut dengan nama Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), walaupun dalam perjalanan regulasi aturan tidak ada istilah konservasi perairan laut yang mengakomodir istilah KKLD. Istilah yang dikenal perundang-undangan adalah kawasan konservasi perairan (KKP) dan/atau kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K). Saat ini telah banyak inisiatif pemerintah daerah mengembangkan konservasi kawasan di perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya meningkatkan luasan kawasan konservasi menuju pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan.

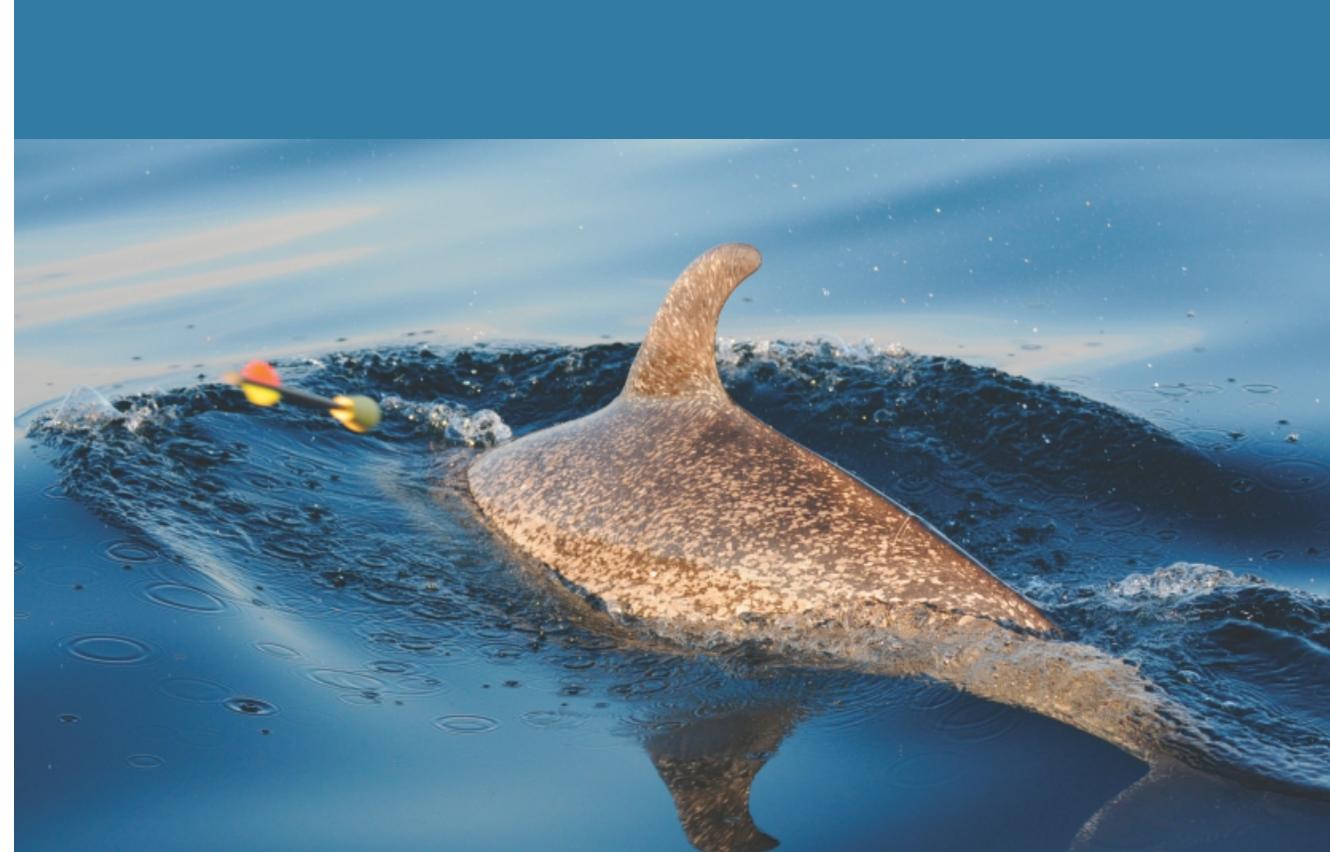


**PARADIGMA KONSERVASI** – Pengertian konservasi, khususnya konservasi sumberdaya ikan telah dipahami sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan (PP No. 60 Tahun 2007). Konservasi bukan hanya upaya perlindungan semata, namun juga secara seimbang melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan yang pada akhirnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya Konservasi sumberdaya ikan ini mencakup konservasi ekosistem (salah satunya melalui kawasan konservasi perairan), jenis dan genetik.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2007 pasal 1. Kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. IUCN – *The Conservation Union*, mendefinisikan kawasan konservasi laut sebagai suatu area atau daerah di kawasan pasang surut beserta kolom air di atasnya dan flora dan fauna serta lingkungan budaya dan sejarah yang ada di dalamnya, yang diayomi oleh undang-undang untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan yang tertutup. Lebih lanjut, menurut UU 27/2007, Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan

Berdasarkan pengertian Kawasan Konservasi Perairan menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya (UU No. 45 Tahun 2009) dan PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, paling tidak ada dua hal penting yang menjadi paradigma baru dalam pengelolaan konservasi. **Pertama**, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem ZONASI. Ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zona perikanan berkelanjutan tidak pernah dikenal dan diatur dalam regulasi pengelolaan kawasan konservasi terdahulu baik menurut UU No. 5 tahun 1990 maupun PP No. 68 tahun 1998. **Kedua**, terjadi desentralisasi kewenangan pengelolaan, dimana pengelolaan kawasan konservasi yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat saja, kini berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 (Lebih lanjut, pengaturan mengenai kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2008) dan PP No. 60 Tahun 2007 serta Permen Men KP no Per.02/Men/2009, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola kawasan konservasi di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008, khususnya terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut dan konservasi.

Adanya pengaturan sistem zonasi pengelolaan kawasan konservasi serta perkembangan desentralisasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, jelas merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan. Kekhawatiran akan berkurangnya akses nelayan yang dikhawatirkan banyak pihak dirasa sangat tidak mungkin. Justru hak-hak tradisional masyarakat sangat diakui dalam pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di



dalam kawasan konservasi (zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya), misalnya untuk budidaya dan penangkapan ramah lingkungan, pariwisata bahari dan lain sebagainya. Pola-pola seperti ini dalam konteks pemahaman konservasi terdahulu (sentralistis) belum banyak dilakukan. Peran Pemerintah pusat dalam konteks ini, hanya memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi, sedangkan proses inisiasi, identifikasi, pencadangan maupun pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Tentu bukan hal yang mudah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemegang mandat pengelolaan kawasan konservasi perairan menurut PP 60 Tahun 2007 untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan. Melekatnya paradigma lama yang membingkai pengelolaan kawasan konservasi secara sentralistik dan tertutup telah menihilkan partisipasi masyarakat dalam konteks pemanfaatannya. Alhasil manfaat sosial ekonomi kawasan konservasi perairan bagi masyarakat pun diakui atau tidak masih sangat kurang. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya respon positif masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

Belajar dari pengalaman terdahulu, ke depan perlu disosialisasikan paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi, yakni pengelolaan kawasan konservasi perairan yang melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya agar kelestarian suatu kawasan konservasi dapat terjaga dengan baik selaras dengan manfaat sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dalam hal ini, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan-Ditjen KP3K selaku pelaksana teknis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peran penting dalam mewujudkan misi pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk kesejahteraan masyarakat.

**HARMONISASI PENGELOLAAN** – Sampai saat ini, kewenangan urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasan perairan dan konservasi jenis ikan dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi/lembaga/kementerian, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kehutanan. Dengan sistem pengelolaan seperti itu, akan timbul tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan. Tumpang tindih wewenang ini lambat laun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan benturan kepentingan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pengaturan. Sebabnya jelas: perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh lebih dari satu otoritas.

Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan pendekatan manajemen yang lebih spesifik, antara lain karena terkait dengan dinamika ekosistem perairan yang senantiasa bergerak serta karakteristik biota perairan yang tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan wewenang urusan-urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasan perairan dan konservasi jenis ikan berkaitan sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi masing-masing instansi pelaksana mandat. Selain itu, menurut undang-undang hukum laut internasional, laut merupakan sumber daya milik umum (*public property*) sehingga pengelolaannya memerlukan fleksibilitas dalam penetapan hukum di tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya di lapangan, hal ini sering menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam proses penentuan arah kebijakan konservasi sumber daya perairan. Jalan tengah yang perlu dilakukan adalah perumusan pembagian urusan secara lebih jelas agar tercipta keselarasan kerja, baik pada tahap pembuatan kerangka kebijakan dan pengaturan (*policy and regulatory framework*) maupun pada tahap implementasinya.

Lebih lanjut, upaya harmonisasi dan penyelarasan urusan bidang konservasi kawasan dan jenis ikan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagian telah membuahkan hasil yang baik. Pada tanggal 4 Maret 2009, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 - BA.108/MEN.KP/III/2009 (Suraji et al., 2010). Upaya tersebut langsung ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.63/MEN/2009 sampai No. Kep.70/MEN/2009 tentang penetapan 8 (delapan) kawasan konservasi perairan nasional dan penamaan 8 (delapan) Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) tersebut sesuai dengan nomenklatur yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60/2007. Nama-nama 8 (delapan) KSA/KPA yang diserahkan tersebut adalah SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara di Provinsi Maluku; SAP Kepulauan Raja Ampat–Papua Barat; SAP Kepulauan Waigeo sebelah Barat, dalam hal ini Kepulauan Panjang di Provinsi Papua Barat; Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang di Sulawesi Selatan; TWP Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; TWP Kepulauan Padaidodi Provinsi Papua; TWP Laut Banda di Provinsi Maluku; dan TWP Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat.

**KEBIJAKAN DAN REGULASI** – Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan secara keseluruhan. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan,



pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah telah menetapkan kebijakan antara lain, ditetapkannya target nasional yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencanangan target 10 juta hektar kawasan konservasi Laut pada tahun 2010, yang menjadi dasar komitmen kementerian kelautan dan perikanan untuk menggandakan target menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020, juga pernyataan Presiden mengenai *Coral Triangle Initiative* (CTI) dalam forum *APEC Leaders Meeting* di Sydney, 2007. Dukungan kebijakan nasional dalam pengembangan kawasan konservasi perairan dibuat secara menyeluruh dan terpadu serta mempertimbangkan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Berbagai kebijakan, peraturan, pedoman terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan juga telah dikembangkan.

Saat ini telah banyak peraturan perundangan ataupun turunannya sebagai acuan dalam mengembangkan dan mengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, diantaranya: UU No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007 (Penataan Ruang); UU No.27 Tahun 2007 (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil); Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 (Konservasi Sumberdaya Ikan); Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 tahun 2005 (Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar); Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 41 Tahun 2000 (Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis

Masyarakat); Kepmen KP No. 38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang dan Ekosistemnya; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) No. Per.16 Tahun 2008 (Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil); Permen KP No. Per.17 Tahun 2008 (Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil); Permen KP No. Per.02/Men/2009 (Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan); Permen KP No. Per.03/Men/2010 (Tata Cara Penetapan Perlindungan Jenis Ikan); Permen KP No. Per.04/Men/2010 (Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan); Permen KP No. Per.30/Men/2010 (Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan) dan beberapa Peraturan Menteri; dan berbagai kebijakan, pedoman dan pelaksanaannya.



**KOMITMEN PENGELOLAAN** - Dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan secara umum dan pengelolaan KKP secara spesifik, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Unit Pelaksana Teknis di beberapa daerah. Pada Maret 2008, dibentuk Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Selanjutnya pada November 2008 menyusul dibentuk Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, dan BPSPL Pontianak. Bulan Januari 2009 berdiri Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru dan setahun kemudian dibentuk LPSPL Serang. Tugas utama BKKPN/LKKPN adalah melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional demi kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan tugas utama BPSPL/LPSPL adalah melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau

kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bulan Mei 2009, Indonesia menjadi tuan rumah even besar yaitu *World Ocean Conference* (WOC) – Konferensi Kelautan Dunia. Dalam even ini, para ahli kelautan mempresentasikan berbagai kegiatan penelitian dan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut. Selain itu, even ini juga sebagai ajang diskusi, komunikasi, dan sharing pengalaman ahli-ahli kelautan dunia. Dalam even tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) mendeklarasikan pencadangan Laut Sawu sebagai Taman Nasional Perairan (TNP). TNP Laut Sawu ini mencakup luasan 3,5 juta ha dan secara administratif berada dalam wilayah 10 kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi NTT.

Bersamaan dengan WOC 2009, Indonesia juga menekankan kembali komitmennya untuk mengembangkan KKP menjadi 20 juta Ha pada tahun 2020. Komitmen tersebut didukung oleh negara-negara tetangga dalam wilayah *Coral Triangle*, Malaysia, Philippines, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste, serta komitmen dukungan dana dari Amerika Serikat dan Australia. Komitmen tersebut juga ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan dan pengelolaan KKP, yang salah satunya adalah penyusunan *National Plan of Action* (NPOA) dan *Regional Plan of Action* (RPOA).

**PERKEMBANGAN KONSERVASI** - Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Data Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) menyebutkan bahwa sampai bulan Juni tahun 2012 terdapat sekitar 15,78 juta hektar kawasan konservasi perairan (laut) di Indonesia. Kawasan konservasi perairan maupun kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkembang di Indonesia niscaya tidak hanya terhenti dalam capaian luasan semata, namun pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan yang “efektif” adalah harapan yang senantiasa terus digapai perwujudannya, hingga pada akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat sebagai *benefit* pengelolaan kawasan konservasi yang lestari.

TABEL Status Luas Kawasan Konservasi Perairan (Laut) di Indonesia

No.	Kategori	Jumlah	Luas (Ha)
<b>A</b>	<b>Inisiasi Kementerian Kehutanan</b>	32	4.694.947,55
1	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
2	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
3	Suaka Margasatwa Laut	5	5.678,25
4	Cagar Alam Laut	6	154.480,00
<b>B</b>	<b>Inisiasi Kementerian Kelautan &amp; Perikanan, dan Pemerintah daerah</b>	76	11.089.181,97
1	Taman Nasional Perairan	1	3.521.130,01
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	66	5.581.381,76
		108	15.784.129,52

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2012



Dikaji dari perspektif perlindungan terhadap habitat penting (*critical habitats*), hasil *gap analysis* tahun 2010 terhadap kawasan konservasi di Indonesia menyimpulkan bahwa ekosistem terumbu karang mencakup luasan 3,29 juta ha, mangrove 3,45 juta ha, dan luasan padang lamun 1,76 juta ha. Dari luasan tersebut, saat ini Indonesia telah melakukan perlindungan dengan menjadi bagian wilayah konservasi terhadap 22,7% terumbu karang (747.190 ha), 22,0% mangrove (758.472 ha), dan 17,0% padang lamun (304.866 ha). Pencapaian perlindungan terhadap habitat penting di tiap-tiap ekoregion disajikan pada Tabel di bawah ini.

TABEL Persentasi Habitat Penting yang Telah Dilindungi di setiap Ekoregion

Urut	Ekoregion	Terumbu Karang (%)	Mangrove (%)	Padang Lamun (%)
1	Papua	43,2	16,9	52,9
2	Laut Banda	17,3	6,0	0,6
3	Lesser Sunda	37,5	30,7	22,8
4	Laut Sulawesi/ Selat Makassar	5,3	32,1	23,4
5	Halmahera	0,0	0,0	0,0
6	Palawan/ Borneo Utara	79,1	5,2	0,0
7	Sumatera Bagian Barat	18,2	11,0	89,0
8	Teluk Tomini	16,0	31,4	0,0
9	Paparan Sunda/ Laut Jawa	19,5	5,7	0,2
10	Laut Arafura	5,3	44,2	0,1
11	Jawa Bagian Selatan	7,1	17,8	2,6
12	Selat Malaka	17,1	6,4	22,2

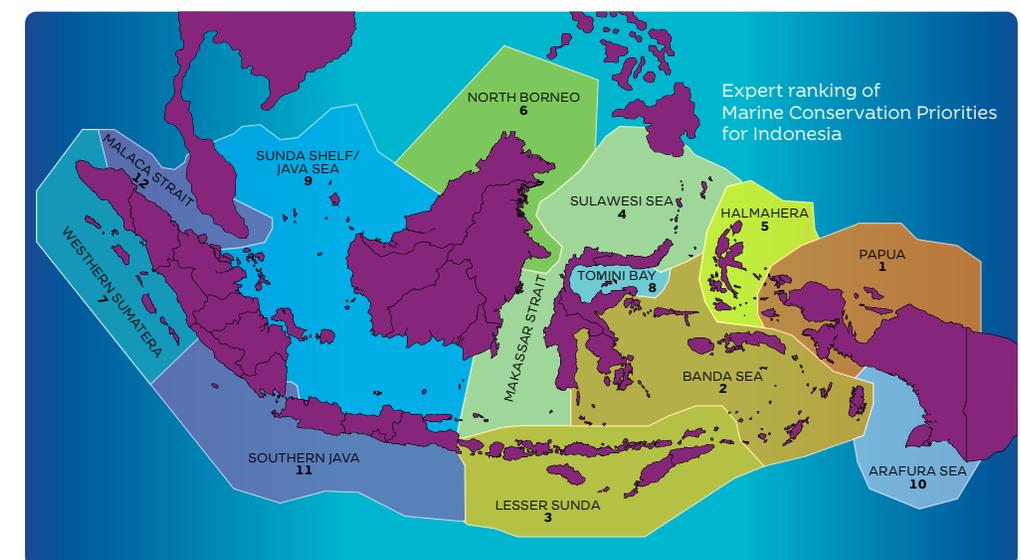
Sumber: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010

Berdasarkan Tabel di atas, maka perlu diupayakan pengembangan KKP/KKP3K di ekoregion-ekoregion yang saat ini masih belum memenuhi target, terutama di ekoregion Halmahera. Di ekoregion ini belum ada perlindungan terhadap habitat penting, baik mangrove, terumbu karang maupun padang lamun<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Kajian Huffard et al. (2010) merekomendasikan upaya pengembangan KKP di ekoregion Halmahera, Sumatera bagian Selatan, dan Laut Sulawesi/Selat Makassar.

Menurut Bohnsack et al. (2000), melindungi sekitar 20 – 30% luasan terumbu karang telah terbukti dapat mendukung keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Sedangkan PISCO (2002) mensinyalir bahwa manfaat optimal dari pengelolaan KKP melalui *spill-over* dan produksi larva akan meningkat pada perlindungan terhadap 20–30% luasan habitat penting. Setelah melewati 20–30%, KKP menjadi sangat luas, sehingga akan menurunkan produksi perikanan karena menyempitnya daerah penangkapan bagi masyarakat. Pendapat Bohnsack hanya terfokus pada ekosistem, sedangkan PISCO hanya berorientasi pada hasil penangkapan ikan.

Menilik luasan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang telah mencapai 15,7 juta hektar, tentu masih dibutuhkan pengembangan sekitar 4,3 juta ha lagi Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan 8 tahun mendatang. Kajian untuk memetakan rencana pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman hayati wilayah perairan Indonesia. Hasilnya pun telah dipublikasikan, yakni dengan judul “Penetapan Prioritas Geografi untuk Konservasi keanekaragaman Hayati Laut di Indonesia” yang merupakan hasil kajian dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas untuk pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di masa yang akan datang. Buku tersebut merupakan hasil pemikiran para ahli kelautan dalam dan luar negeri untuk mengetahui wilayah-wilayah prioritas berdasarkan pada kriteria ekologi yang mencakup 3 aspek yaitu: (a) Ketidak tergantikan (*irreplaceability*) yang mencakup tingkat endemisme, keunikan taksonomi, keberadaan spesies langka yang berkaitan dengan keanekaragaman spesies dan habitat terumbu karang, ikan karang, padang lamun, dan mangrove; (b) kerentanan terhadap perubahan dan gangguan alam; dan (c) keterwakilan habitat dalam wilayah perencanaan. Ada 12 wilayah biokoregion yang dirangking keanekaragaman hayatinya, batas-batas ekoregion peringkat 1 (Papua, prioritas konservasi teratas) sampai ekoregion peringkat 12 (Selat Malaka, prioritas konservasi paling rendah), seperti gambar berikut.



**PENGELOLAAN KONSERVASI** – Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, dalam menjalankan program kegiatan, berpedoman pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran program kegiatan dalam 5 tahun (2010 – 2014) adalah Terkelolanya kawasan konservasi perairan seluas 4,5 juta hektar secara berkelanjutan serta bertambahnya luas kawasan konservasi perairan di Indonesia menjadi 15,5 juta hektar pada tahun 2014. Pada urusan konservasi jenis ikan, Direktorat ini menyoar 15 jenis biota perairan yang dilindungi (napoleon, arwana *super red*, arwana jardini, kuda laut, karang, hiu, paus, Banggai *Cardinal Fish*, kima, terubuk, labi-labi, lola, teripang, penyu, dan dugong) untuk dikelola secara berkelanjutan.

TABEL Target Pengelolaan Efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2010–2014

NO	LOKASI/NAMA KKP	LUAS (Ha)	TINGKAT E-KKP			KETERANGAN
			AWAL 2011	2012-2013	TARGET 2014	
1	KKPN/TNP Laut Sawu, NTT	3.521.130,01				KKJI+UPT
2	KKPN/TWP Gili Matra, NTB	2.954,00				KKJI+UPT
3	KKPN/TWP Laut Banda, Maluku	2.500,00				KKJI+UPT
4	KKPN/TWP P. Pieh, Sumbar	39.900,00				KKJI+UPT
5	KKPN/TWP Padaido, Papua	183.000,00				KKJI+COREMAP+UPT
6	KKPN/TWP Kapoposang, Sulsel	50.000,00				KKJI+COREMAP+UPT
7	KKPN/SAP Aru Tenggara, Maluku	114.000,00				KKJI+UPT
8	KKPN/SAP Raja Ampat, Papua Barat	60.000,00				KKJI+COREMAP+UPT
9	KKPN/SAP Waigeo, Papua Barat	271.630,00				KKJI+COREMAP+UPT
10	KKPD/ Raja Ampat, Papua Barat	970.900,00				KKJI+COREMAP+UPT+PEMDA
11	KKPD/ Sukabumi, Jawa Barat	1.771,00				KKJI+PEMDA
12	KKPD/ Berau, Kaltim	1.271.749,00				KKJI+PEMDA
13	KKPD/ Pesisir Selatan, Sumbar	733,00				KKJI+PEMDA
14	KKPD/ Bonebolango, Gorontalo	2.460,00				KKJI+PEMDA
15	KKPD/ Batang, Jawa Tengah	6.800,00				KKJI+PEMDA
16	KKPD/ Lampung Barat, Lampung	14.866,87				KKJI+PEMDA
17	KKPD/ Alor, NTT	400.008,30				KKJI+PEMDA
18	KKPD/ Indramayu, Jawa Barat	720,00				KKJI+PEMDA
19	KKPD/ Batam, Kepri	66.867,00				KKJI+PEMDA
20	KKPD/ Bintan, Kepri	472.905,00				KKJI+PEMDA
21	KKPD/ Natuna, Kepri	142.997,00				KKJI+PEMDA
22	KKPN/ Anambas, Kepri	1.262.686,20				KKJI+PEMDA
23	KKP Lainnya (54-12=42 KKP)	1.842.960,27				KKJI+PEMDA
	JUMLAH	10.703.537,65	(Target Pengelolaan efektif: 4,5 jt Ha)			

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2012

Program-program konservasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, antara lain dilaksanakan melalui: (1) Konservasi Ekosistem/Konservasi Kawasan; (2) Konservasi jenis ikan dan Genetik; (3) Data, Informasi dan Jejaring Pengelolaan Konservasi, (4)

Pembinaan dan Penguatan Sumber Daya Manusia; (5) Penguatan Kebijakan, Peraturan dan Pedoman; (6) Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan; serta (7) Kerjasama Lokal, Regional, Internasional. Program-program tersebut, dilakukan untuk mencapai tujuan tercapainya kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang dikelola secara berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K) yang dikelola berdasarkan sistem zonasi, dapat dilakukan melalui tiga strategi pengelolaan, yaitu: (1) Melestarikan lingkungannya, melalui berbagai program konservasi, (2) menjadikan kawasan konservasi sebagai penggerak ekonomi, melalui program pariwisata alam perairan dan pendanaan mandiri yang berkelanjutan, dan (3) pengelolaan kawasan konservasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mensejahterakan masyarakat.

Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya dalam suatu kawasan konservasi, antarlain sebagai berikut:

Aspek	Strategi dan Program kegiatan
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sumber Daya Manusia;</li> <li>• Penatakelolaan Kelembagaan;</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur;</li> <li>• Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan;</li> <li>• Pengembangan Organisasi/ Kelembagaan Masyarakat;</li> <li>• Pengembangan Kemitraan;</li> <li>• Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan;</li> <li>• Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan; dan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi.</li> </ul>
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan;</li> <li>• Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan;</li> <li>• Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>• Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;</li> <li>• Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan;</li> <li>• Pengawasan dan Pengendalian; dan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi.</li> </ul>
Sosial-Ekonomi-Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat;</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>• Pelestarian Adat dan Budaya; dan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi.</li> </ul>

Pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan merupakan target utama dalam pengembangan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K) telah dikembangkan oleh kementerian kelautan dan perikanan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan

Kawasan Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Evaluasi efektivitas tersebut secara ringkas memuat tingkat keefektifan pengelolaan dari berbagai aspek, meliputi: tahapan pengelolaan, aspek ekologis, aspek sosial ekonomi dan budaya, dan aspek penatakelolaan kawasan konservasi perairan. Secara ringkas, terdapat 5 (lima) level (peringkat) pengelolaan, yaitu: **MERAH**: (Level 1), merupakan kawasan konservasi telah diinisiasi, dievaluasi dengan Pencadangan (SK); **KUNING**: (Level 2) kawasan konservasi didirikan, tersedia: lembaga pengelola, zonasi & manajemen plan; **HIJAU** (Level 3); kawasan konservasi dikelola minimum, tersedia: lembaga pengelola, zonasi serta manajemen plan, penguatan Kelembagaan dan SDM, Infrastruktur dan peralatan, upaya-upaya pokok pengelolaan KKP/KKP3K; **BIRU** (Level 4), kawasan konservasi dikelola optimum, pengelolaan KKP/KKP3K telah berjalan baik; dan **EMAS**: (Level 5) kawasan konservasi mandiri, pengelolaan KKP/KKP3K telah berjalan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Perangkat E-KKP3K dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. E-KKP3K tingkat makro digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat sebaran meruang (*spatial*) tingkat pengelolaan semua kawasan konservasi perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, sementara E-KKP3K tingkat mikro dapat digunakan untuk melakukan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sekaligus membuat perencanaan untuk meningkatkan kinerja.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada tingkat makro, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

KRITERIA		PERINGKAT	JUMLAH PERTANYAAN
<b>MERAH</b> (1)	<b>KKP/KKP3K DIINISIASI</b>	1 Usulan Inisiatif	<b>8</b>
		2 Identifikasi & inventarisasi kawasan	
		3 Pencadangan kawasan	
<b>KUNING</b> (2)	<b>KKP/KKP3K DIDIRIKAN</b>	4 Unit organisasi pengelola dengan SDM	<b>11</b>
		5 Rencana pengelolaan dan zonasi	
		6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan	
		7 Dukungan pembiayaan pengelolaan	
<b>HIJAU</b> (3)	<b>KKP/KKP3K DIKELOLA MINIMUM</b>	8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi	<b>21</b>
		9 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan	
		10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi	
		11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	
<b>BIRU</b> (4)	<b>KKP/KKP3K DIKELOLA OPTIMUM</b>	12 Penataan batas kawasan	<b>28</b>
		13 Pelembagaan	
		14 Pengelolaan sumberdaya kawasan	
		15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya	
<b>EMAS</b> (5)	<b>KKP/KKP3K MANDIRI</b>	16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat	<b>6</b>
		17 Pendanaan berkelanjutan	



Dalam penggunaannya, E-KKP3K menganut prinsip dasar konservasi sesuai dengan aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya dalam suatu kawasan konservasi, dimana aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat adalah fungsi dari pengelolaan (tata kelola). Dengan demikian, upaya pengelolaan dan keberhasilannya merupakan prasyarat untuk mencapai hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) pada aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat, sehingga keberhasilan pengelolaan harus dapat diverifikasi dengan menggunakan aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Misalnya, penegakan aturan kawasan konservasi merupakan upaya pengelolaan dapat dibuktikan dengan membaiknya kondisi sumberdaya kawasan dan berkurangnya tekanan terhadap sumberdaya yang merupakan hasil peningkatan dukungan terhadap kawasan. Selanjutnya, seyogianya terdapat hubungan positif dan saling terpaut & verifikasi antara aspek-aspek sumberdaya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat untuk menunjukkan bukti lanjut dari keberhasilan dari pengelolaan suatu kawasan konservasi.

Peningkatan upaya pengelolaan efektif kawasan konservasi juga dibarengi dengan identifikasi dan inventarisasi potensi calon kawasan konservasi yang diutamakan pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang rawan disintegrasi. Pengembangan kawasan konservasi ini untuk menjawab target 20 juta hektar Kawasan konservasi pada tahun 2020. Optimalisasi pengembangan kawasan konservasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar diharapkan mampu memperkuat integrasi yang mengokohkan wawasan nusantara, mengeliminasi terjadinya pelanggaran hukum, *illegal fishing* maupun eksploitasi sumberdaya yang berlebih yang mengancam degradasi sumberdaya lingkungan. Pengelolaan efektif kawasan konservasi dilakukan terhadap tiga aspek yang menjadi indikator utama dalam pengelolaan kawasan konservasi, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Penguatan status hukum kawasan di tingkat internasional dengan cara mendaftarkan pada Peta Pelayaran Internasional, mampu mencegah pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan zonasinya dan secara konsisten dapat mengatasi segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang mengancam kedaulatan wilayah laut dan perairan Indonesia.

Paradigma baru pengelolaan KKP/KKP3K dibawah Menteri Kelautan dan Perikanan tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan yang dapat dilakukan di dalam KKP/KKP3K meliputi pemanfaatan untuk perikanan tangkap dan budidaya, pemanfaatan wisata, pemanfaatan penelitian dan pengembangan, serta kegiatan ekonomi lainnya yang menunjang konservasi. Namun demikian pemanfaatan yang dilakukan dalam KKP/KKP3K ini bersifat terbatas dan harus mengutamakan kepentingan kelestarian sumberdaya, sehingga harus memperhatikan daya dukung kawasan. Secara prinsip maupun praktek di lapangan, dampak kawasan konservasi telah jelas dalam peningkatan hasil tangkapan masyarakat lokal. Hasil pengukuran efektivitas melalui E-KKP3K dapat menjadi indikator peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, bersumber dari hasil tangkapan ikan di wilayah tangkap nelayan yang merupakan limpahan manfaat kawasan konservasi perairan. Dampak ini nyata dalam mendorong peningkatan pendapatan langsung masyarakat dan menggerakkan sektor ekonomi pendukung di wilayah pesisir. Demikian pula penilaian dampak pengelolaan wisata bahari terhadap fungsi lingkungan kawasan konservasi perairan diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan efektif kawasan konservasi. Manfaat langsung pariwisata bahari dapat menjadi sumber pendanaan jasa lingkungan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Peluang ini sangat nyata dan berpotensi menjadi penggerak ekonomi yang cukup efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

LUAS PENGELOLAAN EFEKTIF KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL (2010-2014)

No	Tahun	Luas (Ha)	Luas Kumulatif (Ha)	Uraian Kegiatan
1	2010	900.000,00	900.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zonasi dan Rencana Pengelolaan</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan</li> <li>Infrastruktur Pendukung Pengelolaan Kawasan</li> <li>Koordinasi dan Pengawasan Sumberdaya Ikan</li> <li>Rehabilitasi Ekosistem Kawasan dan Populasi Ikan</li> <li>Pilot Project Perlindungan dan Pelestarian Kawasan</li> <li>Pilot Pemanfaatan Wisata Bahari dan Perikanan</li> <li>Penguatan Partisipasi dan Ekonomi Masyarakat</li> <li>Kerjasama dan Jejaring Pengelolaan kawasan</li> </ul>
2	2011	1.642.353,00	2.542.353,00	
3	2012	682.769,00	3.225.122,00	
4	2013	422.395,17	3.647.517,17	
5	2014	1.153.965,01	4.801.482,18	
	<b>Total</b>	<b>4.801.482,18</b>	<b>4.801.482,18</b>	

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2010

Capaian pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dan peta jalan menuju target tahun 2014 sebagaimana disajikan pada TABEL berikut:

#### Capaian dan Roadmap Konservasi Kawasan

TARGET KONSERVASI KAWASAN				
2010	2011	2012	2013	2014
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 900.000 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 2,5 jt Ha</li> <li>Penambahan seluas 700.000 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 3,2 jt Ha</li> <li>Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulasi 1,2 jt Ha)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 3,6 jt Ha</li> <li>Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulatif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 4,5 jt Ha</li> <li>Penambahan seluas 300.000 Ha (akumulasi 2 jt Ha)</li> </ul>

ROADMAP KONSERVASI KAWASAN				
2010	2011	2012	2013	2014
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 900.000 Ha</li> <li>TNP Laut Sawu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 2,5 jt Ha</li> <li>2010 + TNP Laut Sawu, Gilimatra, Laut Banda, Raja Ampat, Sukabumi, Berau, Pessel, Bonebolango, Pieh, Padaido, Kapoposang, Aru Tenggara, SAP Raja Ampat, Waigeo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 3,2 jt Ha</li> <li>2010 + 2011 + Batam Bintan, Natuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 3,6 jt Ha</li> <li>2010 + 2011 + 2012 + Batang, Lampung Barat, Alor, Indramayu</li> <li>Blue Economy: Nusa Penida, Klungkung, Lombok Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan 4,5 jt Ha</li> <li>2010 + 2011 + 2012 + 2013 TNP Laut Sawu</li> <li>Blue Economy: Nusa Penida, Klungkung, Lombok Timur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan seluas 700.000 Ha</li> <li>TWP Anambas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulasi 1,2 jt Ha)</li> <li>Kab. Nunukan, Belitung Timur, P. Iew Maluku Utara, Tanggamus, Sultra, Jember &amp; Trenggalek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan seluas 500.000 Ha (akumulasi 1,7 jt Ha)</li> <li>Kab. Toli-toli Sulteng, Maluku Tenggara Barat &amp; Sulbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan seluas 300.000 Ha (akumulasi 2 jt Ha)</li> <li>Kab. Nunukan (P. Gosong Makassar)</li> </ul>

Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2011

Sebaran target pengelolaan efektif yang akan dicapai pada tahun 2014 secara terperinci sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut ini:



Sumber: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2010



#### **MEMBANGUN KOLABORASI JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA.**

Sebagai upaya tindak lanjut pengembangan kawasan konservasi perairan (laut) dilakukan penguatan manajemen maupun keterkaitan ekologis antar kawasan konservasi dalam bentuk jejaring kawasan konservasi. Jejaring adalah merupakan keterkaitan antara kawasan konservasi laut (KKL) yang mempresentasikan daya lenting spesies dan habitatnya untuk mencapai keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan bersama. Jejaring (*network*) antar KKP/KKP3K mempunyai peranan yang penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Beberapa alasan dalam membuat jejaring antar KKP/KKP3K diantaranya adalah untuk: (1) menggambarkan, menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati; (2) memberikan model pemanfaatan KKP yang mendukung ekosistem setempat; (3) menjaga atau melindungi tempat biota laut yang dilindungi dari berbagai ancaman; (4) menjaga keberadaan potensi sumberdaya perikanan laut, serta (5) upaya memperluas dan meningkatkan ketahanan KKP/KKP3K.

Keterkaitan (*connectivity*) merupakan kata kunci pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan. Adanya keterkaitan biokologis merupakan pertimbangan dasar untuk mengelola beberapa KKP/KKP3K dalam satu sistem pengelolaan bersama untuk mewujudkan KKP/KKP3K yang tahan (*resilient*) terhadap ancaman dan dapat berfungsi efektif untuk mendukung perikanan berkelanjutan.

Jejaring KKP/KKP3K sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Pasal 19 dinyatakan bahwa dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi perairan, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Jejaring KKP/KKP3K tersebut dibentuk berdasarkan keterkaitan biofisik antar KKP/KKP3K disertai dengan bukti ilmiah yang meliputi aspek oceanografi, limnologi, biokologi perikanan, dan daya tahan lingkungan. Jejaring KKP/KKP3K pada tingkat lokal maupun nasional dilaksanakan

melalui kerja sama antar unit organisasi pengelola, sedangkan di tingkat regional maupun global dilaksanakan melalui kerja sama antar negara. Yang dimaksud dengan jejaring KKP/KKP3K pada tingkat regional adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan ekoregion yang mencakup dua atau lebih negara bertetangga serta memiliki keterkaitan ekosistem. Sedangkan jejaring KKP/KKP3K pada tingkat global adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam suatu hamparan beberapa ekoregion yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan ekosistem secara global dan mencakup beberapa negara.

Sampai saat ini keberadaan kawasan konservasi perairan (laut) belum terintegrasi antara KKP/KKP3K satu dengan KKP/KKP3K lainnya. Pada dasarnya diantara beberapa KKP/KKP3K tersebut terdapat suatu keterkaitan jejaring yang sangat kuat baik dalam aspek ekologis maupun pengelolaan. Penyusunan keterkaitan jejaring KKP/KKP3K berdasarkan 2 (dua) kriteria dasar yaitu; (1) Kriteria Ekologis; Kriteria ini menunjukkan bahwa antara KKP/KKP3K satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dalam hal ekologis (*Ecoregion*), keterkaitan (*network*) ini berupa secara fisik dan biologis. (2) Kriteria Pengelolaan; Kriteria ini menunjukkan bahwa antara KKP/KKP3K satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dalam hal pengelolaan. Bentuk jejaring pengelolaan berupa sistem pengelolaan bersama terhadap KKP/KKP3K tersebut.

Dalam pengelolaan KKP/KKP3K secara bersama beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu: Keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan bersama KKP/KKP3K sangat penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan yang baik. Masing-masing *stakeholders* mempunyai peran dan tugas dalam pengelolaan tersebut. Selain itu, dalam upaya pengelolaan KKP/KKP3K diperlukan suatu lembaga/ badan/ dinas pengelola yang akan menyusun program dan kegiatan kerja, pengusulan anggaran, pengelolaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, penyelesaian permasalahan dan penyampaian informasi. Selain itu tugasnya adalah melibatkan berbagai *stakeholders* lain dalam pengelolaan KKP/KKP3K. Guna pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, pendanaan kawasan konservasi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan, oleh karena itu berbagai mekanisme pendanaan yang ada dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang dilakukan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Perairan guna mewujudkan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Laut yang mampu Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Hayati Laut agar Fungsinya Lestari dan Manfaatnya Berkelanjutan. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan laut tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga bersifat memayungi berbagai kegiatan pengelolaan pada ekosistem-ekosistem penting oleh berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu penyusunan Strategi Utama Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Laut tersebut juga mengakomodasi isu-isu penting yang memiliki dampak secara internasional. Semua ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, terutama di daerah, memiliki ruang gerak yang luas untuk melakukan pengelolaan sesuai kekhasan ekosistem-ekosistem di daerahnya dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional maupun internasional. Strategi nasional dan rencana aksi terdiri dari sepuluh kelompok strategi, antara lain: (1) Pembangunan dan Pengembangan Pangkalan Data Mutakhir; (2) Peningkatan Peran *Stakeholders*; (3)



# 03

## Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan Kebijakan, Hukum, dan Peningkatan Pentaatannya; (4) Penguatan Kelembagaan; (5) Pendidikan dan Peningkatan Kepedulian Mengenai KKP; (6) Peningkatan Kerjasama dan Jaringan Internasional; (7) Pembiayaan Pengelolaan KKP; (8) Pemanfaatan Secara Arif dan Bijaksana; (9) Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem; dan (10) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Sepuluh strategi ini telah dijabarkan dalam program aksi dan kegiatan, termasuk tolok ukur untuk menilai keberhasilan penerapannya. Tidak berhenti di sini, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang merampungkan Peraturan Menteri tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan tersebut untuk memperjelas arah mandat pengelolaan jejaring KKP/KKP3K di Indonesia.

Membangun jejaring pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prakteknya bukan merupakan hal yang sederhana, perlu komitmen dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkannya. Upaya kerjasama dan jejaring pengelolaan KKP/KKP3K terus menerus dilakukan untuk menumbuhkan pengelolaan efektif di kawasan kawasan konservasi baik yang dilakukan secara lokal, nasional, regional maupun internasional, misalnya: pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang yang diinisiasi Coremap II (mengintegrasikan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) tingkat desa dalam sebuah pengelolaan KKP/KKP3K-D di kabupaten). Contoh lainnya adalah: pengelolaan KKP/KKP3K di Raja Ampat, inisiasi pengelolaan di ekoregion sunda kecil, inisiasi pengelolaan *seascape* Kepala Burung, kerjasama pengelolaan di ekoregion laut Bismark Solomon (BSSE), kerjasama pengelolaan KKP/KKP3K di wilayah *Sulu Sulawesi Marine Eco-region* (SSME), dan juga inisiasi kerjasama lintas negara dalam pengelolaan di segitiga karang yang dilakukan oleh 6 negara, yaitu CTI-CFF, *Coral Triangle initiative for coral reef, fisheries and food security*. Melalui berbagai upaya kerjasama dan jejaring pengelolaan yang dijalin tersebut, semoga upaya mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat pada akhirnya dapat terwujud.

**PENGLOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI ALAT PENGLOLAAN PERIKANAN** - Naskah kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan jelas menyebutkan tentang status perikanan tangkap Indonesia. Dalam kondisi stok perikanan tangkap yang sudah menipis dan hampir kolaps, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia, maka usaha terus-menerus untuk mengembangkan perikanan tangkap secara tidak terkontrol dan tidak terkelola secara baik jelas merupakan kebijakan yang kurang tepat. Sebagai gantinya, kita memerlukan suatu kebijakan yang betul-betul segar untuk memulihkan stok sumberdaya perikanan (Mous et al 2005). Naskah kebijakan tersebut menyarankan untuk 'menciptakan, membangun, dan meningkatkan kesadaran dalam usaha untuk merubah persepsi dan pemikiran masyarakat bahwa sumberdaya laut kita, terutama perikanan, tidak akan pernah habis' (PCI, 2001a). Terkait dengan hal ini, rencana investasi perikanan tangkap di perairan Indonesia Bagian Timur, serta rencana lainnya tentang intensifikasi usaha perikanan tangkap sebaiknya dipertimbangkan kembali secara cermat.

Alternatif pengelolaan perikanan yang banyak diterapkan akhir-akhir ini sebagian besar adalah pengelolaan berbasis ekosistem melalui pembentukan suatu jejaring Kawasan Konservasi Perairan (Gell & Roberts, 2002; National Research Council, 2001; Roberts & Hawkins, 2000; Ward, Heinemann & Evans, 2001). Sebagai sarana pengelolaan perikanan, kawasan konservasi laut memiliki dua fungsi: (1) Limpahan ikan komoditi pasar dari wilayah perlindungan ke dalam wilayah penangkapan. (2) Ekspor telur dan larva ikan dari wilayah perlindungan ke wilayah penangkapan yang dapat meningkatkan kuantitas penangkapan di wilayah penangkapan. Selain itu,

sebagai sarana pengelolaan, kawasan konservasi perairan laut memberikan manfaat tidak langsung berikut: (1) melindungi habitat yang sangat penting bagi perkembangbiakan jenis ikan komersial, dan (2) memberikan tempat berlindung ikan yang tidak dapat diberikan oleh sarana pengelolaan lainnya sehingga dapat mencegah penurunan secara drastis persediaan ikan komersial.

**PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERIKANAN BERKELANJUTAN** - Kawasan konservasi perairan yang terlindungi dengan baik, secara ekologis akan mengakibatkan beberapa hal terkait dengan perikanan: (1) habitat yang lebih cocok dan tidak terganggu untuk pemijahan induk; (2) meningkatnya jumlah stok induk; (3) ukuran (*body size*) dari stok induk yang lebih besar; dan (4) larva dan recruit hasil reproduksi lebih banyak. Sebagai akibatnya, terjadi kepastian dan keberhasilan pemijahan pada wilayah kawasan konservasi. Keberhasilan pemijahan di dalam wilayah kawasan konservasi perairan dibuktikan memberikan dampak langsung pada perbaikan stok sumberdaya perikanan di luar wilayah kawasan konservasi laut (Gell & Robert, 2002; PISCO, 2002).

Peran Kawasan Konservasi perairan adalah melalui ekspor telur dan larva ke luar wilayah KKP/KKP3K yang menjadi wilayah *Fishing Ground* nelayan; kelompok recruit; maupun penambahan stok yang siap ambil di dalam wilayah penangkapan. Indikator keberhasilan yang bisa dilihat adalah peningkatan hasil tangkapan nelayan di luar kawasan konservasi setelah beberapa saat setelah dilakukan penerapan KKP/KKP3K secara konsisten. Seberapa jauh efektivitas Kawasan Konservasi Perairan mampu memenuhi fungsi (peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya, model, bentuk maupun posisi/letak wilayahnya, khususnya ukuran zona/wilayah yang dijadikan perlindungan (*no take area*) dibandingkan dengan zona pemanfaatan (penangkapan).

Seberapa jauh efektivitas kawasan konservasi laut dapat memenuhi keempat fungsi (peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya maupun bentuk dan posisinya, khususnya ukuran wilayah yang dilindungi bila dibandingkan dengan wilayah penangkapan. Ukuran *no take area* yang direkomendasikan adalah 30% dari habitat penting yang dikonservasi.

Terdapat dua bukti dampak kawasan konservasi perairan. Pertama, terdapat bukti yang kuat bahwa zona inti/larangan penangkapan (perlindungan) memiliki persediaan ikan yang lebih besar, ukuran ikan yang lebih besar serta komposisi spesies yang lebih beragam (spesies ikan komersial berukuran lebih besar) bila dibandingkan dengan zona pemanfaatan/wilayah penangkapan. Di dalam ulasannya tentang dampak wilayah perlindungan, Roberts & Hawkins (2000) memberi contoh dari 30 kajian yang dilaksanakan pada era 90-an yang mencatat satu atau lebih dari dampak tersebut. Dengan demikian, dampak pada populasi ikan terkait dengan perubahan yang terjadi pada bagian lain dari ekosistem. Misalnya, Babcock et al (1999) (dalam Roberts & Hawkins 2000) melaporkan penurunan 3 kali lipat populasi bulu babi di dalam wilayah perlindungan, sementara itu populasi tersebut meningkat hampir tiga kali lipat di luar wilayah perlindungan. Berdasarkan bukti-bukti tentang dampak wilayah perlindungan laut tersebut, tidak diragukan lagi bahwa wilayah ini memberikan pasokan telur dan anak ikan untuk wilayah penangkapan sekitarnya. Selain itu, catatan perubahan populasi ikan menunjukkan bahwa wilayah perlindungan berfungsi sebagai tempat



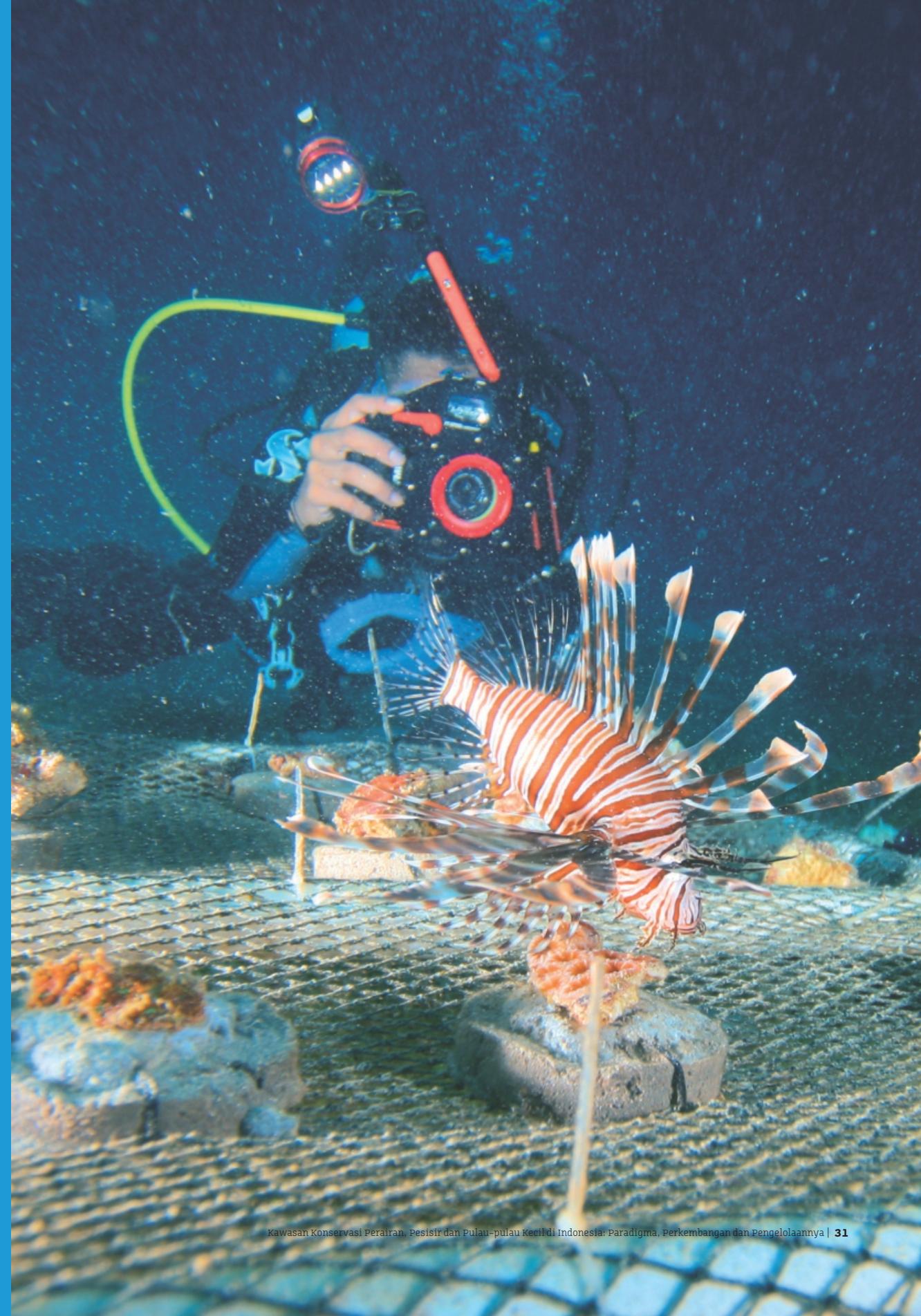
berlindung ikan. Namun dampak langsung manfaat perikanan jauh lebih sulit untuk dibuktikan di lapangan dan oleh karenanya dari berbagai kajian yang telah dilaksanakan, banyak yang menggunakan model matematis alih-alih observasi lapangan untuk mengkuantifikasi manfaat perikanan. Sebagian besar model menunjukkan bahwa perikanan benar-benar dapat memperoleh manfaat dari kawasan konservasi laut, dan model tersebut juga menunjukkan bahwa penangkapan yang berkelanjutan dapat dimaksimalkan jika kurang lebih 30% habitat sepenuhnya dilindungi dari kegiatan penangkapan (Roberts & Hawkins 2000). Selain itu, Roberts & Hawkins (2000) menyatakan bahwa seringkali kecenderungan nelayan untuk memfokuskan kegiatan penangkapan di dekat wilayah perlindungan ('fishing the line') menunjukkan bukti manfaat dari kawasan konservasi bagi perikanan komersial.

**PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PARIWISATA BAHARI** - Selain bagi perikanan, kawasan konservasi perairan juga memberikan sumbangan penting di dalam pengelolaan dan pengembangan wisata alam (eko-wisata), antara lain dalam hal perlindungan secara lebih baik terhadap habitat dan ikan (jenis tertentu) membuat wilayah tersebut semakin menarik sebagai tujuan ekowisata. Status kawasan konservasi perairan dan publikasi yang dihasilkan biasanya juga akan meningkatkan profil suatu wilayah sebagai tujuan ekowisata. Selanjutnya, melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan, dampak negatif kegiatan pariwisata dapat dikendalikan. Di sisi lain, pariwisata sering diharapkan mampu menutup pembiayaan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan lainnya.

**NILAI PENTING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR** - Nilai penting kawasan konservasi bagi kepentingan ekonomi, khususnya dalam pembangunan perikanan, telah dilakukan berbagai penelitian di beberapa Negara, antara lain: Peningkatan produksi telur di dalam kawasan konservasi laut hingga 10 kali lipat, Kelimpahan jumlah ikan di dalam kawasan konservasi laut hingga 2 sampai 9 kali lipat, Peningkatan ukuran rata-rata ikan di dalam kawasan konservasi laut antara 33 – 300 %, Peningkatan keanekaragaman species di dalam kawasan konservasi laut antara 30 – 50 %, dan Peningkatan hasil tangkapan ikan di luar cagar alam antara 40 – 90 % (Sumarja, 2002).

Secara tidak langsung, kawasan konservasi perairan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian setempat dengan cara membuat wilayah tersebut menarik sebagai tujuan ekowisata. Misalnya, di Taman Nasional Wakatobi, *Operation Wallacea* menawarkan kombinasi riset dan wisata bawah air, yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian masyarakat di pulau Hoga. Di Raja Ampat, setiap turis yang akan melakukan wisata selam diwajibkan membayar kepada pemerintah daerah, dan pendapatan ekstra ini mendorong pemerintah daerah untuk membentuk jaringan Wilayah Perlindungan Laut yang dapat menjaga kelestarian terumbu karang di Raja Ampat. Banyak pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang berpandangan bahwa pembentukan Wilayah Perlindungan Laut sebagai langkah awal pengembangan ekowisata.

Biaya penetapan dan pengelolaan KKP/KKP3K cukup tinggi, namun manfaat yang didapatkan ternyata jauh lebih tinggi. Sebuah jejaring KKP global dengan ukuran 20-30% dari luas laut dunia diperkirakan memerlukan biaya \$5-19 miliar per tahun, namun akan menghasilkan tangkapan ikan yang keberlanjutan senilai \$70-80 miliar setiap





tahunnya. Jejaring KKP/KKP3K tersebut juga diperkirakan memberikan jasa ekosistem setara \$ 4,5 – 6,7 juta setiap tahun (Balmford et al. 2004). Total biaya yang dibutuhkan untuk membuat dan mengelola jejaring KKP/KKP3K ternyata lebih rendah dibandingkan dengan pembelanjaan subsidi terhadap industri perikanan yang kita ketahui tidak berkelanjutan, yaitu \$15–30 miliar per tahun (Balmford et al. 2004). Tingginya biaya pengelolaan KKP, namun sepadan dengan tingginya manfaat yang diperoleh, merupakan justifikasi kuat untuk segera merumuskan mekanisme dan implementasi secara konsisten dari suatu sistem pendanaan pengelolaan KKP/KKP3K yang berkelanjutan. ‘*Users pay principles*’ perlu diterapkan secara proporsional, adil dan transparan dalam skema pendanaan tersebut.

**OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI PERLINDUNGAN EKOSISTEM** – Sistem zonasi Kawasan Konservasi Perairan diantaranya terdapat Zona inti, merupakan bagian KKP/KKP3K yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan dengan tetap mempertahankan perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti dipilih karena memiliki berbagai kelebihan terutama dalam perlindungan habitat seperti daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan; habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik; serta mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.30/MEN/2010, maka luas zona inti KKP/KKP3K ditentukan minimal 2% dari luas kawasan.

Zona pemanfaatan adalah bagian KKP/KKP3K yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan. Lokasi yang dapat dipilih menjadi zona pemanfaatan tentunya harus

mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik; dan mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi; dan mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan wisata dengan tidak merusak ekosistem aslinya.

Perlindungan ekosistem kawasan konservasi diharmonisasikan dengan pemanfaatan ekonomi masyarakat pesisir sehingga tercipta pola pengelolaan yang mengedepankan prinsip keberpihakan terhadap ekonomi lokal yang mensejahterakan dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Aspek lingkungan dievaluasi efektivitasnya dengan E-KKP3K (metode evaluasi efektivitas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil) bersama dengan aspek-aspek pengelolaan yang lain, sebagai rekomendasi bagi pengelola dalam meningkatkan upaya pengelolaan menuju terciptanya kawasan konservasi perairan yang efektif, yaitu seimbang fungsi lingkungan dan manfaat ekonominya bagi masyarakat pesisir.

**OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Mendukung Kegiatan Perikanan Berkelanjutan Bagi Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir** – Paradigma baru pengelolaan KKP/KKP3K dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak saja berbicara tentang perlindungan dan pelestarian, tetapi menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan yang dapat dilakukan di dalam KKP/KKP3K meliputi pemanfaatan untuk perikanan tangkap dan budidaya, pemanfaatan wisata, pemanfaatan penelitian dan pengembangan, serta kegiatan ekonomi lainnya yang menunjang konservasi. Namun demikian pemanfaatan yang dilakukan dalam KKP/KKP3K ini bersifat terbatas dan harus mengutamakan kepentingan kelestarian sumberdaya, sehingga harus memperhatikan daya dukung kawasan.

Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan menyebutkan bahwa Zona Perikanan Berkelanjutan dalam Kawasan konservasi Perairan diperuntukkan bagi penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan. Selanjutnya kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan yang dimaksud meliputi: (a) alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan/atau pasif; dan (b) cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. Aturan ini jelas memihak kepada kepentingan perikanan masyarakat lokal, sehingga penguatan ekonomi dari sektor perikanan tangkap bagi masyarakat pesisir dapat ditingkatkan selain upaya penangkapan ikan yang dilakukan diluar kawasan konservasi

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam keputusan tersebut, di Indonesia terdapat 10 kelompok alat tangkap (API – Alat Penangkapan Ikan) yang dapat beroperasi di wilayah perairan. Mengacu pada kriteria alat tangkap di KKP/KKP3K, maka terdapat sekitar 21 alat tangkap dari enam kelompok API yang dapat beroperasi dalam KKP/KKP3K di zona perikanan berkelanjutan.

Secara prinsip maupun praktek dilapangan, dampak kawasan konservasi telah jelas dalam peningkatan hasil tangkapan masyarakat lokal. Hasil pengukuran efektivitas melalui E-KKP3K dapat menjadi indikator peningkatan ekonomi masyarakat pesisir,

bersumber dari hasil tangkapan ikan di wilayah tangkap nelayan yang merupakan limbah manfaat kawasan konservasi perairan. Dampak ini nyata dalam mendorong peningkatan pendapatan langsung masyarakat dan menggerakkan sektor ekonomi pendukung di wilayah pesisir.

**OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Mendukung Pariwisata Bahari dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir.** Terdapat hubungan timbal balik yang erat antara KKP/KKP3K dengan ekowisata bahari. Salah satu kriteria dalam pemilihan sebuah KKP/KKP3K adalah memiliki tingkat kealamiahannya yang tinggi, kondisi ekosistem yang masih baik dan unik, sehingga dapat menjadi daya tarik wisata. Kegiatan wisata dalam KKP/KKP3K harus memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan memperhatikan daya dukung kawasan. Sebaliknya, dengan ada kegaitan ekowisata bahari dalam KKP/KKP3K, maka dapat memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi kelancaran pengelolaan KKP/KKP3K itu sendiri. Beberapa manfaat kegiatan ekowisata bagi KKP/KKP3K adalah: a) adanya pemasukan (income) melalui tiket masuk dan biaya pemakaian sarana prasarana; biaya konsesi untuk sektor swasta seperti toko cenderamata, penyewaan perahu, warung makanan/restoran, dan tur; serta donasi dari pengunjung; b) Adanya lapangan pekerjaan, misalnya staf kawasan lindung; usaha yang langsung melayani wisatawan; pemandu wisata/interpretasi alam; dan lapangan pekerjaan tak-langsung (sektor layanan lain, konstruksi, pemasok, dll.); c) Media pendidikan lingkungan, melalui pemandu alam, pusat pengunjung, tanda atau marka di pantai. Hal ini secara langsung atau pun tidak langsung mendidik masyarakat dalam memelihara lingkungan, dan sebagai lokasi pembelajaran bagi pihak lain; d) Justifikasi politik bagi KKP/KKP3K, misalnya pemerintah akan lebih mendukung KKP/KKP3K bila sudah memberikan manfaat yang nyata – terutama pemasukan dan pekerjaan. KKP/KKP3K juga dapat dijadikan alat promosi baik di level lokal, nasional, dan internasional terkait komitmen pada kegiatan pelestarian lingkungan secara nyata.

Penilaian dampak pengelolaan wisata bahari terhadap fungsi lingkungan kawasan konservasi perairan diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan efektif kawasan konservasi, yang menjadi bagian penilaian dalam E-KKP3K. Manfaat langsung pariwisata bahari dapat menjadi sumber pendanaan jasa lingkungan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Peluang ini sangat nyata dan berpotensi menjadi penggerak ekonomi yang cukup efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

**OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Untuk Pendidikan dan Kepedulian Masyarakat** – Konservasi selalu bergantung kepada dukungan dari masyarakat lokal, kelompok-kelompok pemanfaat, dan lembaga pemerintahan, namun masyarakat tidak akan mendukung sesuatu hal yang mereka tidak pahami. Dalam merancang program pendidikan perlu perencanaan yang mendalam, khususnya pada KKP/KKP3K yang dibangun dengan tujuan khusus. Kerja sama bersama mitra-mitra, seperti sekolah, kelompok nelayan, dan pemerintah lokal, KKP/KKP3K dapat menjadi sarana yang merangsang kepedulian kepada lingkungan dan membangun kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya laut.

Kesadaran warga negara memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan



KKP/KKP3K. Negara-negara yang memiliki KKP/KKP3K efektif biasanya memiliki warga negara yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap konservasi. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bertujuan untuk memberi informasi kepada pendukung dan menanamkan etika serta tata nilai konservasi sehingga anggota masyarakat dapat membuat keputusan tepat yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Adanya program monitoring yang mengukur perubahan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan juga perubahan perilaku yang terkait dengan isu KKP/KKP3K akan menjadi umpan balik yang berharga untuk menentukan strategi kampanye yang lebih efektif, dibanding dengan strategi yang lainnya.

Pendidikan adalah faktor kunci yang mendukung keberhasilan kegiatan konservasi dan pengelolaan KKP/KKP3K. Pendidikan dapat diberikan kepada semua tingkatan dan kepada semua kelompok, termasuk kelompok masyarakat lokal, penyelenggara wisata berikut stafnya, wisatawan dalam KKP/KKP3K, dan staf pengelola KKP/KKP3K itu sendiri. Materi pendidikan dan peralatan promosi sangat penting di dalam meningkatkan kesadaran tentang isu KKP/KKP3K, yang akan mendidik masyarakat lokal agar mereka dapat melakukan advokasi terhadap kekayaan alam mereka, dan juga untuk mendorong perilaku positif dari semua pihak terkait yang nantinya akan memberikan efek positif kepada KKP/KKP3K tersebut.

Dampak positif fungsi pendidikan dan penelitian dalam kawasan konservasi menjadi bagian utuh dalam pengelolaan yang dapat diukur efektifitasnya dengan Metode E-KKP3K. Hasil Penelitian yang dilakukan menjadi rekomendasi bagi pengelola untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

## BOX. 01

### Mengenal Potensi Kawasan Konservasi Perairan Nasional



**Nama Kawasan:**

Taman Nasional Perairan Laut Sawu (TNP Laut Sawu)

**Dasar Hukum:**

Dasar Hukum Pencadangan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Luas Kawasan:**

Kawasan Konservasi ini memiliki luas sekitar 3.500.000 Hektar.

**Letak Geografis dan Administratif:**

Kawasan ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota

**Keanekaragaman Hayati:**

Hasil pengamatan Kahn (2005) terhadap paus sepanjang tahun 2001-2005 di perairan Pulau Solor dan Pulau Alor, mengungkapkan bahwa beberapa jenis paus telah "menetap" di Laut Sawu, antara lain: paus sperma (*sperm whale*), paus pembunuh kerdil (*pigmy killer whale*), paus kepala semangka (*melon headed whale*), lumba-lumba paruh panjang (*spinner dolphin*), lumba-lumba totol (pan-tropical spotted dolphin), lumba-lumba gigi kasar (*rough-toothed dolphin*), lumba-lumba abu-abu (*risso's dolphin*), dan lumba-lumba Fraser (*Fraser's dolphin*). Khan juga mengungkapkan bahwa paus tersebut meskipun bermigrasi namun tetap kembali ke Laut Sawu dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Laut Sawu merupakan habitat paus. Biota peruaya lainnya seperti penyu juga mendiami beberapa pulau sekitar Laut Sawu. Hal ini terlihat pada saat survei, kulit penyu dan cangkang telurnya banyak ditemukan di Pulau Batek. Beberapa jenis penyu, seperti penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan penyu belimbing (*Demochelys coriacea*). Selain itu, Petsæde (2002) menemukan 14 spesies setasea, diantaranya yaitu blue whale (*Balaenoptera musculus*), pygmy killer whale (*Peresca attenuate*), short-finned pilot whale (*Globicephala macrohynchus*), risso's dolphin (*Grampus griseus*), sperm whale (*Physeter macrocephalus*), pantropical spotted dolphin (*Stenella attenuate*), spinner dolphin (*Stenella longirostris*), rough-toothed dolphin (*Stenobredanensis*), dan bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*).



# Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas

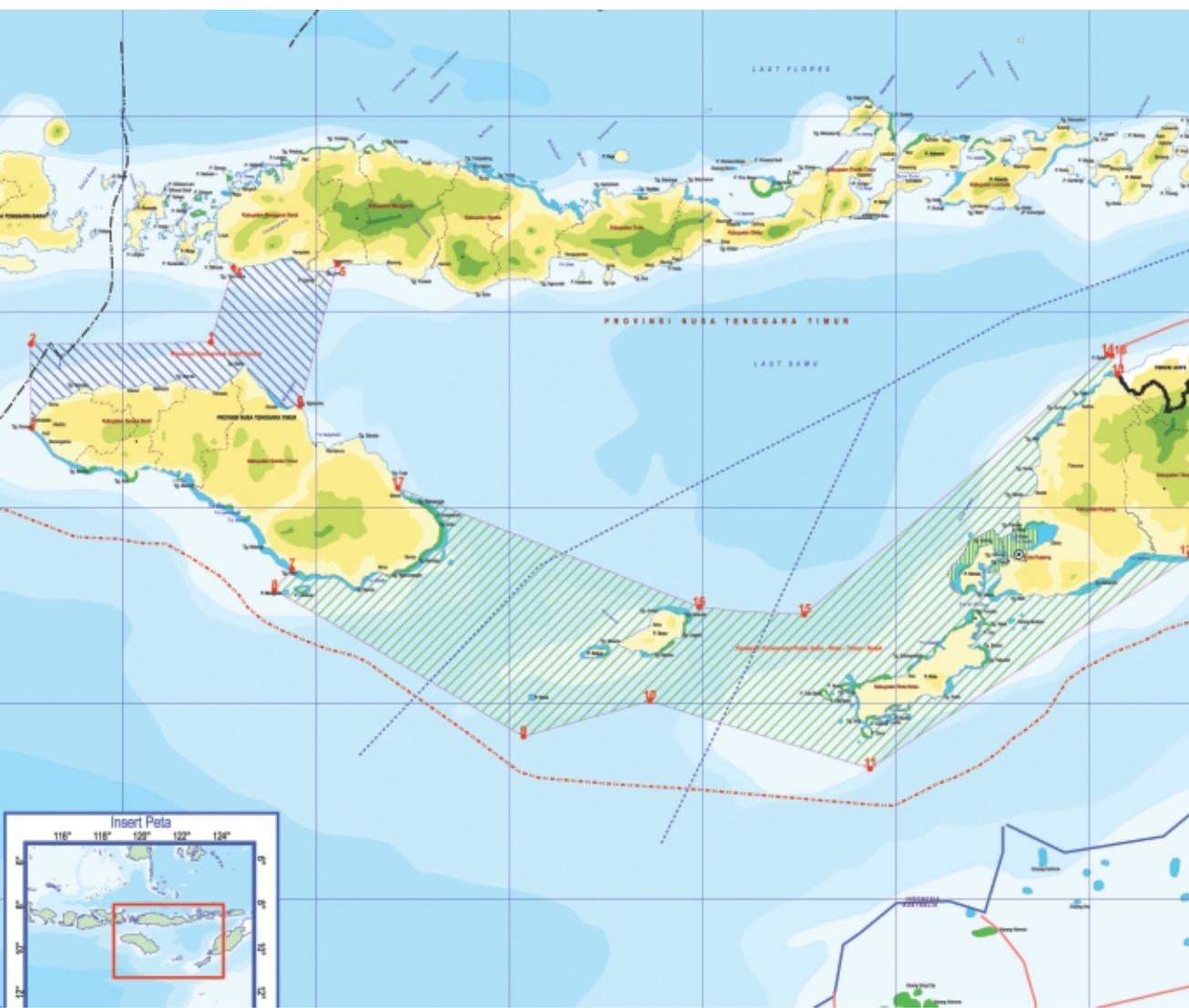
## Potensi Pariwisata:

Kendati pembentukan Taman Nasional Perairan tidak fokus pada pemanfaatan pariwisata, namun kawasan TNP Laut Sawu tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Adapun pariwisata yang bisa dikembangkan meliputi pariwisata bahari maupun pariwisata budaya belum optimal dimanfaatkan. Potensi terumbu karang yang besar terbentang hampir di sepanjang pantai Utara Pulau Flores sampai Pulau Alor dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata bahari. Beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai obyek wisata bahari antara lain kawasan-kawasan Pulau Komodo, Riung, Maumere, Pulau Rote, Pulau Alor, perburuan ikan pastradisional di Lembata dan Solor.

## Aksesibilitas:

Untuk menuju kawasan konservasi perairan Laut Sawu, dari Jakarta kita harus melalui Kota Kupang melalui Jalur udara kemudian dilanjutkan dengan moda transportasi laut.

## Peta Kawasan



## Nama Kawasan

Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya.

## Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau.

## Luas

Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan Anambas memiliki luas sekitar 1.252.686,2 Ha.

## Lokasi Kawasan

KKPN Anambas terletak di Kabupaten Kep. Anambas dan secara umum dibagi dalam 2 (dua) area. Lihat rincian koordinat.

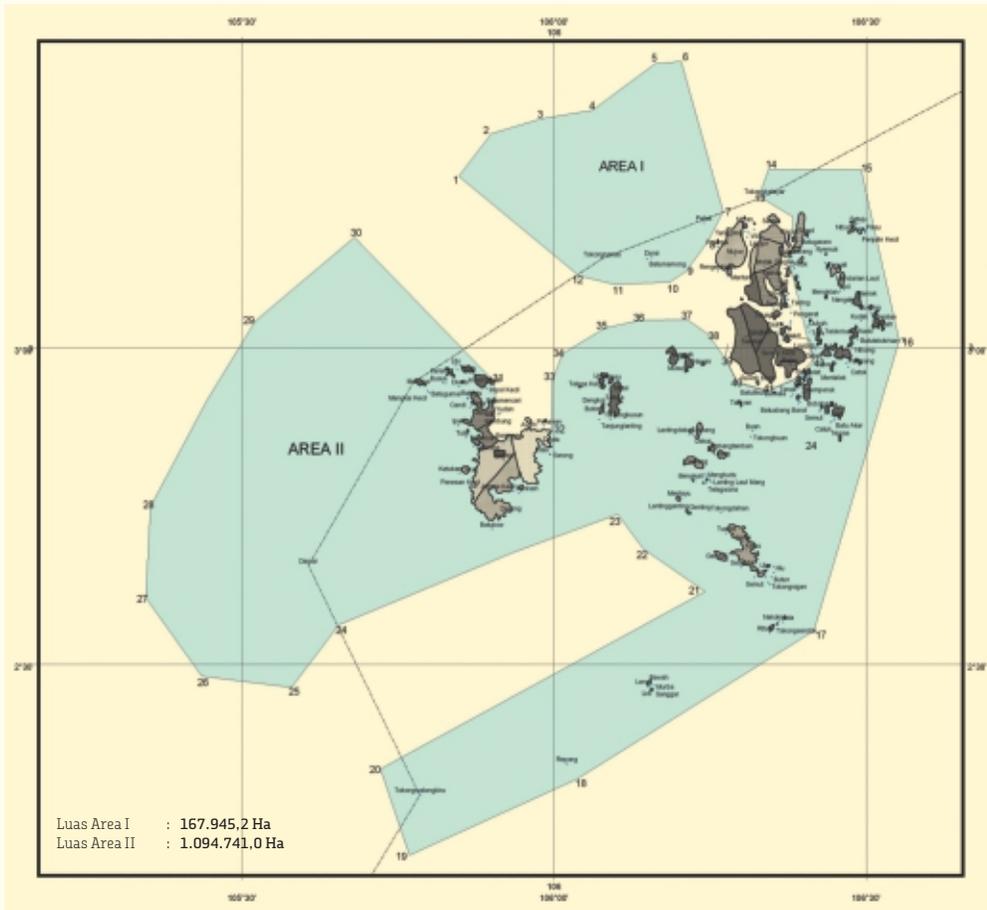
## Potensi Keanekaragaman Hayati

Hasil *Marine Rapid Assesment (MRAP)* Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama stakeholder pada Bulan Mei Tahun 2012 menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi total 667 spesies ikan karang yang terdiri dari 256 genus dan 71 famili. Wilayah yang memiliki tingkat diversitas tertinggi adalah Pulau Bawah (240 spesies), Pulau Selai (215 spesies), Pulau Piantai (199 spesies dan Pulau Pahat (198 spesies). Laporan MRAP ini juga menunjukkan temuan sejumlah spesies baru seperti *Paracheilinus sp.*, *Escenius sp.*, *Heteroconger sp.*, *Helcogramma s* dan *Myersina sp.* Menarik juga diketahui bahwa di KKPN ini terdapat Lumba-Lumba hidung Botol yang diduga menetap di sekitar kawasan Jemaja (utara dan selatan), Telaga, Telibang hingga Aerabu.

## Aksesibilitas

Akses dari dan ke Kepulauan Anambas sudah terbuka dengan baik menggunakan moda transportasi laut. Kapal "KM Bukit Raya" milik PELNI setiap minggu berlabuh di pelabuhan umum Terempa, Letung, dan Midai yang berada dalam kawasan Kepulauan Anambas. Kota-kota tersebut sudah mampu "berhubungan" ke hampir seluruh kota-kota besar dan penting di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Ranai (ibukota Kabupaten Natuna). Selain itu, saat ini Kepulauan Anambas juga sudah dapat dijangkau dengan menggunakan moda transportasi udara melalui rute reguler Tanjung Pinang – Matak Base (Anambas) dan Batam – Matak Base (Anambas). Jadwal penerbangan setiap hari dengan jadwal yang bergantian dari rute reguler yang tersedia, yaitu Tanjung Pinang – Anambas dan Batam – Anambas. Dalam kondisi tertentu, Kepulauan Anambas juga dapat dijangkau melalui penerbangan khusus (*extra flight*) yang digunakan oleh perusahaan penambangan minyak (*mining company*) yang beroperasi di sana, yaitu: *Conocophilips*, *Star Energy* dan *Premier Oil* dengan ketentuan khusus.





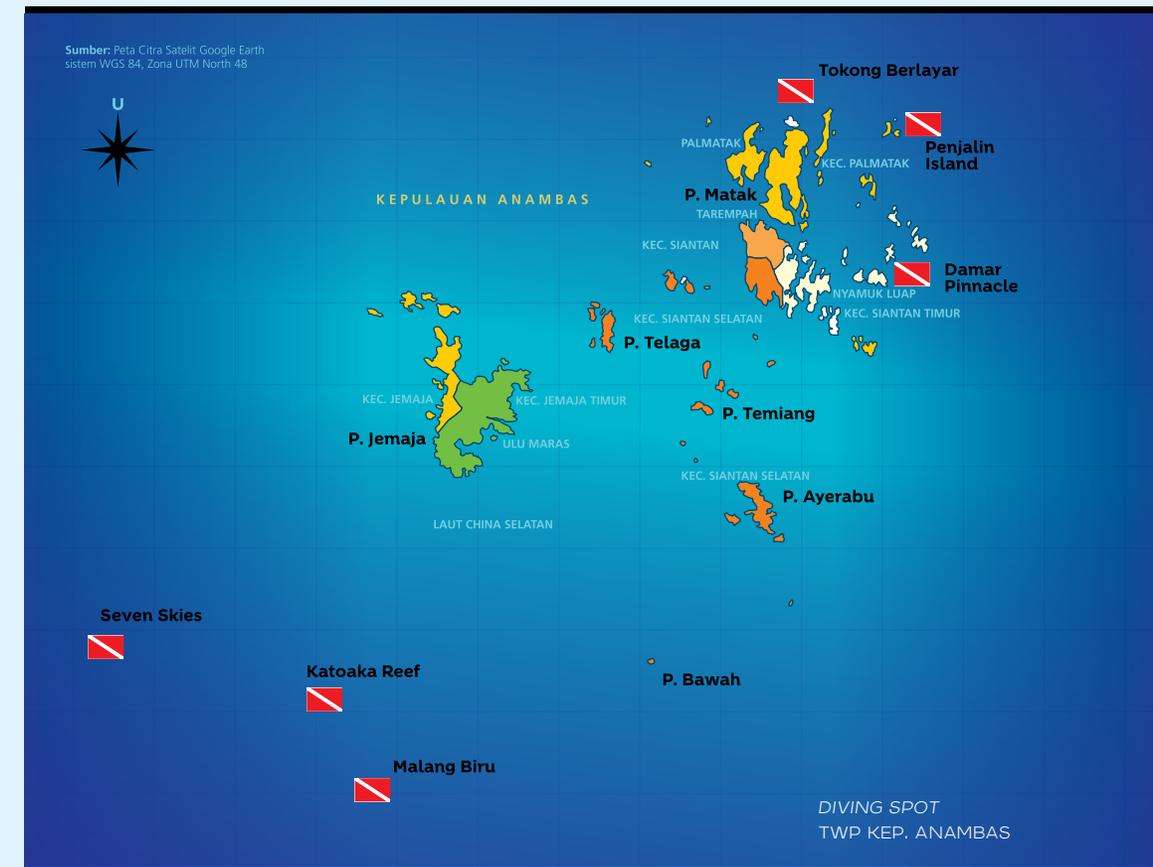
Area I:				
ID	X	Y	Y	
1	105° 40' 20.169" BT	3° 29' 17.447" LU	22 106° 1' 55.156" BT	2° 46' 18.945" LU
2	105° 44' 8.66" BT	3° 34' 16.605" LU	23 105° 58' 57.862" BT	2° 50' 23.216" LU
3	105° 49' 57.285" BT	3° 36' 0.25" LU	24 105° 26' 19.756" BT	2° 37' 42.824" LU
4	105° 56' 0.043" BT	3° 36' 56.784" LU	25 105° 20' 48.271" BT	2° 30' 18.197" LU
5	106° 3' 11.113" BT	3° 42' 17.142" LU	26 105° 10' 19.333" BT	2° 31' 45.353" LU
6	106° 6' 17.203" BT	3° 42' 33.631" LU	27 105° 3' 44.774" BT	2° 40' 43.602" LU
7	106° 11' 9.294" BT	3° 25' 17.178" LU	28 105° 4' 17.752" BT	2° 51' 14.896" LU
8	106° 9' 19.76" BT	3° 21' 32.221" LU	29 105° 16' 26.802" BT	3° 12' 32.794" LU
9	106° 6' 58.426" BT	3° 18' 26.131" LU	30 105° 28' 8.763" BT	3° 22' 19.332" LU
10	106° 5' 3.003" BT	3° 17' 3.685" LU	31 105° 44' 25.149" BT	3° 5' 39.391" LU
11	105° 58' 8.422" BT	3° 16' 54.263" LU	32 105° 51' 7.952" BT	3° 0' 2.544" LU
12	105° 54' 19.931" BT	3° 17' 53.153" LU	33 105° 51' 12.663" BT	3° 5' 44.102" LU
			34 105° 52' 28.041" BT	3° 8' 50.193" LU
			35 105° 57' 29.555" BT	3° 11' 51.572" LU
			36 106° 1' 41.601" BT	3° 12' 41.039" LU
			37 106° 6' 58.426" BT	3° 12' 46.928" LU
			38 106° 9' 24.471" BT	3° 11' 7.994" LU
			39 106° 11' 29.317" BT	3° 8' 13.681" LU
			40 106° 12' 54.117" BT	3° 5' 33.502" LU
			41 106° 16' 16.697" BT	3° 4' 32.257" LU
			42 106° 19' 27.498" BT	3° 5' 57.058" LU
			43 106° 21' 46.477" BT	3° 7' 40.703" LU
			44 106° 18' 47.454" BT	3° 20' 30.976" LU
Area II:				
ID	X	Y	Y	
13	106° 15' 23.696" BT	3° 26' 58.468" LU		
14	106° 16' 32.008" BT	3° 30' 4.558" LU		
15	106° 27' 17.435" BT	3° 30' 4.558" LU		
16	106° 31' 43.979" BT	3° 10' 23.838" LU		
17	106° 21' 48.211" BT	2° 36' 58.967" LU		
18	105° 54' 7.154" BT	2° 19' 51.977" LU		
19	105° 34' 33.349" BT	2° 11' 4.781" LU		
20	105° 31' 11.923" BT	2° 21' 2.673" LU		
21	106° 9' 4.6" BT	2° 41' 27.396" LU		

### Potensi Pariwisata

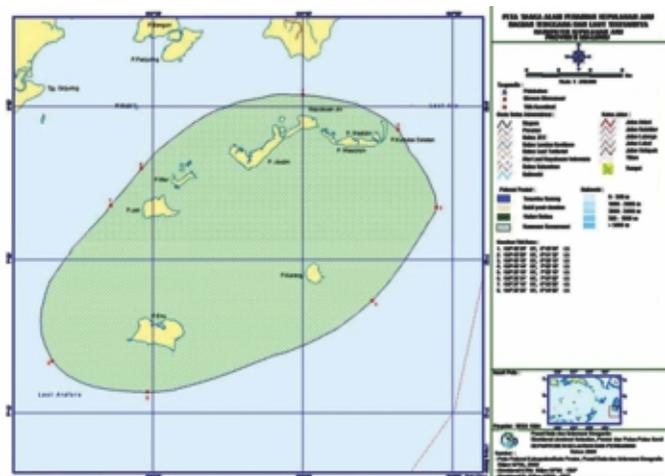
Pemandangan alam yang menawan berupa beberapa pulau berbukit yang rimbun. Perairan tenang yang berada di Kecamatan Siantan Timur sangat cocok untuk tempat bersantai sambil melakukan berbagai aktivitas bahari seperti snorkeling, renang dan bersampan atau sekedar berjemur dipantainya yang berpasir putih dan halus.

Pulau Penjalin merupakan salah satu pulau terindah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di Kecamatan Palmatak. Pemandangan alamnya indah berhias pulau-pulau mungil disekitar perairannya. Pantainya berpasir putih dan lembut, sangat cocok untuk tempat berjemur dan melakukan bermacam aktifitas pantai lainnya. Perairannya tenang, berair biru dan dihiasi bermacam ornamen bebatuan bermacam bentuk dan ukiran. Sangat cocok sebagai tempat olahraga air seperti menyelam, snorkeling, renang maupun bersampan.

Gugusan Pulau Bawah terdiri dari empat gugusan pulau kecil lainnya dengan luas keseluruhan 99,739 Ha. Jarak tempuh dari Tarempa ke Pulau Bawah sekitar 7 jam bila menggunakan alat transportasi pompong (perahu bermotor), sementara bila menggunakan speed boat sekitar 4 jam. Berbagai eksotisme akan ditawarkan antara lain adalah *Diving*, *Snorkeling*, *Fishing*, *Swimming*, dan lain-lain.



# Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya



## Nama Kawasan

Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku

## Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.63/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku

## Luas

Luas Suaka Alam Perairan ini adalah sekitar 114.000 Ha.

## Letak

Perairan Laut Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

## Potensi Keanekaragaman Hayati

Suaka Alam Laut Perairan Aru Tenggara memiliki tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, baik di darat maupun di laut, dengan ciri khas khusus serta tinggi popu-lasinya. Salah satu, jenis potensial dan terancam punah adalah penyu. Pada kawasan tersebut khususnya Pulau Enu, merupakan habitat bagi penyu dari jenis *Chelonia mydas* (penyu hijau), *Natator depressus* (penyu pipih), *Lepidochelys olivacea* (penyu lekang) dan *Eretmochelys imbricata* (penyu sisik), disamping itu terdapat satwa lainnya seperti siput mutiara (*Pinctada maxima*) dan duyung (*Dugong dugong*). Jenis-jenis penyu dimaksud telah di lindungi oleh pemerintah agar menjamin keseimbangan di alam serta habitatnya, maka kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

## Aksesibilitas

Untuk mencapai kawasan ini memang penuh tantangan. Dari Ambon perjalanan harus di tempuh menggunakan pesawat atau kapal laut ke Tual, dilanjutkan dengan kapal Ferry selama 11 jam ke Dobo. Dari Dobo ke Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Aru Tenggara tidak selalu tersedia sarana transportasi umum. Untuk menuju daerah tersebut, harus menyewa ketinting, kapal motor kayu, *speed boat* 80PK milik perusahaan lokal atau *speed boat* milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Aru. Waktu tempuh dari Dobo ke kawasan cagar alam selama 14-18 jam dengan ketinting atau kapal motor kayu, sedangkan *speed boat* 80PK memerlukan 6-9 jam. Sebenarnya, ada juga angkutan laut reguler (kapal perintis) yang melayani rute Dobo ke desa-desa sekitar kawasan cagar alam yang berlabuh di Desa Batu Goyang (salah satu desa di Pulau Trangan), namun jadwalnya satu bulan sekali dan belum terlalu efektif sehingga masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat.

## Potensi Pariwisata

Meskipun tidak secara spesifik ditujukan bagi pengelolaan pariwisata, namun kawasan konservasi ini memiliki sejumlah potensi sumberdaya alam hayati bagi pemanfaatan wisata bahari seperti pemandangan alam, *dive spot* dan sebagainya.

## Nama Kawasan

Suaka Alam Perairan Raja Ampat dan laut di sekitarnya Provinsi Papua Barat.

## Dasar Hukum

Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKPN) pada tanggal 3 September 2009 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: Kep.64/Men/2009 dengan tipe kawasan Suaka Alam Perairan (SAP).

## Luas Kawasan

Kawasan Suaka Alam Perairan KKPN Raja Ampat dan laut sekitarnya memiliki luas sekitar 60.000 Ha.

## Lokasi Kawasan

Secara geografis, kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya terletak pada 0°14'18"BT - 0°25'29"LS dan 130°18'32" - 130°10'29"BT. Sementara secara administratif, wilayah ini masuk ke dalam Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Kawasan Suaka Alam Perairan Raja Ampat dan laut sekitarnya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Waigeo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan Kepulauan Fam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perairan Pulau Gam; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan perairan Pulau Batangpele dan Pulau Maijafun.

## Keanekaragaman Hayati

Penetapan Raja Ampat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) karena memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang tinggi, berupa terumbu karang, mangrove, litoral dan rumput laut. Wilayah ini disebut juga sebagai "jantung" terumbu karang dunia yang dikenal sebagai *The Coral Triangle* (Segitiga Karang). Kepulauan Raja Ampat memiliki fauna karang terkaya di dunia, yaitu sedikitnya 1.074 spesies dan merupakan areal pembesaran sebagian besar jenis penyu yang terancam punah. Terdapat 537 jenis karang keras, dimana 9 diantaranya merupakan jenis baru dan 13 jenis endemik. Jumlah ini merupakan 75% karang dunia (CI, TNC-WWF). Di wilayah ini terdapat sekitar 899 jenis ikan karang, sementara di seluruh wilayah Raja Ampat tercatat 1104 jenis ikan, dimana terdiri dari 91 famili. Diperkirakan terdapat 1346 jenis ikan di seluruh kawasan Raja Ampat, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan dengan kekayaan jenis ikan karang tertinggi di dunia.

Selain itu, di kawasan ini juga ditemukan 699 jenis hewan lunak (jenis *mollusca*) yang terdiri atas 530 siput-siputan (*gastropoda*), 159 kekerangan (*bivalva*), 2 *scaphoda*, 5 cumi-cumian (*cephalopoda*), dan 3 chiton.

## Aksesibilitas

Sebagai daerah kepulauan yang memiliki 610 pulau, perangkat transportasi yang menunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat adalah angkutan laut. Untuk menjangkau ibu kota Raja Ampat (Waisai), pengunjung harus lebih dulu menuju

*Sedikitnya telah ditemukan 1346 jenis ikan di seluruh kawasan Raja Ampat, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan dengan kekayaan jenis ikan karang tertinggi di dunia.*



**Di Waigeo Timur terdapat atraksi “hantu laut” setiap akhir tahun, yaitu cahaya yang keluar dari laut dan berputar-putar di permukaan sekitar 10-18 menit.**

Kota Sorong dengan pesawat. Setelah itu, dari Sorong perjalanan ke Waisai dilanjutkan dengan moda transportasi laut. Sarana yang tersedia adalah kapal cepat dan juga tersedia kapal laut reguler setiap hari. Waisai dapat juga dijangkau dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Dari Waisai menuju SAP Raja Ampat dapat ditempuh dengan *speed boat* kira-kira 1,5 jam. Raja Ampat bisa dicapai dari Jakarta dengan penerbangan ke Sorong selama 6 jam melalui Manado. Beberapa maskapai penerbangan yang melayani rute ini adalah Silk Air, Garuda Indonesia, Pelita Air dan Merpati.

**Potensi Pariwisata**

Raja Ampat mengandalkan wisata bahari sebagai tulang punggung sektor pariwisata. Keanekaragaman hayati yang tinggi dan pemandangan alam yang luar biasa menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat. Para wisatawan biasanya mendiami *resort* di Waigeo Selatan (Pulau Mansuar) namun sebagian besar tinggal di atas kapal (*liveaboard*) dengan lama tinggal 10 sampai 21 hari.

Wisatawan asing banyak yang tinggal di atas kapal karena mereka mengikuti paket kunjungan yang disediakan perusahaan penyedia jasa pariwisata. Musim kunjungan wisatawan *liveaboard* ke Raja Ampat adalah mulai dari bulan September sampai bulan Mei setiap tahunnya. *Liveaboard* yang beroperasi di Raja Ampat berjumlah 18 kapal dan yang sudah resmi terdaftar/melapor kepada Dinas Pariwisata sebanyak 10 kapal. Hampir semua perusahaan/operator *liveaboard* ini berbasis di luar Sorong dan Raja Ampat.

Sejumlah potensi wisata lain yang juga dapat dikembangkan di Raja Ampat antara lain tersebar di beberapa kawasan;

**(1) Kepulauan Ayau**

Kepulauan ini terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang berada di atas kawasan atol yang sangat luas. Pantai-pantai di kepulauan ini berpasir putih dengan areal dasar laut yang luas yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Di kepulauan ini terdapat pulau-pulau pasir yang unik, masyarakat setempat menyebutnya *zondploot*, dan di atasnya tidak terdapat tumbuhan/vegetasi. Jenis wisata yang dapat dikembangkan di Kepulauan Ayau adalah keunikan kehidupan suku dan budaya yang berupa penangkapan cacing laut (*insonem*) yang dilakukan secara bersama-sama oleh ibu-ibu dan anak-anak, mengunjungi tempat peneluran penyuh hijau, dan wisata dayung tradisional dengan perahu karures.

**(2) Waigeo Utara**

Di Waigeo Utara terdapat beberapa tempat yang dapat dijadikan lokasi wisata yaitu goa-goa peninggalan perang dunia II dan keindahan bawah laut.

**(3) Waigeo Timur**

Khususnya di depan kampung Urbinasopen dan Yesner terdapat atraksi fenomena alam yang sangat menarik dan unik yang hanya bisa disaksikan setiap akhir tahun, yaitu cahaya yang keluar dari laut dan berputar-putar di permukaan sekitar 10-18 menit, setelah itu hilang dan bisa disaksikan lagi saat pergantian tahun berikutnya. Masyarakat di kedua kampung menamakan fenomena ini sebagai “hantulaut”.

**(4) Teluk Mayalibit**

Lokasi wisata teluk Mayalibit cukup unik, karena merupakan sebuah teluk yang cukup besar dan hampir membagi Pulau Waigeo menjadi dua bagian. Banyak atraksi yang bisa dilihat disini, seperti cara penangkapan ikan tradisional dan bangkai kerangka pesawat yang bisa dijadikan sebagai tempat penyelaman.

**(5) Salawati**

Di salawati para wisatawan dapat menyaksikan bunker-bunker peninggalan perang dunia II buatan Belanda dan Jepang (Jeffman) dan juga merupakan tempat yang menarik untuk *snorkling* dan *diving*.

Menurut data Bappeda Raja Ampat tahun 2009, sedikitnya terdapat 13 penginapan yang beroperasi untuk mendukung pariwisata baik berupa hotel, *cottage*, *resort* maupun wisma.



Suaka Alam Perairan

# Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya



## Nama Kawasan

Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut di sekitarnya Provinsi Papua Barat.

## Dasar Hukum

Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut di sekitarnya ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKPN) pada tanggal 3 September 2009 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.65/Men/2009 dengan tipe kawasan Suaka Alam Perairan (SAP).

## Luas Kawasan

Kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut sekitarnya memiliki luas sekitar 271.630 Ha.

## Letak Geografis

Secara geografis, kawasan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan laut di sekitarnya terletak pada 0°24'29"BT - 0°14'22"LS dan 129°50'25" - 129°40'32"BT. Sementara secara administratif, wilayah ini masuk ke dalam Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

## Keanekaragaman Hayati

Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Sejumlah fauna dapat dijumpai seperti ketam kenari, (*Birgus latro*), Soa-soa (*Hydrosaurus amboinensis*), burung elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), dara laut kepala putih (*Anour minibus*), nuri merah kepala hitam (*Lorius lory*) dan burung raja udang (*halcyon sp*). Jenis ikan hias diantaranya jenis kupu-kupu (*Chaetodon spp*), sersan mayor (*Abudefduf spp*) dan ikan badut (*Amphiprion sp*), kepe-kepe (*Pamacentrus spp*) dan mujair laut (*Dascyllus spp*). Terdapat 537 jenis karang keras, dimana 9 diantaranya merupakan jenis baru dan 13 jenis endemik. Jumlah ini merupakan 75% karang dunia (CI, TNC-WWF). Berdasarkan indeks kondisi karang di Kepulauan Raja Ampat, 60% dalam kondisi baik dan sangat baik. Jenis terumbu karang yang dijumpai seperti *Acropora sp* dan *porites*. Beberapa biota laut yang dilindungi terdapat di wilayah ini, seperti; Kima Sisik (*Tridacna squamosa*), Lola (*Trochus niloticus*), Kima Raksasa (*Tridacna maxima*), Kima Tapak Kuda (*Hippopus hippopus*), Akar Bahar (*Antiphatas sp*), Keong Terompet (*Charoniatritonis*)

Beberapa lokasi di kawasan ini merupakan tempat penyu bertelur dan tempat untuk mencari makan utamanya penyu hijau (*Chelonia mydas*) penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu belimbing (*Dermodochelys coriacea*) dan Duyung (*Dugong-dugong*).

## Aksesibilitas

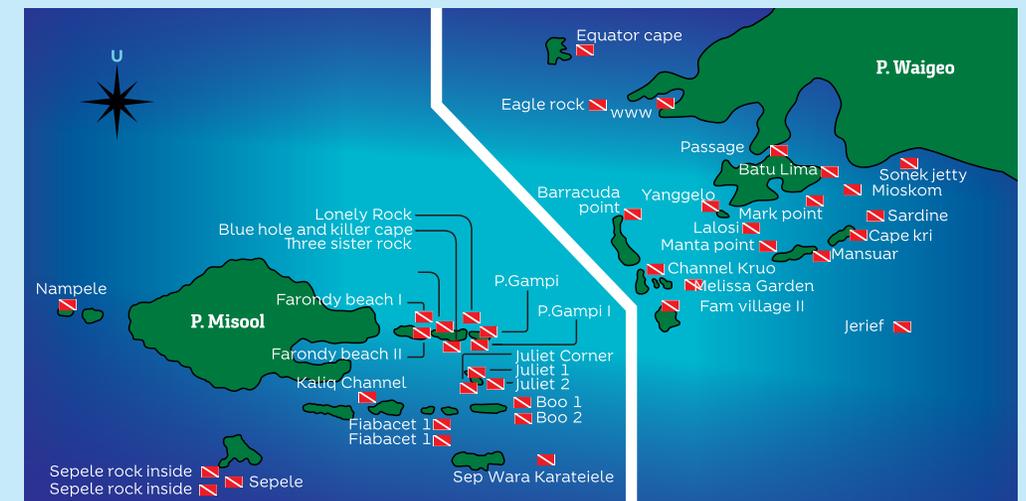
Sebagai daerah kepulauan yang memiliki 610 pulau, perangkat transportasi yang menunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat adalah angkutan laut. Untuk menjangkau ibu kota Raja Ampat (Waisai), pengunjung harus lebih dulu menuju Kota Sorong dengan pesawat. Setelah itu, dari Sorong perjalanan ke Waisai dilanjutkan dengan transportasi laut. Sarana yang tersedia adalah kapal cepat juga tersedia kapal laut reguler setiap hari. Waisai dapat juga dijangkau dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Dari Waisai menuju SAP Raja Ampat dapat ditempuh dengan speed boat kira-kira 1,5 jam.

Raja Ampat bisa dicapai dari Jakarta dengan penerbangan ke Sorong selama 6 jam melalui Manado. Beberapa maskapai penerbangan yang melayani rute ini adalah Silk Air, Garuda Indonesia, Pelita Air dan Merpati. Dari Waisai menuju Waigeo sebelah Barat (Kepulauan Panjang) / Waigang Sayang ditempuh dengan speed boat sekitar 2 jam.

## Potensi Pariwisata

Raja Ampat termasuk di Distrik Waigeo Barat mengandalkan wisata bahari sebagai tulang punggung sektor pariwisata. Keanekaragaman hayati yang tinggi dan pemandangan alam yang luar biasa menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat. Para wisatawan biasanya tinggal di resort yang ada di Waigeo Selatan (P. Mansuar) namun sebagian besar tinggal di atas kapal (*liveaboard*) dengan lama tinggal 10 sampai 21 hari.

Wisatawan asing banyak yang tinggal di atas kapal karena mereka mengikuti paket kunjungan yang disediakan perusahaan penyedia jasa pariwisata. Musim kunjungan wisatawan *liveaboard* ke Raja Ampat adalah mulai dari bulan September sampai bulan Mei setiap tahunnya. *Liveaboard* yang beroperasi di Raja Ampat berjumlah 18 kapal dan yang sudah resmi terdaftar/melapor kepada Dinas Pariwisata sebanyak 10 kapal. Hampir semua perusahaan/operator *liveaboard* ini berbasis di luar Sorong dan Raja Ampat.



# Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya



## Nama Kawasan

Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan laut di sekitarnya Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

## Dasar Hukum

Kawasan Kepulauan Kapoposang dan perairan di sekitarnya telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan RI sebagai Kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) berdasarkan Surat Keputusan No. 588/Kpts-VI/1996 tanggal 13 September 1996. Saat ini, pengelolaan Kepulauan Kapoposang dan perairan di sekitarnya telah diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. BA.01/Menhut-IV/2009 dan No. BA. 108/MEN.KP/III/2009 pada tanggal 4 Maret 2009 dengan nama Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya (TWP Pulau Padaido). Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan laut di sekitarnya Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/MEN/2009 tanggal 3 September 2009.

## Luas

Luas Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan laut di sekitarnya adalah 50.000 Ha.

## Letak

Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan laut di sekitarnya secara geografis terletak pada  $118^{\circ}54'00''$  -  $119^{\circ}10'00''$  BT dan  $04^{\circ}37'00''$  -  $04^{\circ}52'00''$  LS.

Batas-batas kawasan Taman Wisata Perairan Kapoposang adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mattiwo Walie
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perairan Kota Makassar, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Liukang Kalmas dan Selat Makassar.

## Keanekaragaman Hayati

Fauna laut khususnya jenis ikan yang banyak dijumpai di kawasan ini adalah berbagai jenis ikan perairan, jenis ikan konsumsi dan jenis ikan hias. *Lutjanus decussates*, *Siganus Spp* dan *Naso Spp* yang mendominasi jenis ikan pangan. Sementara jenis ikan hias didominasi jenis *Hemitaenichthys polylepis* dan *Chaetodon kleini* dari suku *Chaetodontidae*. Jenis-jenis ikan ini dapat ditemukan pada daerah paparan terumbu karang dan *drop off*.

## Aksesibilitas

Akses menuju kawasan TWP Pulau Kapoposang saat ini dapat menggunakan beberapa jalur pelayaran yakni; (i) dari Makassar melalui pelabuhan Paotere dan POPSA; (ii) dari Maros melalui pelabuhan Kalibone, dan (iii) dari Pangkep melalui pelabuhan Semen Tonasa. Pelayaran yang menggunakan perahu bermotor milik nelayan yang disewa, dengan tingkat keamanan pelayaran yang relatif baik. Dengan perahu bermotor yang lazim dipakai nelayan, waktu tempuh Makassar – Kapoposang sekitar 6 jam, sedangkan waktu tempuh dari Maros dan Pangkep masing-masing 7 dan 8 jam. Wisatawan umumnya ke TWP Pulau Kapoposang melalui pelabuhan di Makassar. Selain bermotor, juga terdapat *speed boat* yang sudah dirintis oleh pengusaha (operator wisata) yang mengkoordinir kunjungan ke

Pulau Kapoposang, waktu tempuhnya bisa 2 – 3 jam. Terdapat 3 pelabuhan untuk masuk ke kawasan TWP kepulauan Kapoposang, yaitu; pelabuhan Gondongbali untuk kunjungan penduduk dari luar kawasan, pelabuhan pulau Papandangan untuk transportasi internal (wisata dan biasa), dan pelabuhan pulau Kapoposang untuk kunjungan wisata dan internal kawasan TWP antara lain untuk pengambilan air, perikanan, dan lain-lain.

## Potensi Pariwisata

Potensi wisata di dalam dan sekitar kawasan TWP Kepulauan Kapoposang, antara lain:

### (a) Penyelaman (Diving)

Selama ini pantai Pulau Kapoposang menjadi lokasi *diving* bagi wisatawan. Hal ini karena keindahan terumbu karang Kapoposang mempunyai nilai keindahan yang cukup besar bila dibandingkan dengan pantai lainnya. Ditambah lagi dengan kualitas pantai yang belum tercemar oleh kerusakan alam dan juga pasir putih yang mengelilingi sepanjang kawasan pantai.

### (b) Snorkling

Pantai pulau Kapoposang mempunyai ekosistem terumbu karang dan jenis flora dan fauna yang keanekaragamannya cukup tinggi. Keindahan ini sangat menarik minat wisatawan untuk melakukan kegiatan *snorkling* untuk menikmati keindahan pantai Kapoposang di waktu senggang.

### (c) Memancing (Fishing)

Pantai pulau Kapoposang juga memiliki jenis ikan yang sangat beragam. Jenis ikannya masih cukup banyak karena masih belum dirusak oleh aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat keras ataupun karena faktor lingkungan. Wisatawan melakukan kegiatan *fishing* pada waktu-waktu senggang sambil menikmati suasana keindahan pantai pulau Kapoposang.



**(d) Kegiatan Budidaya Rumput Laut**

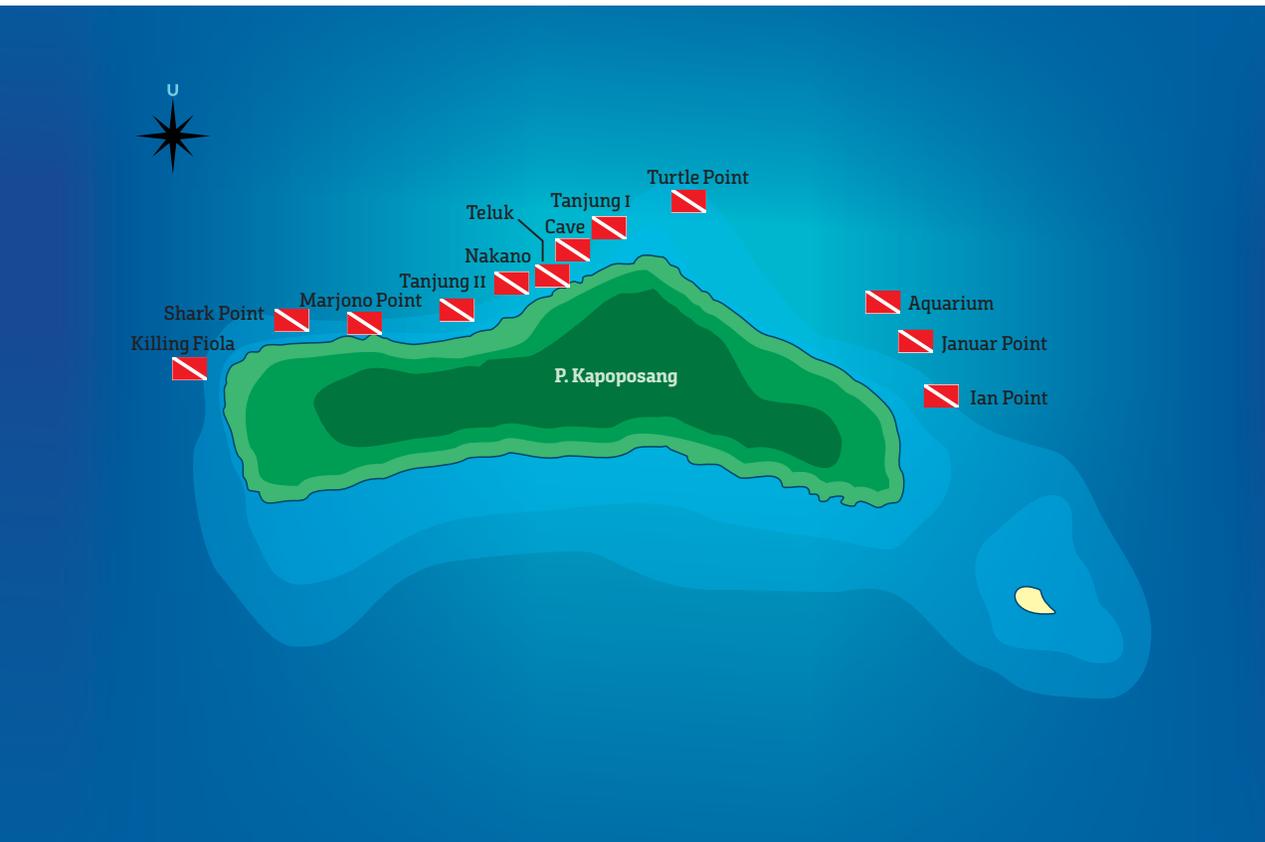
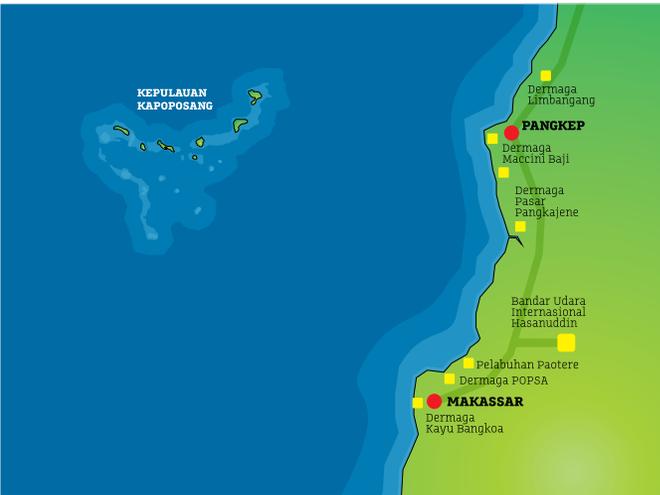
Terdapat kegiatan masyarakat yang terbilang unik dan ternyata dapat dijadikan sebagai paket wisata alam, yaitu kegiatan budidaya rumput laut yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat pulau Kapoposang. Kegiatan budidaya rumput laut ternyata mengundang minat wisatawan untuk melakukannya. Wisatawan tergerak untuk datang dan belajar mengenai tata cara budidaya rumput laut yang sudah dijadikan tradisi bagi masyarakat pulau Kapoposang.

**(e) Melihat Penyu Bertelur dan Aktifitas Penangkapan Nener**

Pada lokasi pantai lain, kegiatan melihat penyu bertelur dan aktifitas penangkapan nener sudah jarang ditemui. Hal ini disebabkan karena kondisi kerusakan pantai yang belum ditangani dengan baik. Di pantai pulau Kapoposang keadaan flora seperti penyu dan nener masih terjaga dengan baik dari kondisi kerusakan, sehingga wisatawan tertarik untuk datang mengunjunginya.

**(f) Menyaksikan Sunrise dan Sunset**

Dengan panorama yang indah dan kondisi pantai yang masih alami serta lingkungan perairan yang masih bagus mendorong wisatawan untuk menyaksikan dan menikmati keindahan alam pulau Kapoposang pada saat matahari terbit (*sunrise*) dan matahari terbenam (*sunset*).



# Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan

TWP

**Nama Kawasan**

Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan

**Dasar Hukum**

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kepmen 67/MEN/2009

**Luas**

Luas Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan adalah 2.954Ha.

**Letak**

Secara geografis TWP pulau Gili Matra terletak pada 8° 20' - 8° 23' LS dan 116° 00' - 116° 08' BT. Sedangkan secara administratif pemerintahan, kawasan ini terletak di desa Gili Indah kecamatan

Pemenang, kabupaten Lombok Utara propinsi Nusa Tenggara Barat.

**Potensi Keanekaragaman Hayati**

Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan memiliki potensi sumber daya alam berupa biota laut berupa Karang laut seperti Karang Lunak (*Heliophora sp*); (*Labophyelia sp*) dan lain-lain. Karang Keras (*Millephora sp*); (*Anthipathes sp*); (*Monthipora sp*) dan lain-lain, serta berbagai macam jenis ikan



**Gili Trawangan merupakan lokasi yang cukup ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun manca Negara**

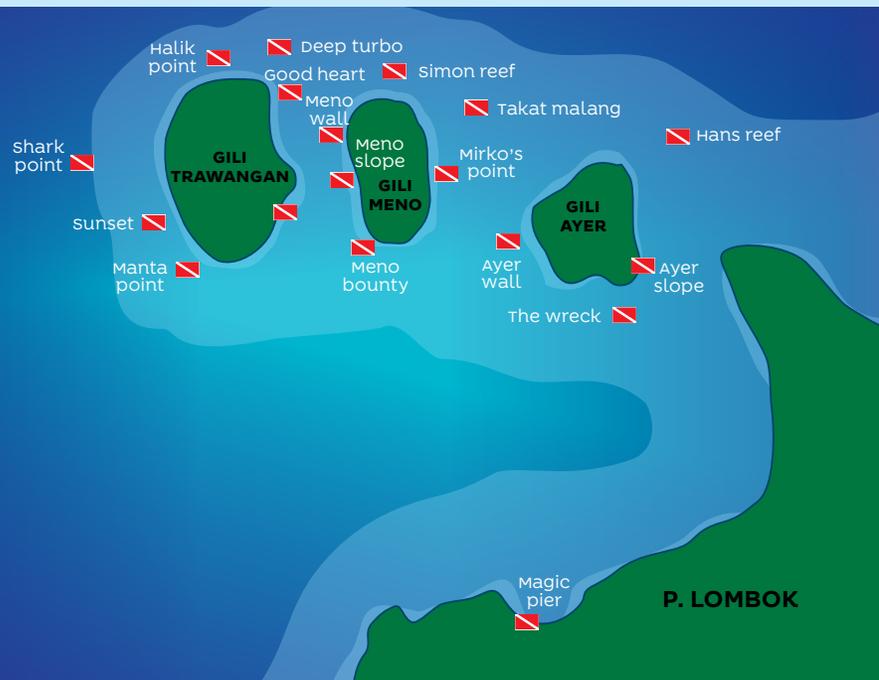
hias (*Baliſtapus undulates*); (*Lethrinus nuburotus*); (*Platakpinatus*); dan lain-lain. Dari hasil survey terdapat 54 marga dan 148 jenis karang yang tersebar di ketiga Gili ini, Karang yang tumbuh didominasi oleh *Acropora sp.*, yang tumbuh pada kedalaman sekitar 3-16 meter dari permukaan laut. Sedangkan di Gili Indah terdapat 26 suku dan 167 jenis ikan, sebagian dari ikan-ikan tersebut merupakan ikan yang mempunyai warna yang menarik

**Aksesibilitas**

Untuk menuju kawasan TWP pulau Gili Matra, bandara Praya dan pelabuhan Lembar merupakan pintu masuk utama bagi pengunjung. Kendaraan pribadi, carter, angkutan umum maupun biro-biro perjalanan merupakan alternative pilihan moda transportasi yang ada. Pada umumnya biro-biro perjalanan ini menawarkan beberapa pilihan paket wisata. Jika melalui jalur Mataram-Senggigi-Pemenang-Bangsar pengunjung/wisatawan akan menikmati pemandangan pantai senggigi dan pantai utara pulau Lombok sampai tiba di Bangsal. Sedangkan jika melalui jalur Mataram-Gunung sari-Pusuk-Pemenang-Tanjung, pengunjung akan melewati pusat kerajinan bambu di Gunung sari dan pemandangan hutan wisata Pusuk dengan keranya yang jinak. Jika ingin berwisata ke TWP pulau Gili Matra dengan menggunakan kendaraan umum sebaiknya melewati jalur Mataram-Gunung sari-Pusuk-Pemenang-Tanjung karena kalau melewati jalur Senggigi angkutan umum yang melewati jalur ini sangat jarang bahkan tidak ada setiap harinya. Biasanya angkutan umum hanya sampai di Mangsit atau Kerandangan.

**Potensi Pariwisata**

Kawasan ini memiliki potensi wisata yang cukup menarik yaitu pantai pasir putih yang indah, berbagai jenis terumbu karang diantaranya: Karang Lunak (*Heliophora sp.*), *Anthiphates sp.*, *Montiphora* dan *Acropora* dan berbagai jenis ikan hias yang menawan. Aktifitas wisata yang dapat dilakukan: *diving*, *snorkeling*, *sun bathing*, *kanoing*, *swimming*, *photo hunting* dan *fishing*. Wilayah gili terawangan merupakan lokasi yang cukup ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun manca Negara. Kawasan ini berpenduduk kurang lebih 800 KK, selain mata pencaharian pokok, sebagian masyarakat mempunyai mata pencaharian alternative dalam mendukung pariwisata bahari yang berkembang di sana.



Taman Wisata Perairan  
**Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya**

TWP

**Nama Kawasan**

Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

**Dasar Hukum**

Kawasan Kepulauan Padaido dan perairan di sekitarnya telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI sebagai Kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) berdasarkan Surat Keputusan No. 91/Kpts-VI/1997 tanggal 13 Pebruari 1997. Saat ini, pengelolaan Kepulauan Padaido dan perairan di sekitarnya telah diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. BA.01/Menhut-IV/2009 dan No. BA. 108/MEN.KP/III/2009 pada tanggal 4 Maret 2009 dengan nama Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya (TWP Pulau Padaido). Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.68/MEN/2009.

**Luas**

Luas Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya adalah 183.000 Ha.

**Letak**

Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya secara geografis terletak pada 01°07'00" - 01°22'00"LS dan 136°10'00"S - 136°46'00"BT. Dengan batas-batas kawasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Samudera Pasifik dan Distrik Biak Timur
- Sebelah Selatan: Selat Yapen
- Sebelah Barat: Distrik Biak Timur, dan
- Sebelah Timur: Samudera Pasifik

**Potensi Keaneekaragaman Hayati**

Keragaman karang di Kepulauan Padaido cukup tinggi terdiri dari 90 jenis yang tergolong dalam 41 genera dan 13 famili serta beberapa jenis karang lunak, yaitu *Sinularia*, *polydatil*, *Sacrophyton trocheliophorum*, *Labophytum strictum* dan *L. Crassum*. Jenis karang dominan adalah *Faviidaer*, *Fungidae*, *Pociloporidaer* dan *Acroporidae*. Di Kepulauan Padaido ditemukan kurang lebih 127 jenis ikan target, 34 jenis ikan indikator dan 185 jenis ikan mayor. Mangrove ditemukan 7 jenis yaitu; *Bruguiera gymnorhiza*, *Rhizophora apiculata*, *R. Stylosa*, *Sonnetaria alba*, *Cerops tagal*, *Lumnitzeralittorea*, dan *Avicenia alba*. Sementara Lamunditemukan 9 jenis, yaitu; *Thalassia*, *Hemprichii*, *Enhalus acoroides*, *Cymodocea serrulata*, *C. Serullata*, *Halodule universis*, *H. Pinifolia*, *Holophila ovalis*, *H. Spinulosa*, dan *Syringodium iscaetifolium*. Rumpun laut ditemukan 58 jenis, 11 jenis diantaranya bernilai ekonomis, seperti; *Euchema*, *Glacilaria*, *Hypnea*, *Laurencia*, *Gelidiella*, *Halimena*, *Caulerpa*, *Chaetomorpha*, *Sargassum* dan *Turbinaria*.

**Aksesibilitas**

Untuk mencapai Kepulauan Padaido dapat menggunakan speed boat dari pelabuhan Bosnik selama kurang lebih 1 jam atau dengan perahu tradisional nelayan dengan waktu 3 hingga 4 jam perjalanan. Selain itu dapat menggunakan pesawat terbang dari Jakarta (Bandara Soekarno Hatta). Sejumlah maskapai



penerbangan menyediakan perjalanan dari Jakarta menuju Pulau Biak dalam rangka meningkatkan potensi bahari dan lokasi sejarah di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

### Potensi Pariwisata

Kepulauan Padaido sebagai Kawasan Taman Wisata Perairan dengan luas 183.000 dengan keaneragaman hayati yang cukup tinggi merupakan wilayah yang potensial dikembangkan kegiatan pariwisata. Dengan keunikan dan karakter wilayah yang dimiliki sangat cocok ditawarkan sebagai destinasi wisata, baik itu wisata alam, wisata budaya dan wisata bahari. Selama ini, keberadaan Kepulauan Padaido sudah cukup diketahui oleh pelancong (pengunjung wisata) dari domestik maupun manca negara. Dari data yang ada, pelancong yang berkunjung ke Kepulauan Padaido berasal dari 15 negara. Untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut terdapat sarana pariwisata termasuk angkutan yang disiapkan oleh masyarakat setempat. Sarana pariwisata yang tersedia antara lain pondok wisata yang juga dikelola oleh masyarakat.



### Nama Kawasan

Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda

### Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.69/Men/2009 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda Di Provinsi Maluku.

Secara resmi Cagar Alam /Taman Laut Banda yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 221/Kpts/Um/1977 tanggal 25 April 1977 seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar sebagai Cagar Alam Laut. Dikeluarkannya surat keputusan penetapan status tersebut sehubungan dengan usulan penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar alam laut oleh FAO/UNDP berdasarkan studi kelayakan terhadap kawasan Maluku dan Irian Jaya pada tahun 1981, kemudian pada tahun 1987 pengamatan dengan penekanan pada konservasi laut di Maluku oleh de Jong et al (WWF Netherland), usulan dari KSDA Maluku dan pengamatan dari WWF Indonesia pada tahun 1989 serta misi yang dilakukan oleh Joop Schult/PHPA yang melakukan pembangunan stasiun lapangan atau mengkoordinasikan pengadaan transportasi di waktu yang akan datang, pada tahun 1991/1992.

### Luas

Luas Taman Wisata Perairan Laut Banda adalah 2.500 Ha.

### Letak

Secara geografis Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda terletak kurang lebih 132 Km sebelah tenggara Ambon. Secara administratif, Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda termasuk ke dalam Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan koordinat sbb:

### Potensi Keanekaragaman Hayati

Terumbu karang merupakan kekayaan sumberdaya melimpah ada di Kepulauan Banda. Potensinya tersebar di enam pulau di kepulauan Banda, mulai dari Pulau Run di sebelah barat, sampai Pulau Hatta, serta 50 km ke arah selatan. Lebih dari 300 spesies karang keras telah tercatat, yang memiliki standar dunia yang tinggi sehingga diberikan wilayah kecil di Pulau Banda. Pada umumnya terumbu karang yang terdapat di Pulau Banda adalah terumbu karang tepi yang sempit tanpa adanya sebuah terumbu karang intertidal yang rata. Telah teridentifikasi empat jenis komunitas karang yaitu: dua jenis berasal dari tempat landai yang dalam dan dua lainnya dari wilayah perairan yang agak dangkal.

### Aksesibilitas

Untuk mencapai kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda, dapat ditempuh dengan cara, antara lain: dari Ambon ke Banda (Neira) dengan menggunakan pesawat terbang dengan waktu tempuh berkisar satu jama tau dengan menggunakan kapal laut, dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Dari Pulau Banda (Neira) dapat langsung ke Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda dengan perahu carteran dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

### Potensi Pariwisata

Bandaneira memiliki lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi antara lain adalah Rumah Budaya yang berada di Jl Gereja Tua. Bangunan ini dulunya



# Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya

TWPP

merupakan vila milik petinggi Belanda namun saat ini berfungsi sebagai museum yang memiliki koleksi antara lain meriam, mata uang kuno, peta dan helm kuno. Di museum ini juga terdapat lukisan mengenai peperangan pada masa lalu. Museum ini juga memiliki diorama mengenai sejarah Banda. Lokasi wisata bernilai sejarah di Bandaneira adalah Benteng Nassau yang merupakan benteng peninggalan Belanda. Benteng Nassau pertama kali dibangun oleh Portugis pada tahun 1529 ketika mereka pertama kali ke Bandaneira dari pangkalan mereka di Ternate. Namun sebelum pembangunan benteng ini selesai Portugis harus angkat kaki ketika Belanda datang dan menguasai Bandaneira. Portugis meninggalkan benteng yang baru tahap pembangunan fondasi. Belanda kemudian melanjutkan pembangunan benteng ini hingga selesai. Saat ini bangunan benteng yang tersisa hanyalah tiga dinding dan sebuah pintu gerbang utama. Benteng Belgica terletak di sebelah timur tidak jauh dari Benteng Nassau. Benteng Belgica dibangun Belanda pada Tahun 1611 dibawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both yang ditugaskan untuk membangun monopoli perdagangan oleh Belanda di wilayah ini. Benteng ini menjadi markas militer Belanda hingga tahun 1860. Dari kondisi hampir runtuh, benteng ini mengalami perbaikan besar-besaran beberapa tahun lalu dan saat ini dalam kondisi baik. Panorama di sekitar benteng ini sangat mengesankan dengan latar belakang Gunung Api yang menjulang. Berjalan-jalan di sekitar benteng ini sangat menyenangkan sambil membayangkan suasana masa kolonial tempodulu.



## Nama Kawasan

Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya

## Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.70/Men/2009 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat

## Luas

Luas Taman Wisata Perairan ini adalah sekitar 3.900 Ha.

## Letak

Secara geografis Pulau Pieh berada pada posisi 99°59' 36" - 100°59' 28" BT sampai dengan 00°45'10" - 01°03'08" LS, jaraknya dari daratan Kabupaten Padang Pariaman ± 17 mil, yang dapat ditempuh dengan kapal motor selama 2 jam. Sedangkan secara administrative wilayah ini termasuk ke dalam wilayah kecamatan ulakan tapakis yang merupakan pecahan dari kecamatan nan sebaris Kabupaten Padang Pariaman dengan batas-batas kawasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara Perbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat dengan samudera Indonesia dan
- Sebelah Timur dengan daratan Sumatera.

Selain Pulau Pieh, Pulau bando juga merupakan bagian dari TWP, pulau ini berada di wilayah administrasi kabupaten padang pariaman. Sedangkan Pulau Air masuk dalam wilayah kota padang. Jarak TWP Pulau Pieh dari daratan (Kota Padang) ± 22 mil laut.

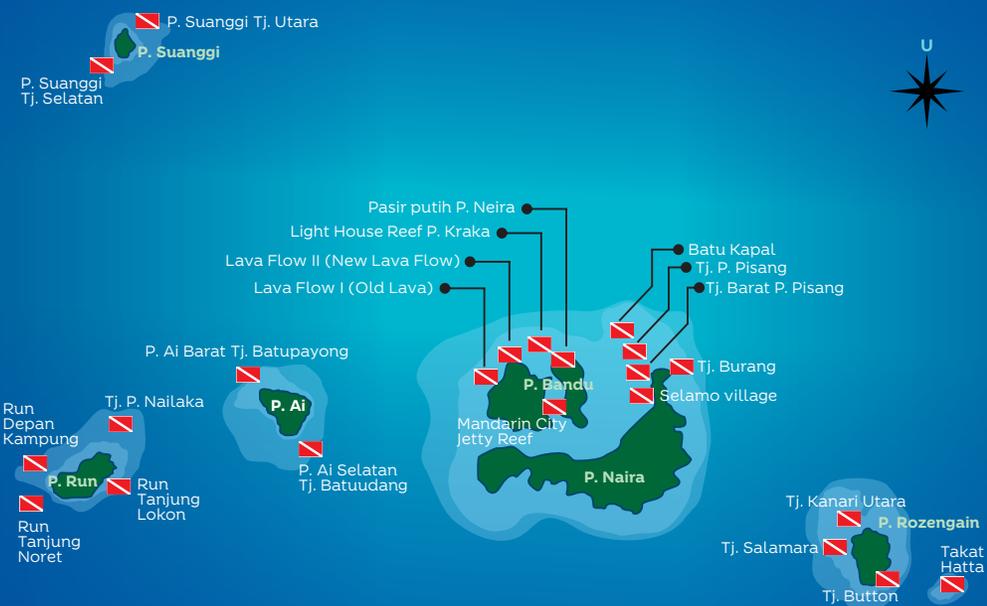
## Potensi Keaneekaragaman Hayati

Terumbu karang merupakan kekayaan sumberdaya melimpah ada di kawasan ini. Terumbu Karang memiliki produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi. Fungsi ekologisnya antara lain sebagai tempat pemijahan, pembesaran, tempat mencari makan, terumbu karang juga dipandang penting karena produk yang dihasilkan seperti ikan karang, ikan hias, udang, alga dan bahan-bahan bio-aktif.

Berdasarkan hasil pengambilan data Loka KKPN Pekanbaru (2009) kondisi terumbu karang berada pada status jelek dengan nilai rata-rata tutupan karang sebesar 4%, nilai tersebut terdiri dari 1% *Acropora* dan 3% *Non Acropora* sebagian kawasan yang diamati ditumbuhi oleh Alga, 10,5% ditutupi oleh pasir, sementara sisanya ditutupi oleh *Rubie* dan *Sponge*. Disamping terumbu karang perairan Pieh juga sangat kaya dengan ikan karang, baik berupa ikan hias, maupun ikan konsumsi. Ikan hias laut di kawasan Pieh ini cukup potensial untuk didayagunakan, khususnya bagi wisata bawah air maupun objek penelitian. Disamping ikan di Pieh juga dapat ditemui penyu, yaitu penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Pulau Pieh merupakan lokasi bertelurnya penyu-penyu tersebut.

## Aksesibilitas Kawasan Taman Wisata

Perairan Pulau Pieh ditempuh melalui jalan laut dengan kapal motor yang berkekuatan 33 HP (rata-rata kecepatan 7 knot) sekitar 2,5 jam. Jaraknya dari daratan kota padang sekitar 29 mil. Dengan jarak terdekat ke kota Padang 16,75 km dan jarak terjauh 50,6 km sedangkan jarak terdekat ke daratan pulau sumatera





## Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung



### **Sekilas tentang Kawasan**

KKP Nusa Penida dibentuk dengan salah satu tujuan yaitu perikanan yang berkelanjutan selain pariwisata yang berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati laut. Di dalam KKP diatur zona-zona seperti zona inti yang gunanya untuk melindungi tempat-tempat ikan berpijah dan bertelur sehingga zona ini samasekali tidak boleh diganggu.

Sementara itu zona perikanan berkelanjutan diperuntukan agar nelayan Nusa Penida tetap dapat menangkap ikan, tentunya dengan alat tangkap dan cara-cara yang ramah lingkungan. Penangkapan ikan dengan cara merusak seperti bom dan potasium-sianida dilarang digunakan di dalam KKP Nusa Penida. Sementara zona lainnya juga berperan di dalam melindungi terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun yang merupakan ekosistem penting pesisir dimana ikan dan biota laut lainnya bereproduksi, bertelur, berlindung dan mencari makan di dalamnya. Jika ekosistem ini rusak maka ikan akan semakin berkurang dan akan berdampak kepada nelayan Nusa Penida.

### **Nama Kawasan**

Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

### **Dasar Legal**

Pencadangan Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) melalui Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2010.

### **Luas Kawasan**

20,057 Ha

### Titik Koordinat Batas Luar KKP Nusa Penida

Batu Nunggul	: 115°34'37.10" BT – 8°39'14.43" LS
Batu Abah	: 115°39'41.36" BT – 8°46'25.54" LS
Sekartaji	: 115°35'32.37" BT – 8°51'39.59" LS
Sakti	: 115°26'06.53" BT – 8°45'46.33" LS
Lembongan	: 115°24'13.28" BT – 8°41'05.82" LS
Jungut Batu	: 115°26'42.52" BT – 8°38'34.63" LS

### Keanekaragaman Hayati

Perairan Nusa Penida memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dimana terdapat sekitar 149,05 Ha terumbu karang dengan 296 jenis karang. Wilayah ini termasuk dalam segitiga terumbu karang dunia (*the global coral triangle*) yang saat ini menjadi prioritas dunia untuk dilestarikan. Keanekaragaman ikan Karang dan Biota Lainnya. Kawasan ini memiliki 576 jenis ikan, 5 diantaranya jenis ikan baru. Kelompok ikan tersebut adalah ikan karang, ikan pelagis dan ikan dasar. Mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba melintas di kawasan ini. Selain itu, terdapat 2 jenis penyu, yaitu penyu hijau (*green turtle*) dan penyu sisik (*hawksbill turtle*). Beberapa daerah dalam kawasan ini merupakan lokasi penyu bertelur. Keunikan kawasan ini salah satunya adalah kemunculan ikan Mola-Mola (*sunfish*) yang merupakan ikan laut dalam pada bulan Juli – September. Beberapa lokasi di kawasan Nusa Penida menjadi *cleaning station* ikan Mola-Mola.

### Aksesibilitas

KKP Nusa Penida terletak di kecamatan Nusa Penida dan relatif mudah dicapai. Kecamatan kepulauan ini terletak tidak lebih dari 15 mil laut dari pulau utama Bali. Calon KKP Nusa Penida dapat dicapai dari 5 tempat yaitu Sanur, Pelabuhan Bena, Kusamba, Tanjung Bena dan Padang Bai.

Banyak terdapat sarana atau moda transportasi laut dan public-boat setiap harinya yang dapat mengantar penumpang (pengunjung) dari dan ke Kecamatan Nusa

Penida baik pada saat pagi, siang dan sore hari. Calon KKP Nusa Penida dapat dicapai dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dengan menggunakan speedboat *double engine* 85 PK. Terdapat pelabuhan ferry di Nusa Penida tempat bersandarnya kapal Roro dari Padang Bai (Karangasem).

### Potensi Pariwisata

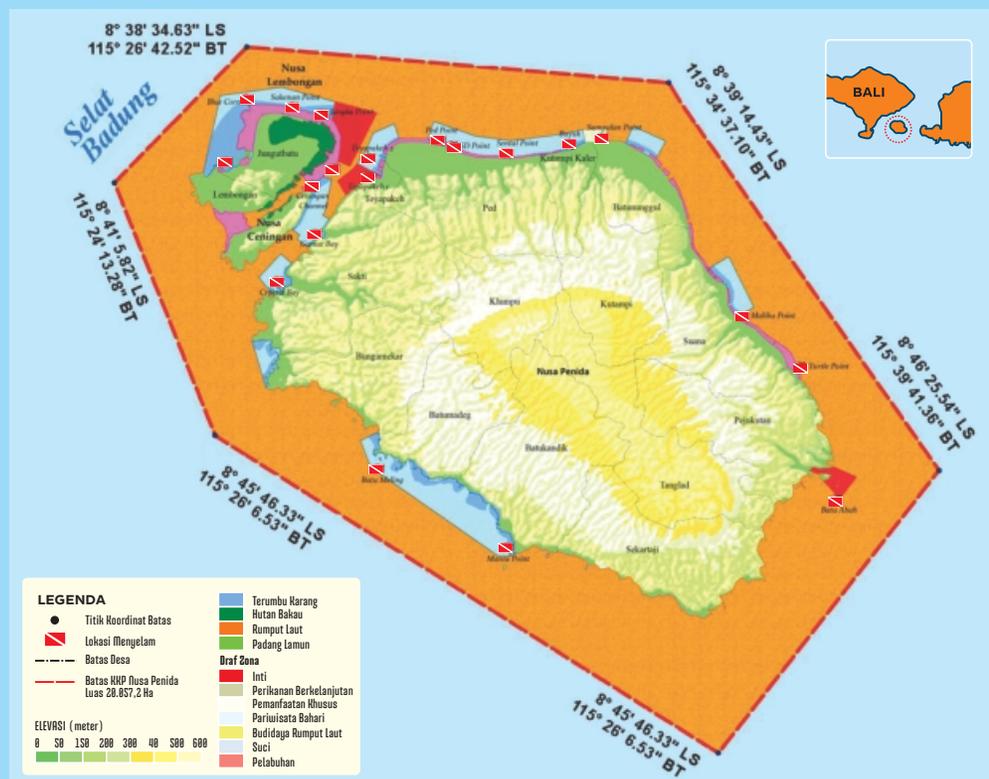
Kekayaan hayati laut Nusa Penida telah membawa manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Propinsi Bali. Terumbu karang (*coral reef*), hutan bakau (*mangrove*), ikan pari manta (*mantaray*), ikan mola-mola (*sunfish*), penyu (*sea turtle*), lumba-lumba (*dolphin*), Hiu (*shark*) dan Paus (*whale*) merupakan atraksi menarik bagi wisatawan bahari.

Terdapat lebih dari 20 titik lokasi penyelaman di perairan Nusa Penida dengan beberapa lokasi penyelaman favorit seperti *Crystal Bay*, *Manta Point*, *Ceningan Wall*, *Blue Corner*, *SD-Sental*, *Mangrove-Sakenan*, *Gemat Bay*, dan *Batu Abah*. Terdapat 3 *cruises* besar di Nusa Penida yang masing-masing memiliki *pontoon* seperti *Bali Hai*, *Bounty* dan *Quick-Silver* yang rata-rata membawa turis 200 orang per hari.

Wisata Bahari lainnya di Nusa Penida seperti *surfing*, *snorkeling*, *sailing*, *fishing*, *flying fish*, *Para-sailing*, *kayaking* dan *sea-walker*. Terdapat 6 penyelam operator base di Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Diperkirakan sekitar 200.000 turis datang berkunjung ke Nusa Penida setiap tahunnya. Puncak jumlah kunjungan paling ramai di Nusa Penida (*peak-season*) adalah bulan Agustus – September, sementara bulan paling sepi (*low-season*) bulan Januari – Februari.

### Status Pengelolaan

Pasca pencadangan, sudah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan konservasi ini, antara lain pembentukan pokja Nusa Penida, penyusunan zonasi kawasan, monitoring sumberdaya, penyusunan profil perikanan, penyusunan profil wisata bahari dan sebagainya.



### TWP NUSA PENIDA

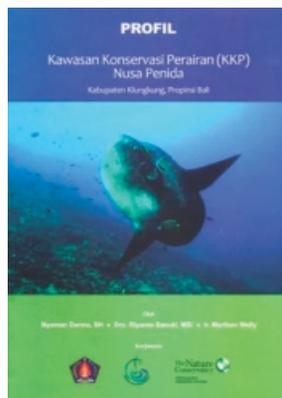
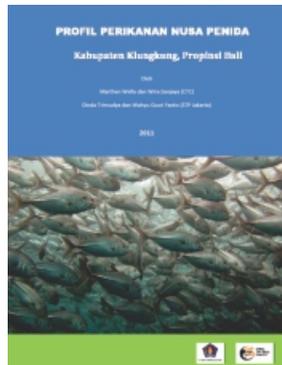
- PENCADANGAN : SK. Bupati Klungkung No. I2 Tahun 2010
- Luas Kawasan : 20,057 Ha
- Lembaga Pengelola : Pokja Pengelola KKP, dalam proses pembentukan UPTD
- Penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi
- Monitoring sumberdaya
- Pengembangan wisata Bahari
- Tingkat Pengelolaan Level I (Merah) menuju Level 2 (Kuning)

### Potensi keanekaragaman Hayati Laut Nusa Penida

Terumbu karang	: 1419 hektar, 296 jenis
Ikan	: 576 jenis, 5 jenis baru
Mangrove	: 230 hektar, 13 jenis
padang Lamun	: 108 hektar, 8 jenis
Mega Fauna Laut	: Pari Manta, Penyu, Hiu, Paus, Lumba-Lumba, dugong

### Potensi sosio-Ekonomi Nusa Penida

Administratif	: Kab. Klungkung, 3 pulau utama, 16 desa dinas, 44 desa adat
penduduk	: 46.000 penduduk, mayoritas Balinese-Hindu
Rumput Laut	: 308 hektar, 40 ton/bulan, 32 kelompok petani rumput laut
Wisata Bahari	: 20 titik penyelaman, 200.000 wisatawan/tahun
Perikanan	: 226.5 ton/tahun, 829 nelayan, 40 kelompok nelayan
Budaya	: Nyepi segara



**Inisiasi dan Progress**

**Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida 2012**

- **Data Dasar** - Ekologi, Sosek, Oseanografi, Profil KKP Nusa Penida, Profil Perikanan, Profil Wisata Bahari, Studi Kemauan Turis Berkontribusi untuk Pengelolaan KKP (*willingnes to pay*)
- **Pernyataan dukungan** - dari para pemangku kepentingan melalui 33 konsultasi publik
- **POKJA KKP Nusa Penida** - SK Bupati Klungkung No.9 Tahun 2012
- **Batas Luar KKP Nusa Penida** - Satu Mil dari garis pantai
- **PERBUP Klungkung** - No. 12 tahun 2010 ttg Pencadangan KKP Nusa Penida seluas 20.057 hektar.
- **Monitoring tahunan**- Ekologi - Terumbu Karang dan Ikan (2008-2011), Sosek - Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya (2012)
- **Sistem zonasi KKP Nusa Penida** - 7 zona yaitu zona inti, zona perikanan tradisional, zona wisata bahari, zona wisata bahari khusus, zona budidaya rumput laut, zona suci dan zona pelabuhan (melalui 24 kali konsultasi publik, kajian hukum dan data ilmiah)
- **Strategi Komukasi dan Penyadaran** - Berbagai pelatihan terkait Prinsip Dasar KKP, Pengelolaan KKP Yang Efektif, Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir, dan Selam Ilmiah Pemantauan Terumbu Karang dan Ikan. Media informasi berupa poster dan film terkait KKP Nusa Penida.
- **Pencegahan Kerusakan Terumbu Karang** - 5 pelampung tambat (mooring buoy), dan 125 penanaman karang sudah dibuat. Dalam waktu dekat akan ditambah sebanyak 144 karang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat KKJI-KP3K
- **Penanaman Mangrove** - sudah menanam sekitar 2500 batang dan akan ditambah sebanyak 300 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat KKJI-KP3K
- **Monitoring Suhu Perairan** - 6 temperatur pemantau suhu perairan (temperatur logger) sudah terpasang di perairan Nusa Penida.
- **Rencana Pengelolaan Jangka Panjang** - Rencana Pengelolaan Jangka panjang 20 tahun KKP Nusa Penida sedang dalam proses pembuatan, diharapkan akan selesai bulan Desember 2012
- **UPT Pengelola KKP Nusa Penida** - Draft PERBUP Klungkung mengenai UPT Pengelola KKP Nusa Penida telah dibuat dan sedang dikaji oleh Bagian Hukum Pemkab Klungkung, diharapkan UPT akan terbentuk tahun 2013

ZONASI  
KAWASAN  
KONSERVASI  
PERAIRAN (KKP)  
NUSA PENIDA,  
KEC. NUSA PENIDA,  
KABUPATEN  
KLUNGKUNG



survei populasi ikan dan Terumbu Karang di Nusa Penida



**BLUE ECONOMY** – Pengembangan wisata selam

**Wisata selam/snorkeling** – Di KKP Nusa Penida terdapat ikan unik Mola Mola, Pari Manta, terumbu karang yang menjadi daya tarik wisata selam/snorkeling, terdapat 20 titik penyelaman di perairan Nusa Penida

**Wisata mangrove Tour** – Terdapat 230 hektar mangrove dan 13 jenis di Nusa Lembongan yang dapat dikembangkan untuk wisata mangrove tour

**Water sport** – Di KKP Nusa Penida juga dapat dikembangkan wisata bahari lainnya seperti memancing, berlayar, dan berenang



### Sekilas Wisata Nusa Penida

- Termasuk coral triangle
- 296 jenis karang,
- 576 jenis ikan
- Ikan Mola-Mola sebagai icon
- 13 jenis mangrove
- 1.419 hektar terumbu karang
- 230 hektare hutan mangrove
- Wisata budaya dan religi
- water sport
- Pantai pasir putih dan laut jernih



**BLUE ECONOMY – Budidaya Rumput Laut**

**Rumput Laut** – Terdapat sekitar 308 hektar areal rumput laut di Nusa Penida dengan produksi 40-50 ton/bulan

**Aneka Makanan dan Industri** – Hasil rumput laut dapat dikembangkan menjadi aneka makanan seperti dodol, kue bolu, kerupuk, dan jus rumput laut. Rumput laut juga dapat menghasilkan bahan pembuat agar-agar, kosmetik dan obat-obatan

**Seaweed Tour** – Di Nusa Lembongan dapat dikembangkan wisata seaweed tour dimana turis dapat ikut bersama petani menanam rumput laut



**BLUE ECONOMY – Perikanan**

**Perikanan** – Di perairan Nusa Penida merupakan tempat penangkapan ikan tongkol, cakalang, kakap, tenggiri dan ikan lainnya, terdapat sekitar 1000 nelayan di Nusa Penida

**Aneka Makanan Berbahan Ikan** – Produk makanan berbahan ikan seperti abon, kerupuk, bakso, dapat disajikan bagi wisatawan dan sebagai oleh-oleh dari Nusa Penida

**Wisata Mancing**– Di perairan Nusa Penida dapat dikembangkan wisata memancing dengan sistem *catch and release*

# Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Lombok Timur Suaka Alam Perairan (SAP) Trenggini Sambelia



## Nama Kawasan

Kawasan Konservasi Perairan Lombok Timur (Suaka Alam Perairan Trenggini Sambelia)

## Dasar Hukum

SK Pencadangan Bupati 188.45/332/KP/2012 tentang Penetapan Perairan Trenggini sebagai Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di kabupaten Lombok Timur

## Luas Kawasan

Kawasan Konservasi ini memiliki luas 9.162,34 Ha.

## Letak Geografis dan Administratif

Kawasan ini terletak di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Keanekaragaman Hayati

Ekosistem Terumbu karang terdiri dari soft coral dan hard coral yang dihuni sekitar 53 species ikan karang. Selain itu, kawasan ini juga memiliki kekayaan sumberdaya alam lain berupa ekosistem Padang Lamun, dan Mangrove (19 jenis).

## Potensi Pariwisata

Kawasan yang sebelumnya dikenal dengan KKLD Gili Sulat-Gili Lawang ini sudah sejak lama menjadi salah satu tujuan wisata di Lombok. Para wisatawan umumnya menikmati keindahan pesisir pantai dan melakukan aktifitas menyelam dan memancing di sekitar kawasan konservasi.



## Aksesibilitas

Untuk mencapai kawasan ini bisa ditempuh sekitar 30 menit dari Desa Sambelia dengan menggunakan perahu motor. Desa Sambelia dapat dicapai dengan menggunakan transportasi laut dan darat melalui jalur Utara dan Selatan, yaitu:

### a. Jalur dari arah Selatan

Perjalanan ke Sambelia dapat ditempuh melalui empat rute melalui jalan darat, yaitu:

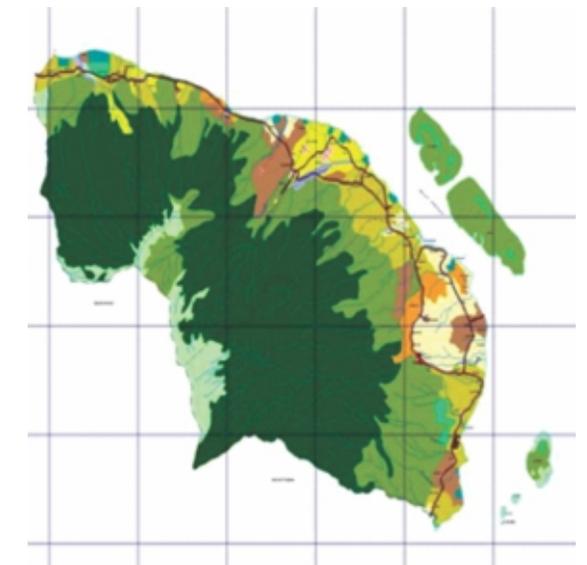
- Dari Mataram sekitar 2,5 jam
- Dari Kuta sekitar 2 jam
- Dari Tele Batu, atau dari Snaru, sekitar 1 jam

### b. Jalur dari arah Utara, dapat ditempuh dengan

- Dari Senggigi ke Sambelia (+100 km), dengan jalan darat sekitar 2,5 jam.
- Dari Gili Indah dengan perahu motor, sekitar 2,5 jam

## Status Pengelolaan

Kawasan ini saat ini tengah dievaluasi kelayakan usulan penetapan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan khususnya terkait dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang telah disusun serta aspek-aspek lainnya.



## Tipe Tutupan Lahan

1. Mangrove
2. Terumbu Karang
3. Padang lamun
4. Tanah Terbuka
5. Belukar
6. Pasir

## PENGELOLAAN KAWASAN

Partisipatif : Melibatkan masyarakat dan LSM di sekitar kawasan  
Terpadu : Pengelolaan yang efisien dan dinamis didasarkan pada strategi komunikatif, koordinatif dan multi stakeholder

### I. Program yang telah dilaksanakan

1. Pembangunan fasilitas penunjang:  
Kantor pengelola, pondok wisata, darmaga, jetty, shelter (berugak), speed boat, peralatan selam
2. Pengelola KKLD (Eselon IV sebagai penanggung jawab)
3. Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL)

### II. Hasil Observasi Tahun 2009

1. Mangrove : terdapat 19 jenis mangrove
2. Terumbu karang : terdiri dari soft dan hard coral
3. Ikan karang : terdapat 53 species dari 17 famili
4. Lamun : famili hydrocaritaceae dan pomagetonaceae

### III. Langkah Strategis Penanggulangan Degradasi SDA di KKLD

1. Pemberian bantuan sarana tangkap (jaring, pancing, mesin tempel)
2. Pemberian drum form untuk membuat rumpon
3. Rehabilitasi mangrove dan pembibitan mangrove (2010)
4. Transplantasi karang (2011)

## KEBIJAKAN DAN REGULASI

1. Perda Kab. Lotim Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pengembangan Pariwisata Kab. Lotim
  2. SK. Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/452/KP/2004 tentang Penetapan Gili Sulat dan Gili Lawang sebagai KKLD Kab. Lotim
  3. SK. Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/445/KP/2004 tentang Tim Terpadu Pengawasan Pengendalian dan Penanggulangan Pengambilan Karang Laut di Kab. Lotim
  4. Perda Kab. Lotim Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai Secara Partisipatif
  5. Perda Kab. Lotim Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KKLD
  6. Perda Kab. Lotim Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengambilan Karang Laut di Kab. Lotim
  7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diantaranya Pembentukan UPTD Balai Pengelolaan KKP
  8. Perda Prov. NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Prov. NTB 2009-2029 Kebijakan Strategis penataan ruang terkait kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, a.l: akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau kecil serta pengembangan kawasan pariwisata
  9. S.K. Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/332/KP/2012 tentang Penetapan Perairan Trenggini sebagai Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di kabupaten Lombok Timur
- Perda Kab. Lotim Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai Secara Partisipatif
- **Pembentukan Komite Kelautan dan Perikanan Kabupaten**  
Merupakan lembaga pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang ditetapkan oleh Bupati dengan tugas memberikan saran dan masukan kepada Kadis Diskelkan tentang pengelolaan sumberdaya perikanan
  - **Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL)**  
Merupakan lembaga pengelolaan sumberdaya perikanan pantai yang ditetapkan oleh Kadis Diskelkan, dengan tugas-tugas, a.l:
    - a. Menyusun rencana pengelolaan berdasarkan aspirasi masyarakat dan mengkonsultasikannya kepada Kadis Diskelkan
    - b. Mengidentifikasi, memverifikasi dan mencari solusi atas masalah yang muncul di kawasan pengelolaan

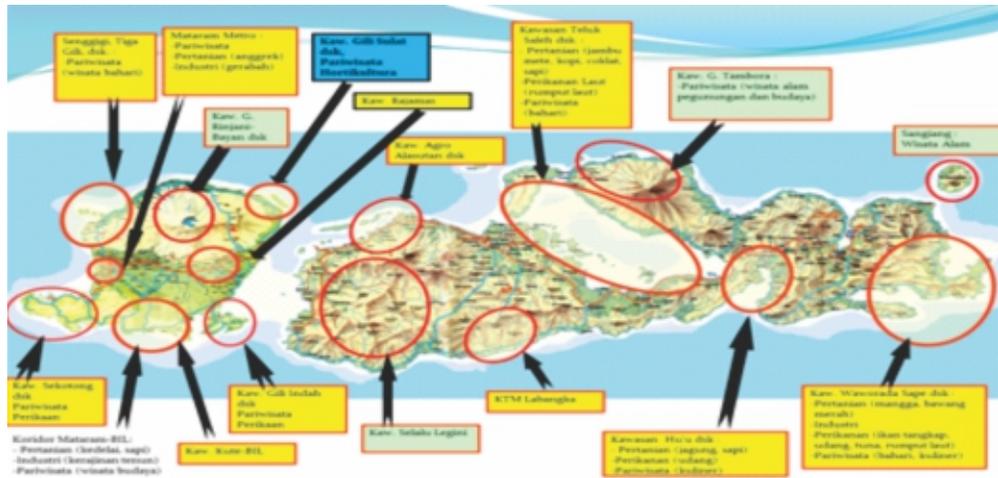


- c. Menerapkan sanksi pelanggaran rencana pengelolaan yang telah ditetapkan sebagai awig-awig pengelolaan sumberdaya perikanan pantai dalam suatu kawasan pengelolaan
- d. Melaporkan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai di kawasan pengelolaannya secara tertulis kepada Diskelkan

Perda Kab. Lotim Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KKLD

- Merupakan kawasan laut yang berada di wilayah kabupaten dan atau lintas desa yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai konservasi
- Tujuan, a.l:
  - a. Membentuk suatu daerah yang dilindungi dan bebas dari pemanfaatan sumberdaya yang merusak
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya perikanan pantai
  - c. Meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pelestarian fungsi sumberdaya ikan dan biota lainnya
- Menetapkan KKLD, a.l: KKLD Gili Sulat-Gili Lawang
- Menetapkan Zonasi KKLD Gili Sulat-Gili Lawang
  - a. **Zona Inti**  
Merupakan zona/kawasan yang tidak memperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan/pembangunan kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan
  - b. **Zona Penyangga**  
Merupakan kawasan yang memperbolehkan adanya kegiatan pembangunan tetapi intensitasnya terbatas
  - c. **Zona Perikanan Berkelanjutan**  
Merupakan kawasan pemanfaatan perikanan budidaya (mutiara) yang merupakan ciri khas KKLD Gili Sulat dan Gili Lawang.

# Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan (SAP) Trenggini Sambelia



KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

## KONDISI EXISTING KAWASAN GILI SULAT-LAWANG



Area pelabuhan yang kurang dimanfaatkan secara optimal



keindahan bawah laut yang akan dikembangkan menjadi obyek wisata menyelam



Daerah pesisir dan hutan mangrove yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai obyek ekowisata

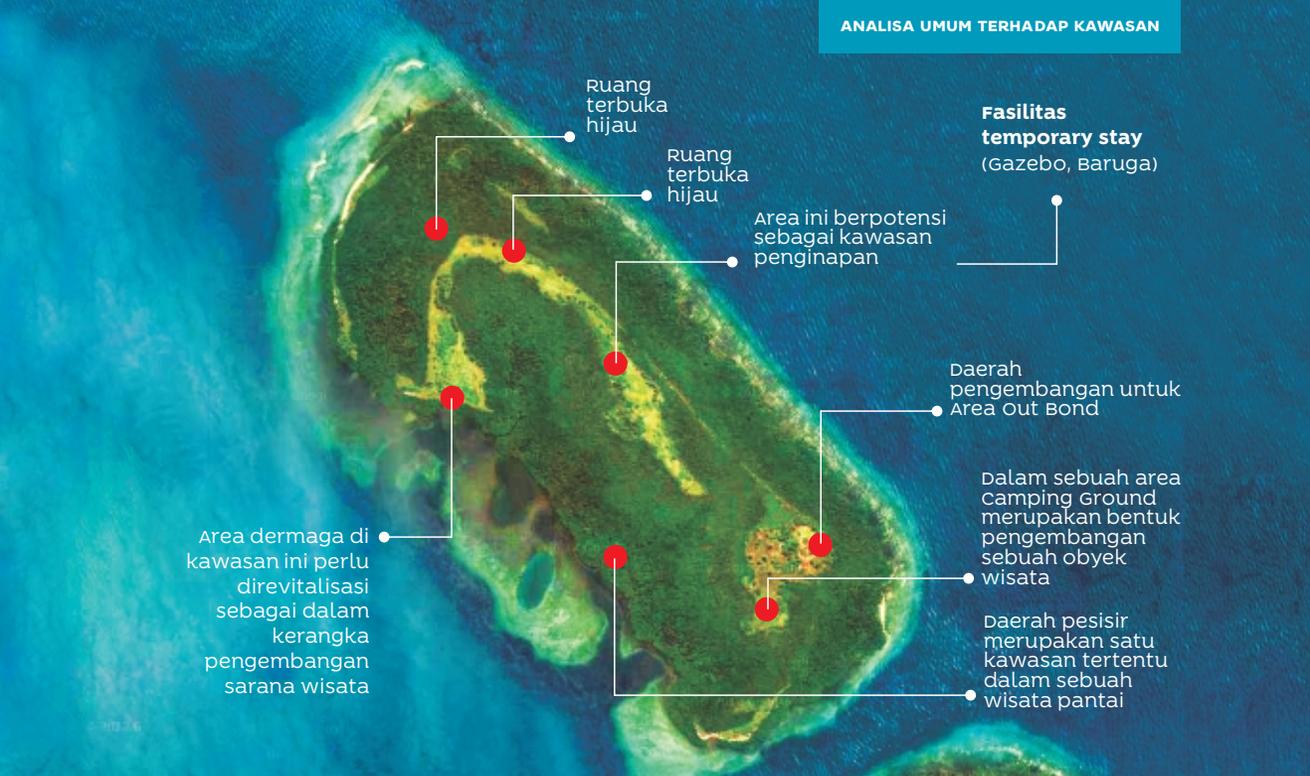


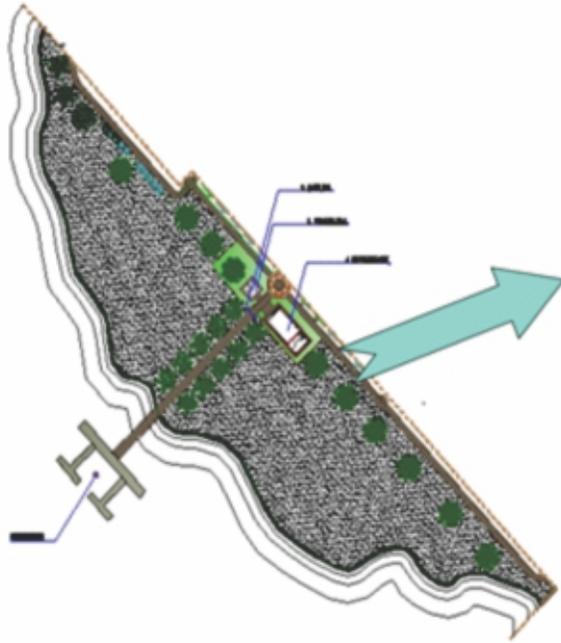
keindahan bawah laut yang akan dikembangkan menjadi obyek wisata menyelam

## Rencana Pengembangan Gili Sulat-Gili Lawang



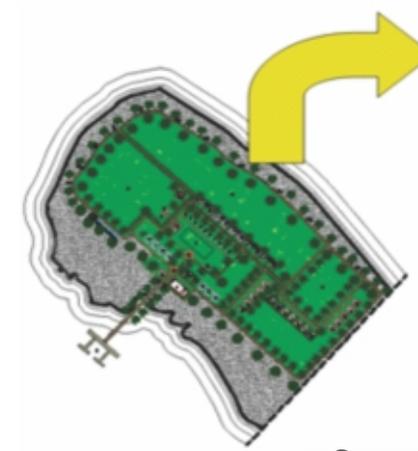
## ANALISA UMUM TERHADAP KAWASAN





### Kawasan Pelabuhan dan Daerah Pesisir

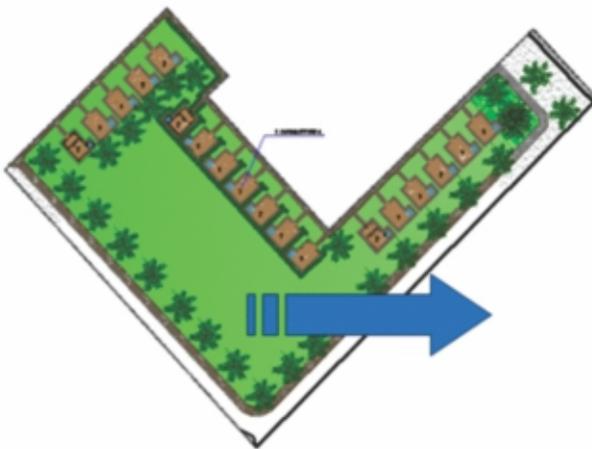
- Pelabuhan merupakan sebuah kawasan strategis dalam menunjang sebuah obyek wisata yang ada, sehingga dalam perencanaan kawasan ini, fungsi dermaga tersebut supaya lebih dimaksimalkan
- Pada bagian lain dalam kawasan ini adalah daerah pesisir yang terletak dalam satu area dengan pelabuhan, dimana fungsi pendukung dalam area ini akan nampak pada tata letak kawasan pesisir dengan pelabuhan



### Sarana Pendukung Lainnya



Ada beberapa sarana pendukung yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memilih tempat peristirahatan dalam kawasan wisata ini. Diantaranya Gazebo atau Barugak. Barugak ini akan menjadi tempat peristirahatan sementara bagi para pengunjung yang tidak menginap, namun tidak akan mengurangi rasa nyaman dalam berwisata.

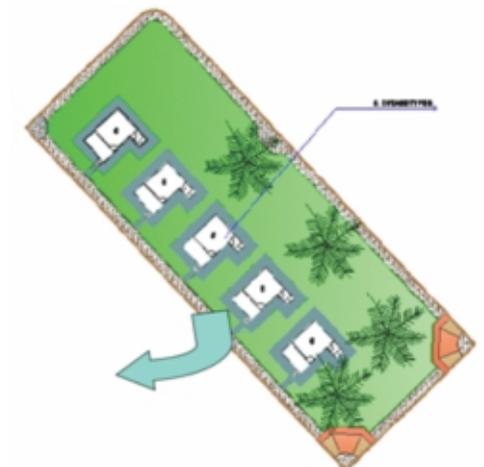


### Area Penginapan dan Camping Ground

Dalam kawasan ini, camping ground merupakan sebuah area yang erat sekali hubungannya dengan tempat penginapan. Oleh karena menjadi satu kesatuan dalam fungsi, maka dalam perencanaan ini keduanya dijadikan satu dalam satu kawasan

### Area Cottage

gambaran umum: cottage merupakan bangunan tempat menginap untuk para wisatawan yang memerlukan kunjungan wisata lebih dari sehari



## BOX 3

### Potensi Ekowisata dan Edukasi Kawasan Konservasi berbasis spesies (penyu)



#### **Nama Kawasan**

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Sukabumi (Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan)

#### **Dasar Hukum**

- Kawasan Konservasi Pesisir Pantai Pangumbahan dicadangkan dengan status Taman Pesisir melalui pencadangan SK Bupati Sukabumi Nomor 523/Kep.639-Dislutkan/2008, tanggal 31 Desember 2008, kemudian direvisi melalui SK No. 523/Kep.621-Dislutkan/2012.
- Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 523/851.A/Dislutkan-08 tanggal 30 April 2008 perihal Pengelolaan Penyu Pantai Pangumbahan.
- Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 523/932.A/Dislutkan-09 tanggal 16 April 2009 perihal Pengelolaan Konservasi Penyu di Pantai Pangumbahan.

#### **Luas Kawasan**

Kawasan Konservasi Perairan ini memiliki luas 2.660,646 Ha.

#### **Letak Geografis dan Administratif**

Kawasan Konservasi Pesisir Pantai Pangumbahan merupakan bagian dari Kecamatan Ciracap. Secara administratif, Desa Pangumbahan berbatasan dengan Cagar Alam (BKSDA Cikepuh) dan Desa Gunung Batu di sebelah Utara, sebelah Timur dengan Desa Gunung Batu, sebelah Timur dengan Desa Gunung Batu dan Desa Ujung Genteng, dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.

#### **Keanekaragaman Hayati**

Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), Penyu Pipih (*Narator depressus*), Penyu Hijau (*Cheloniemydas*)

#### **Potensi Pariwisata**

Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dapat dijadikan tempat wisata minat khusus yakni *turtle watching* (melihat penyu bertelur), pelepasan tukik dan wisata

## Penutup – Pengelolaan Kawasan Konservasi ke Depan *Harapan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat atas Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*

kolam sentuh. Di kawasan ini juga telah dibangun pusat informasi yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata pendidikan dalam rangka memperkenalkan konservasi penyu kepada para pelajar-mahasiswa.

### Aksesibilitas

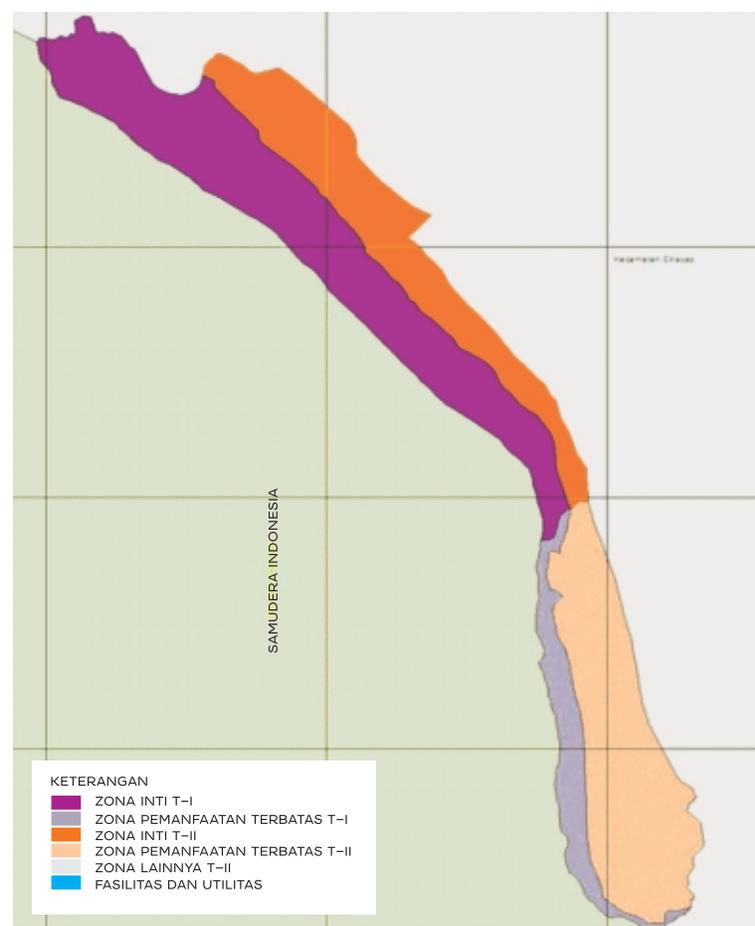
Kawasan Konservasi Pesisir Pantai Pangumbahan dapat diakses melalui berbagai rute, yaitu:

1. Rute dari Bogor menggunakan jalan darat menuju Palabuhanratu dengan waktu tempuh 2-3 jam.
2. Rute dari Lebak melalui jalur selatan menggunakan jalan darat menuju Palabuhanratu.
3. Rute dari Cianjur menggunakan jalan darat menuju Palabuhanratu dengan waktu tempuh 1-2 jam.
4. Untuk mencapai wilayah Kawasan Konservasi Pesisir Pantai Pangumbahan dapat diakses dengan jalan darat dari Palabuhanratu.

### Status Pengelolaan

Taman Pesisir Pangumbahan saat ini telah memiliki rencana pengelolaan dan zonasi serta UPTD pengelola kawasan yang sudah operasional. Sejumlah sarana dan prasarana juga telah diadakan untuk mendukung pengelolaan seperti Pusat Informasi, Pos Jaga, Gerbang kawasan, aula dsb. Sejumlah Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga telah berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan seperti dari PT Bio Farma dan PT Astra Daihatsu Motor.

### Peta Kawasan



**Kawasan** konservasi perairan maupun kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkembang di Indonesia niscaya tidak hanya terhenti dalam capaian luasan semata, namun pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan yang “efektif” adalah harapan yang senantiasa terus digapai perwujudannya, hingga pada akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat sebagai benefit pengelolaan kawasan konservasi yang lestari.

Program-program strategis untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, efektif dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat terus dilakukan berbagai upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi, antara lain: perlindungan habitat dan populasi biota perairan, rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kerjasama dan/jejaring konservasi. Beberapa upaya akselerasi efektivitas pengelolaan antara lain melalui *Pilot Project* Pengelolaan KKP/KKP3K, program ini merupakan program percepatan pengelolaan KKP/KKP3K di daerah untuk perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata berbasis konservasi, dalam hal fasilitasi penguatan rencana pengelolaan, kelembagaan dan SDM, pembangunan infrastruktur kawasan maupun pengembangan sistem pengelolaan kawasan yang terpadu. Selain itu, beberapa kawasan konservasi juga disiapkan sebagai Center of Excellence, yang merupakan kawasan terpadu untuk Pusat Penelitian, Training, Bisnis, entertainment, jasa lingkungan, dan lain-lain. Ke depan, penilaian efektivitas pengelolaan KKP/KKP3K melalui perangkat E-KKP3K dapat

# Lampiran Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil

(DATA & INFORMASI – 2012)



dikembangkan menjadi mekanisme Awards sebagai apresiasi untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan laut daerah yang efektif.

Mengelola secara kolaboratif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif pada prakteknya bukan merupakan hal yang sederhana, perlu komitmen dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkannya. Pengelolaan kawasan konservasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan kewenangannya, melalui perantara masyarakat secara partisipatif bagi peningkatan kesejahteraannya. Semoga perwujudan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang Efektif untuk mendukung perikanan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat segera dapat tercapai. (SJI)

**Konservasi** saat ini telah menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Data direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan menunjukkan bahwa hingga Bulan Juni 2012 Indonesia memiliki kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 15,78 juta hektar (tabel 1). Jumlah ini melampaui target luas kawasan konservasi yang tertuang dalam Renstra KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010–2014 yakni seluas 15,5 juta hektar. Capaian ini merupakan dukungan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun pemerintah daerah termasuk masyarakat atas komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mewujudkan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020 yang disampaikan kepada dunia dalam event World Ocean Conference di Manado Tahun 2009. Dari jumlah kawasan seluas 15,78 juta hektar tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi dan memfasilitasi seluas ± 11 juta hektar, sedangkan ± 4,6 juta hektar diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan. Atas capaian ini diantaranya, belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperoleh penghargaan Valuing Nature Award atas kepemimpinannya dalam mengenali pentingnya sumberdaya alam dan bekerja untuk melestarikannya.

Sesungguhnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak semata-mata fokus pada penambahan luas kawasan konservasi saja tetapi juga terus bekerja keras bagaimana mengembangkan dan mengelolanya secara efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, langkah nyata yang telah ditempuh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah dengan pengembangan Pedoman Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (E-KKP3K).

Tabel 1. Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Juni 2012

No	Kawasan Konservasi	Jum. Kawasan	Luas (Ha)
<b>A</b>	<b>Inisiasi Kementerian Kehutanan</b>	<b>32</b>	<b>4,694,947.55</b>
	Taman Nasional Laut	7	4,043,541.30
	Taman Wisata Alam Laut	14	491,248.00
	Suaka Margasatwa Laut	5	5,678.25
	Cagar Alam Laut	6	154,480.00
<b>B</b>	<b>Inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah</b>	<b>76</b>	<b>11,089,181.97</b>
	Taman Nasional Perairan	1	3,521,130.01
	Suaka Alam Perairan	3	445,630.00
	Taman Wisata Perairan	6	1,541,040.20
	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	66	5,581,381.76
	<b>Jumlah Total</b>	<b>108</b>	<b>15,784,129.52</b>

Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utama yakni: perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi. Upaya ini sedikitnya dapat dilakukan melalui tiga strategi pengelolaan yaitu:

- Melestarikan lingkungannya, melalui berbagai program konservasi;
- Menjadikan kawasan konservasi sebagai penggerak ekonomi, melalui program pariwisata alam perairan dan pendanaan mandiri yang berkelanjutan;
- Pengelolaan kawasan konservasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi mutlak untuk dilakukan;

Dengan demikian, kunci keberhasilan pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah melalui pengelolaan kolaboratif. Upaya-upaya pengelolaan perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan kawasan konservasi yang terkelola secara efektif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### A. Kawasan Konservasi Perairan Laut - Inisiasi Kementerian Kehutanan

##### 1. TAMAN NASIONAL LAUT (TNL)

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM
1	Sulawesi Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	89,065.00	Kepmen Kehutanan Nomor: 730/Kpts-II/1991 Tanggal: -10-1991
2	Sulawesi Selatan	Taman Nasional Laut Taka Bonerate	530,765.00	Kepmen Kehutanan Nomor: 92/Kpts-II/2001 Tanggal: 26-2-2001
3	Irian Jaya	Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih	1,453,500.00	Kepmen Kehutanan Nomor: 8009/Kpts-II/2002 Tanggal: 29-8-2002
4	DKI Jakarta	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	107,489.00	Kepmen Kehutanan Nomor: 8310/Kpts-II/2002 Tanggal: 13-6-2002
5	Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Laut Wakatobi	1,390,000.00	Kepmen Kehutanan Nomor: 7661/Kpts-VI/2002 Tanggal: 19-8-2002
6	Jawa Tengah	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	110,117.30	Kepmen Kehutanan Nomor 74/Kpts-II/2001 Tanggal: 15-3-2001
7	Sulawesi Tengah	Taman Nasional Laut Kepulauan Togean	362,605.00	Kepmen Kehutanan Nomor: Sk.418/Menhut-II/2004
<b>TOTAL</b>			<b>4,043,541.30</b>	

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi DEPHUT 2004 dan sudah direvisi

#### 2. TAMAN WISATA ALAM LAUT (TWAL)

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	Maluku Tengah	TW. Pulau Kasa	1,100.00	Men. Kehutanan No. 653/Kpts-Um/10/78; Tgl. 25-10-1978	Burung Maleo, Biawak Ambon, Terumbu Karang, Ikan Hias
2	Kalimantan Timur	TL. P. Samama Sangalaki	280.00	Men. Pertanian No.604/Kpts-Um/8/1982, Tgl 19-08-1982	Peneluran penyu hijau, belimbing, vegetasi mangrove
3	DI. Aceh	TL. Pulau Weh Sabang	3,900.00	Men. Kehutanan No. 923/Kpts-II/UUm/12/82, Tgl. 27/12/1982	Trb. karang, vegetasi mangrove, ikan hias, brbgai satwa dilindungi
4	Nusa Tenggara Timur	TWAL Teluk Maumere	59,450.00	Men. Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987, Tgl. 21-04-1987	Trb karang, pasir putih, duyung, burung air, biawak, rusa, babi, hutan mangrove, lumba-lumba
5	Banten	TWA. Pulau Sangiang	720.00	Men. Kehutanan No. 698/Kpts-II/91, Tgl. 12-10-1991	Terumbu karang, ikan hias
6	Nusa Tenggara Timur	TWL. Teluk Kupang,	50,000.00	Men. Kehutanan No.18/Kpts-II/1993, Tgl. 28-01-1993	Trb karang, ikan hias, pdg lamun, duyung, biawak, buaya muara, kima, burung air, mangrove
7	Maluku Tengah	TW. Pulau Pombo	998.00	Men. Kehutanan No. 329/Kpts-II/1996, Tgl.30-07-1996	Terumbu/ikan karang, mamalia laut, burung Pombo (Endemik)
8	Nusa Tenggara Timur	TWA. Tujuh belas pulau	9,900.00	Men. Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996, Tgl. 16-09-1996	Trb karang, 27 jenis ikan karang, mamalia laut, serta jalur lintasan migrasi paus
9	DI Aceh	TWA Kepulauan Banyak	227,500.00	Men. Kehutanan No. 596/Kpts-II/1996, Tgl. 16-9-1996	Trb karang, moluska, mamalia laut, peneluran penyu, tempat wisata, rumput laut, mangrove, burung air
10	Nusa Tenggara Barat	TL. P. Moyo	6,000.00	Men. Kehutanan No. 308/Kpts-II/1996, Tgl. 29-9-1996	Trb karang, ikan karang, burung air, populasi rusa timor, babi hutan, vegetasi mangrove, dive site
11	Nusa Tenggara Barat	TWA. Pulau Satonda	2,600.00	Men. Kehutanan No. 22/Kpts-II/1998, Tgl. 22 Januari 1998	Laguna, moluska dilindungi, trb karang, burung <sup>2</sup> air dilindungi.
12	Maluku Tengah	TWA P. Marsegu	11,000.00	Men. Kehutanan No. 114/Kpts-II/1999 Tgl. 5-03-1999	Keanekaragaman sda laut yang tinggi, ikan karang, rumput laut, panorama bawah laut
13	Sulawesi Tenggara	TWA Teluk Lasolo	81,800.00	Men. Kehutanan No. 451/Kpts-II/1999, Tgl. 17-6-1999	Lokasi peneluran penyu hijau, penyu sisik, kima sisik
14	Sulawesi Tenggara	TWAL. Kep. Padamarang	36,000.00	Men. Kehutanan No. 94/Kpts-II/2003 Tgl. 19-03-2003	Terumbu karang (16 spesies), Ikan Karang (13 spesies), Keanekaragaman hayati Laut
<b>TOTAL</b>			<b>491,248.00</b>		

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi DEPHUT 2004 dan Surat DEPHUT 2009

#### 3. SUAKA MARGASATWA LAUT (SML)

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	DKI Jakarta	SM. P. Rambut dan Perairan	90.00	Men. Hutbun No. 275/Kpts-II/1999 Tgl. 7-5-1999	
2	Kalimantan Timur	SM. P. Semama Prov. Kaltim Balai KSDA Kaltim	220.00	Men. Pertanian No. 604/Kpts-Um/8/82, Tgl. 19-08-1982	Terumbu karang, peneluran penyu
3	Irian Jaya	SM Pulau Sabuda Tataruga Provinsi Irian Jaya BKSDA Irian Jaya BKSDA Irian Jaya II	5,000.00	Men. Kehutanan No. 82/Kpts-II/1993, Tgl. 16-02-1993	Terumbu karang, peneluran penyu, tempat berkembangbiak jenis-jenis burung air, burung migran serta daerah lintasan migrasi ikan paus
4	Jawa Barat	SM. Sindangkerta Kec. Cipatujah, Kab Tasikmalaya provinsi Jawa Barat Balai KSDA Jabar II	90.00	Men. Kehutanan No. 6964/Kpts-II/2002 Tgl. 17 Juli 2002	Keanekaragaman hayati berupa: biota laut, terumbu karang dan habitat penyu
5	Irian Jaya	SML Jamursbamede	278.25	Men. Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 Tgl. 14 Mei 1999	Terumbu karang, habitat Penyu Belimbing
<b>TOTAL</b>			<b>5,678.25</b>		

Sumber: Buku Informasi DEPHUT 2004 dan Surat DEPHUT 2009

#### 4. CAGAR ALAM LAUT (CAL)

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	Kalimantan Barat	CAL Kepulauan Karimata	77.000,00	Men. Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985; 27-12-1985	Terumbu karang, mangrove, duyung, ikan hias
2	Lampung	Cagar Alam P. Anak Krakatau	11.200,00	Men. Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990; 26-2-1990	Terumbu karang, gunung vulkanik, panorama alam, ikan hias
3	Jawa Barat	CAL Leuweng Sancang	1.150,00	Men. Kehutanan No. 682/Kpts-II/1990; 17-11-1990	Terumbu karang
4	Jawa Barat	CAL Pananjung Pangandaran	470,00	Men. Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990; 8-5-1990	Terumbu karang
5	Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Riung	2.000,00	Men. Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996; 16-9-1996	Variasi vegetasi darat, berbagai jenis tumbuhan bakau, mamalia darat, berbagai jenis burung
6	Papua Barat	CAL Teluk Sansapor	62.660,00	Men. Kehutanan No. 820/Kpts-II/1982; 10-10-1982	Terumbu Karang
<b>TOTAL</b>			<b>154.480,00</b>		

Sumber: Buku Informasi Kawasan Konservasi DEPHUT 2004 dan Surat DEPHUT 2009

#### B. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah

##### 1. TAMAN NASIONAL PERAIRAN (TNP)

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya Propinsi Nusa Tenggara Timur	3.521.130,01	Men. Kelautan dan Perikanan No: Kep.38/Men/ 2009, tgl 8 Mei 2009	Terumbu Karang, migrasi paus, cetacean, dll
<b>TOTAL</b>			<b>3.521.130,01</b>		

##### 2. SUAKA ALAM PERAIRAN (SAP)

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	Maluku Utara, Maluku	Suaka Alam Perairan Kep. Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku*)	114.000,00	Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.63/Men/2009 Tgl. 3 September 2009	sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi berupa terumbu karang, mangrove, litoral, dan rumput laut
2	Papua Barat	Suaka Alam Perairan Kep. Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat*)	60.000,00	Kep. Men Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.64/Men/2009 Tgl. 3 September	sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi berupa terumbu karang, mangrove, litoral, dan rumput laut
3	Papua Barat	Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Prop Papua Barat*)	271.630,00	Kep. Men Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.65/Men/2009 Tgl. 3 September 2009	potensi dan jenis biota laut yang cukup tinggi dan dilindungi seperti nautilusperongga ( <i>nautilus pompilus</i> ), triton terompet ( <i>chelonis tritonis</i> ), dan keong kepala kambing ( <i>cassis conmuta</i> )
<b>TOTAL</b>			<b>445.630,00</b>		

\*) Kawasan konservasi hasil penyelarasan Dephut dan DKP dengan berita acara serah terima: BA.01/Menhut-IV/2009-BA.108/Men.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009

##### 3. TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP)

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
1	Sulawesi Selatan	Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan laut di sekitarnya di Prov Sulsel*)	50.000,00	Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.66/Men/2009 Tgl. 3 September 2009	keanekaragaman sumber daya alam laut yang cukup tinggi: berbagai jenis terumbu karang, ikan hias, ikan karang, penyu, moluska, dan panorama bawah laut yang sangat indah
2	Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Perairan P. Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Prov NTB*)	2.954,00	Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.67/Men/2009 Tgl. 3 September 2009	keanekaragaman jenis biota laut dan vegetasi pantai seperti karang lunak ( <i>heliopora sp</i> ), asam laut ( <i>tamarindus indria</i> ), waru laut ( <i>hibiscustiliaceus</i> ), ketapang ( <i>terminalia cattappa</i> )

NO	PROPINSI	NAMA	LUAS (Ha)	DASAR HUKUM	POTENSI
3	Papua	Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya di Prov. Papua*)	183.000,00	Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 68/Men/2009 Tgl. 3 September 2009	keanekaragaman terumbu karang berupa <i>acropora sp</i> , <i>sarcophyton sp</i> , <i>sinularia sp</i> , serta biota laut lainnya seperti <i>chaetodon linealatus</i> , <i>parupeneus bifasciatus</i> , dan <i>scarus sp</i>
4	Maluku	Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku*)	2.500,00	Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.69/Men/2009 Tgl. 3 September 2009	Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi berupa formasi batu karang yang berwarna-warni dengan kehidupan hayati bawah air ( <i>marine life</i> ) yang bernilai khas
5	Sumatra Barat	Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut di sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat*)	39.900,00	Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.70/Men/2009 Tgl. 3 September 2009	Potensi sumber daya laut dimana fungsi ekologi dan manfaat ekonomisnya masih sangat penting
6	Kepulauan Riau	Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Prov Kep. Riau	1.262.686,20	Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.35/Men/2011 Tgl 6 Juli 2011	Terumbu Karang, Keanekaragaman biota laut, Napoleon, Penyu, lumba-lumba, panorama alam pesisir dan pulau-pulau kecil
<b>TOTAL</b>			<b>1.541.040,20</b>		

\*) Kawasan konservasi hasil penyelarasan Dephut dan DKP dengan berita acara serah terima: BA.01/Menhut-IV/2009-BA.108/Men.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009



#### 4. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAERAH

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
1	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Penyu	733,00	Pesisir Selatan/ Sumbar	No.53 Thn 2003 Tgl.19-5-2003 Penetapan Pulau Penyu sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Laut		Penyu Hijau, Penyu Belimbing, Penyu Sisik, dan Terumbu Karang	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
2	Kawasan Konservasi Perairan Senayang Lingga	419,00	Lingga/ Kep. Riau	No.71/III/2002 Tgl.4-3-2002 Penetapan Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang di Kec. Senayang-Lingga		Terumbu Karang & Hutan Bakau	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
3	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Biawak	720,00	Indramayu/ Jabar	No.71/III/2002 Tgl.4-3-2002 Penetapan Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang di Kec. Senayang-Lingga		Terumbu Karang, Biawak	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
4	Kawasan Konservasi Perairan Trenggini, Sambelia	9.162,34	Lombok Timur/ NTB	No188.45/332/KP /2012		Terumbu Karang dengan dominasi Hard Coral		-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
5	Kawasan Konservasi Perairan Gili Banta	43.750,00	Bima/NTB	No. 08 Thn 2005 Tgl. 02 -01-2005 Penunjukan Kawasan Gili Banta sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kab. Bima		Terumbu Karang dan ekosistem terkait lainnya	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
6	Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar	400.008,30	Alor/NTT	No.12 Thn 2006 Tgl. 17 juli 2006 perubahan dengan SK no 6 th 2009 tgl 6 Maret 2009 Penetapan Selat Pantar Sebagai KKLD		Jalur migrasi Ikan Paus dan Keanekaragaman ekosistem Terumbu Karang	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
7	Kawasan Konservasi Perairan Bengkayang (Pulau Randayan dan pulau-pulau sekitarnya)	15.300,00	Bengkayang/Kalbar	No.220 Thn 2004 Tgl.16-12-2004		Terumbu Karang dengan dominasi Hard Coral, Acropora & Non Acropora, Padang lamun	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
8	Kawasan Konservasi Perairan Berau	1.271.749,00	Berau/Kaltim	No.70 Thn 2004 Tgl.8-4-2004 No. 31 Thn 2005 Tgl. 27-12-2005		Terumbu Karang, Hutan Tropis & Ekosistem Danau dengan biota yang unik (Ubur-ubur dll)	Level 2 (Kuning)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
9	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan	22.099,00	Kotabaru/Kalsel	No. 523.4/918-PPPK/LAPERIK, Tgl. - 11-2005		Terumbu karang, Vegetasi mangrove, Biota laut.	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
10	Kawasan Konservasi Perairan Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya	27.936,00	Muna/Sulteng	No.157 Thn 2004 Tgl.3-5-2004		Terumbu Karang, Mangrove, Biota khas endemik	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
11	Kawasan Konservasi Perairan Buton	283.577,33	Buton/Sultra	No. 578 Thn 2005 Tgl. 18 -11- 2005 No 938 Tahun 2011. Ttg Pengembangan KKLD Kab. Buton		Terumbu Karang	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
12	Kawasan Konservasi Perairan Sorong (Perairan dan Pesisir Distrik Abun)	26.795,53	Tambrawa/Papua Barat	No. 142 Thn 2005 Tgl.08-12-2005		Penyu Belimbing	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
13	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KK-P3K) Ujungnegoro - Roban	4.015,20	Batang/Jateng	No. 523/283/Thn 2005 Tgl 15-12-2005 Perubahan No 523/306/2011 Ttg Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Kab. Batang	Kep.29/ MEN/2012 Ttg Penetapan KKP3K/ Ujungnegoro-Roban Kab Batang Jateng	Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Udang Lobster, hiu Macan, Lumba-lumba darat (Pesut), Cemara laut, nyamplung Ketapang Laut, Bakau dan Api-api	Level 2 (Kuning)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Sudah ditetapkan, 2012 -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
14	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)	50.000,00	Simeulue/Aceh	No. 523.1/104/ Tahun 2006 Tgl 9 -4- 2006		Terumbu karang, Vegetasi mangrove, Biota laut.	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
15	KK-P3K Pulau Kasiak	11.525,89	Pariaman/Sumbar	No.296/KEP/WAKO -2006, 29 Juni 2006 dan No. 297/KEP/ WAKO-2006:29/6/ 2006: P. Ujung, P. Tangah & P. Angso sbg daerah Konservasi Trb Karang & Wisata bahari & P. Kasiak, Konservasi Penyu dan Wisata Bahari		Ikan Hias, Biota laut, terumbu karang di P. Ujung, P. Tangah, dan P. Angso; Penyu di P. Kasiak	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan & Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
16	Kawasan Konservasi Perairan Desa Olele	2.460,00	Bone-bolango/ Gorontalo	No. 165 Thn 2006 Tgl. 6 Nov 2006		Terumbu karang, Karang, Teripang dan Ikan Karang, Ikan Endemik	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
17	Kwsan Konservasi Perairan Raja Ampat	993.740,00	Raja Ampat/Papua	PP Bupati Raja ampat No 66 thn 2007 Tgl 14 Juni 2007 & Peraturan Bupati Raja Ampat no 05 tahun 2009 tgl 16 April 2009		Terumbu karang, (45 % dari luasan terumbu karang di Raja ampat	Level 2 (Kuning)	-Pengelola: UPTD -SK Pengelola: ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Sudah, proses penetapan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
18	Kwsan Konservasi Perairan Kaur (Linau, Merpas, dan Sekunyit)	50.308,39	Kaur/Bengkulu	No.180 thn 2007 Tgl 20 Juni 2007		Beragam biota laut yang berasosiasi bersama terumbu karang	Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengel. dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
19	Kwsan Konservasi Perairan payau Jorong Maligi	10,00	Pasaman Barat/ Sumbar	No.188.45/326/ BUP-PASBAR/ 2007 Tgl 7 Juni 2007		kawasan mangrove sebagai habitat plasma nutfah jenis kepiting, kerang udang	Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengel. dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
20	Kwsan Konservasi Perairan Pulau Similak	200,00	Nunukan/ Kaltim	No.44 thn 2007 Tgl 2 Feb 2007		Plasma nutfah flora dan fauna	Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengel. dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
21	Kawasan Konservasi Perairan Bintan	472.905,00	Bintan/ Kep.Riau	No. 261/VIII/2007 Tgl 23 Agustus 2007		Kawasan kegiatan perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari	Level 2 (Kuning)	-Pengelola: UPTD -SK Pengelola: ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
22	Kawasan Konservasi Perairan Batam	66.867,00	Batam/ Kep.Riau	SK Walikota Batam No. Kpts 14/HK/VI/2007 tgl 4 Juni 2007		Kawasan kegiatan perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari	Level 2 (Kuning)	-Pengelola: UPTD -SK Pengelola: ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Penetapan Kawasan: Sudah diusulkan, prses penetapan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
23	Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut	172.191,00	Kep. Mentawai/ Sumbar	SK Bupati no. 188 45-142 tahun 2012		terumbu karang, mangrove.	Level 2 (Kuning)	-Pengelola: UPTD -SK Pengelola: ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Penetapan Kawasan: Sudah diusulkan, prses penetapan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
24	Kawasan Konservasi Perairan Natuna	142.997,00	Natuna/ Kep.Riau	SK Bupati no. 299 tahun 2007 tgl 5 September 2007 luas 116600 perubahan SK no 378 tahun 2008 luas 142997		Kwsan Pulau Tiga-Sedanau dan laut sekitarnya untuk kegiatan Perikanan Berkelanjutan (34900 Ha), Bungalow Utara sektor perikanan (47600 Ha), Pesisir Timur Bungalow diprioritaskan wisata bahari (34.100 Ha)	Level 2 (Kuning)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
25	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil P. Berhala, P. Sokong Nenek dan P.Sokong Siembah	1.240,35	Serdang Bedagai/ Sumut	SK Bupati Sergai No. 97/523/2008		Terumbu Karang, Penyu.	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
26	Kawasan Konservasi Perairan Nias	29.000,00	Nias/ Sumut	SK Bupati no. 050/139/K/2007		Wisata bahari, perikanan berkelanjutan (terumbu karang, mangrove)	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
27	Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Tapanuli Tengah	81.243,00	Tapanuli Tengah/ Sumut	Sk Bupati No. 1421/DKP/Th 2007		Perikanan berkelanjutan, wisata bahari (terumbu Karang)	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
28	KKP Banggai Kepulauan (P. Tolobundu, P. Bangdang Besar, P. Makaliu, P. Maringkih, P. Pesopo, P. Somit, P. Banggai)	32.500,00	Banggai Kepulauan/ Sulteng	SK Bupati Nomor 5408 tanggal 20 September tahun 2007		Konservasi pendidikan, penelitian dan ekonomi serta kesejahteraan rakyat (terumbu karang, ikan endemik banggai cardinal fish))	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
29	Taman Pesisir Ngambur dan Taman Pulau Betuah	5.741,00 dan 9.718	Lampung Barat/ Lampung	SK Bupati Nomor: B/206/kpts/11-12/2012		Pelestarian Penyu, Perikanan Berkelanjutan, Ekowisata bahari, Terumbu Karang	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Sudah, proses penetapan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
30	Kawasan Konservasi Perairan Ciamis	29.823,99	Ciamis/ Jabar	Peraturan Bupati Ciamis nomor: 15 Tahun 2008		Perikanan berkelanjutan, wisata bahari, penelitian dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan SD Laut scr lestari (trmbu karang, mangrove)	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
31	Kawasan Konservasi Perairan Kaimana	597.747,00	Kaimana/ Papua Barat	Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2008		Terumbu Karang, mangrove, paus Lumba-lumba, padang lamun, penyu dan keaneka ragaman hayati laut lainnya	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
32	Kawasan Konservasi Perairan Biak Numfor	24.910,00	Biak Numfor/ Papua	SK. Bupati nomor: 21 tahun 2009 tanggal 17 April 2009 Penetapan Kawasan Konservasi laut Daerah Kabupaten Biak Numfor		Terumbu karang, padang Lamun, mangrove	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
33	KK-P3K – Taman Pesisir Pantai Penyu Pa-ngumbahan, Kabupaten Sukabumi	2.660,00	Sukabumi/ Jabar	SK. Bupati nomor: 523/Kep.621-Dislutkan/2012		Penyu dan habitatnya	Level 3 (Hijau)	-Pengelola: UPTD -SK Pengelola: ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Sudah, proses penetapan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
34	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	171.937,71	Pangkep/ Sulsel	Keputusan Bupati pangkajene dan Kepulauan No. 180 th 2009 tgl 5 Januari 2009, dan No.158 Tahun 2010 tgl 8 Mei 2010 ttg Penetapan KKLD Kab. Pangkep		Terumbu karang, padang Lamun.	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
35	Kawasan Konservasi Perairan Pulo Kauna Kayuadi @ Pulo Pasi Gusung	3.983,00 dan 5.018,00	Selayar/ Sulsel	Kep Bupati Kep. Selayar No. 465/IX/ 2011 dan No. 466/ IX/ 2011				-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Sudah diusulkan, proses -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
36	Kawasan Konservasi Perairan Nias Selatan	56.000,00	Nias Selatan/ Sumut	Keputusan Bupati Nias Selatan No: 523/371/K/2008 tgl 5 Des 2008 Penetapan Kawasan Konservasi laut Daerah (KKLD) Kabupaten Nias Selatan		Pelestarian Penyu, Perikanan Berkelanjutan, Ekowisata bahari, Terumbu Karang	Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
37	Kawasan Konservasi Perairan Kab. NAD Jaya	175,00	Aceh Jaya/Aceh	Keputusan Bupati NAD Jaya Nomor: 3 Tahun 2010 tgl 21 Januari 2010 Pembentukan Kawasan Konservasi Daerah Kabupaten NAD Jaya			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
38	Kawasan Konservasi Perairan Kawasan Bina Bahari	200,00	Aceh Besar/Aceh	Keputusan Bupati NAD Besar Nomor: 43 Tahun 2010 tgl 15 Februari 2010 Pembentukan Kawasan Konservasi Daerah Kabupaten NAD Besar			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
39	Kawasan Konservasi Perairan Pandeglang	7.391,00	Pandeglang/Banten	Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 660/Kep.369 - Huk/2007 Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
40	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Sepanjang	118.406,20	Sumenep/Jatim	Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 08 Thn 2010 Pen-cadangan Perairan Kepulauan Sepanjang dan sekitarnya sebagai kawasan Konservasi Laut Daerah			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
41	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Banggai	16,00	Banggai/Sulteng	Keputusan Bupati Banggai Nomor: 523/1209/Dislutka n Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai		mangrove, lamun, terumbu karang @ wisata bahari	Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
42	Kawasan Konservasi Perairan Batang Gasan	684,00	Padang Pariaman/Sumbar	Kep Bupati Padang Pariaman No: 02 KEP/BPP-2010 Penetapan Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kecamatan Batang Gasan, Kab. Padang Pariaman			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
43	Kawasan Konservasi Perairan Suaka Perikanan Ikan Terubuk		Bengkalis/Riau	Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 15 Tahun 2010 Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kab Bengkalis		Ikan Terubuk	Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
44	Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal	53.460,00	Tegal/Jateng	Keputusan Bupati Tegal Nomor: 523/448/2010 Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk di Kab Tegal			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
45	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida	20.057,00	Klungkung/Bali	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 Penunjukan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
46	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Minahasa Selatan	26.000,00	Minahasa Selatan/Sulut	Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 130 Tahun 2007 Penetapan Lokasi KKLK Kab Minahasa Selatan			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
47	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Sikka	42.250,00	Sikka/NTT	Keputusan Bupati Sikka No. 260 /HK/ 2010 Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Sikka			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
48	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara		Luwu Utara/Sulsel	Keputusan Luwu Utara No. 287 Tahun 2010 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
49	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang	3.207,98	Sabang/Aceh	Keputusan Walikota Sabang Nomor 729 Tahun 2010 Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Ada -Renc Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: sudah, proses -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
50	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Lombok Tengah	22.940,45	Lombok Tengah/NTT	Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 2 Tahun 2011 Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Lombok Tengah			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
51	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Mukomuko		Mukomuko/Bengkulu	Peraturan Daerah Kab Mukomuko No. 4 Tahun 2010 KKLK (Pengelolaan Konsevasi Penyu di Kabupaten Mukomuko)			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
52	Kawasan Konservasi Perairan Enggano	37.167,39	Bengkulu Utara/Bengkulu	Peraturan Bupati No Tahun 2010 Kawasan Konservasi Perairan Enggano di Kecamatan Enggano kabupaten Bengkulu Utara			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum diusulkan -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
53	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Bontang	5.121,38	Bontang/Kaltim	Keputusan Walikota Bontang No 112 Tahun 2011 Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
54	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Kramat, Pulau Bedil dan Pulau Temudong kab. Sumbawa	2.000,00	Sumbawa/NTB	Keputusan Bupati Sumbawa No 642 Thn 2011 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan P. Kramat, P. Bedil dan P. Temudong kab. Sumbawa			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
55	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Tanah Bumbu	12.860,14	Tanah Bumbu/Kalsel	Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 327 Tahun 2011 Penetapan Kawasan Perlindungan Laut Daerah di Kab. Tanah Bumbu			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
56	Kawasan Konservasi Perairan/Taman Wisata Perairan Buleleng	14.041,13	Buleleng/Bali	Keputusan Bupati Buleleng No. 523/630/HK/2011 Ttg Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Buleleng			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
57	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (KKP3K) Kabupaten Sumbawa Barat	11.574,00	Sumbawa Barat/NTB	Kpts. Bupati Sumbawa Barat No 849 Thn 2011 Ttg Pencadangan KK Tmn Pssir Penyut Tatar Sepang Sekokang & KK Tmn P. Kecil Gugusan Gili Balu' Poto Tano Sbg KK-P3K Kab Sumbawa Barat			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Ada, proses penyesuaian/review -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
58	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil Sebagai Taman Pulau kecil Kota Padang	1.815,10	Kota Padang/Sumbar	Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011 Tentang Pencadangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Sebagai Taman Pulau kecil Kota Padang			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
59	Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin		Brebes/Jateng	Kpts Bupati Brebes No: 523/177 Th 2007 Ttg Tap DPSD ikan (suaka perikanan) sbg zona penyangga benih ikan di perairan waduk mahalayu kec Banjarharjo dan Waduk Penjalin Kec Paguyangan Kab Brebes			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
60	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana	19.176,98	Bombana/Sultra	Keputusan Bupati Bombana No. 384 Thn 2011 Ttg Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana			Level 1 (merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum ada -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KAB/PROV	DASAR HUKUM		POTENSI	STATUS	KET
				Pencadangan	Penetapan			
61	Kawasan Konservasi Perairan di desa setabu kec. Sebatik barat	74,00	Nunukan/Kaltim	No 188.45/40/II/2012 Tentang Penetapan Lokasi Pencadangan KKP seluas 74 Ha DiDesa Setabu Kecamatan Sebatik Barat			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
62	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung Timur	801,57	Belitung Timur/Kep. Bangka Belitung	No 2.05.5/021/DKP/II/2012: Ttg KKP Gugusan P. Pemestuf Sbg Z. Inti, P. Nangka Sbg Zona Perikanan Berkelanjutan & P. Sandung Sbg Z. Pemanfaatan Mina Wisata Bahari Kab Belitung Timur			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
63	Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur	28,00	Sorolangun/Jambi	No 81 Thn 2011 Penetapan Tanjung Putus Sungai Kutur, Lubuk Bilik Hingga Pulau Tlogo sbg Kawasan Suaka perikanan Arwana Kutur dan Tanjung Putus Hingga Muara S. Serambi Sebagai Zona Penyangga Hulu Serta Muara s. Nilik Hingga Muara sungai kutur sbg Zona Penyangga Hilir Di Desa Moenti Kec Limun Kab Sarolangun			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
64	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan	6.386,46	Halmahera Selatan/Maluku Utara	Nomor 99 Tahun 2012 Pencadangan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya Di Kab. Halmahera Selatan			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
65	Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene	49.000,00	Majene/Sulbar	Nomor 880 /HK/KEP-BUP/III/2012 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan
66	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Pulau Morotai	330,00	Pulau Morotai/Maluku Utara	Nomor 523/42/PM/2012 Penunjukan/Pencadangan Lokasi Kawasan Pulau Rao Sebagai Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Pulau Morotai			Level 1 (Merah)	-Pengelola: DKP Setempat -SK Pengelola: Belum ada -Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Pengesahan Renc. Pengelolaan dan Zonasi: Belum -Usulan Penetapan Kawasan: Belum -Penataan Batas Kawasan: Belum dilaksanakan

## 5. UPAYA KONSERVASI KAWASAN

### 5.1. Suaka Perikanan

NO	KAB/PROP	LOKASI KAWASAN	TYPE/FUNGSI	LUAS (Ha)	KET
1	Jawa Timur: Trenggalek	Pasir Putih	Suaka Ikan	81,00	COFISH
2	Banyuwangi	Kayu Aking	Suaka Ikan	298,23	COFISH
3	NTB: Lombok Timur	Teluk Serewe, Teluk Ekas, Teluk Jukung, Taked Belanting, Taked Pedamekan, Taked Sagena dan Taked Liang Puruk	Suaka Ikan	71,00	COFISH
<b>TOTAL</b>				<b>441,23</b>	

### 5.2. Daerah Perlindungan Laut (DPL)/ Daerah Perlindungan Mangrove (DPM)

NO	KAB/PROP	LOKASI KAWASAN	TYPE/FUNGSI	LUAS (Ha)	KET
1	Sulut: Minahasa	Blongko	DPL (Terumbu dan Mangrove)	25,00	COFISH
2		Talise	DPL Terumbu	22,00	CRMP
		Tumbak	DPL Terumbu	9,00	CRMP
		Tumbak	DPL Mangrove	72,70	CRMP
		Bentenan	DPL Terumbu	30,00	CRMP
		Kali Naun Jaga 3	DPL Terumbu	10,00	CRMP
		Kali Naun Jaga 4	DPL Terumbu	6,00	CRMP
		Serei	DPL Terumbu	6,90	CRMP
		Tanah putih	DPL (Terumbu dan Mangrove)	20,00	CRMP
		Tarabitan	DPL Terumbu	15,00	CRMP
		Pulisan jaga 1	DPL Terumbu	13,70	CRMP
		Pulisan jaga 2	DPL Terumbu	13,60	CRMP
		Gangga 1	DPL Terumbu	26,00	CRMP
		Gangga 2	DPL Terumbu	26,00	CRMP
		Airbanua jaga 1	DPL Terumbu	21,00	CRMP
		Airbanua jaga 2	DPL Terumbu	16,00	CRMP
		Libas	DPL Terumbu	27,00	CRMP
		Libas	DPL (Terumbu dan Mangrove)	131,00	CRMP
		Lihumu	DPL Terumbu	18,00	CRMP
		Maen	DPL Terumbu	49,00	CRMP
		Teremaal	DPL Terumbu	18,00	CRMP
		Maliambao	DPL Terumbu	46,00	CRMP
		Mubune	DPL Terumbu	20,00	CRMP
		Sarawet	DPL Mangrove	90,00	CRMP
		Sonsilo	DPL Mangrove	37,00	CRMP
3	NTB: Lombok Timur	Diselat Alas: Gili lawang, Gili Sulat, Gili Petagan	DPL/DPM	1.317,00	COFISH, KINI TELAH MENJADI KKLD
<b>TOTAL</b>				<b>2.085,90</b>	

## C. Kawasan Konservasi Perairan Daratan

NO	KAB/PROP	STATUS	LUAS	LOKASI	DASAR HUKUM
1	Batang Hari/ Jambi	Zona Inti, Zona Penyangga Hulu, Zona Penyangga Hilir	969,90 m <sup>2</sup> 435,00 m <sup>2</sup> 1.888,50 m <sup>2</sup>	Desa Danau Lamo, Kec. Maro Sebo.	SK. Bupati Batang Hari No. 362 Th. 1998, ttg Penetapan Danau Mahligai Desa Danau Lamo Kec. Maro Sebo sbg Lokasi Suaka Perikanan
2	Batang Hari/ Jambi	Zona Inti, Zona Penyangga dan Zona Ekonomi	500,00 Ha	Desa Napal Sisik, Kec. Muara Bulian.	SK. Bupati Batang Hari No. 189/Th. 2004, ttg Penetapan Kawasan Lebung Napal Sisik Kec. Muara Bulian sbg Lokasi Perikanan Tertutup (Culture Based Fisheries) yang Dilindungi
3	Tanjung Jabung Timur, Jambi	Suaka Perikanan	1.000,000 m <sup>2</sup>	Desa Lambur, Kec. Muara Sabak	SK. Bupati Tanjung Jabur Timur No. 145/Th. 2001, tgl. 23 Agt 2001, ttg Penetapan Lambur Lestari sbg Suaka Perikanan (Reservat) Kec. Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur
4	Tanjung Jabung Timur, Jambi	Suaka Perikanan	1.000,000 m <sup>2</sup>	Ds Mendaharai Ilir, Kec. Mendahara	SK. Bupati Tjg Jabur Timur No. 146/Th. 2001, tgl. 23 Agt 2001, ttg Penetapan Mendahara Lestari sbg Suaka Perikanan (Reservat) Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur
5	Tanjung Jabung Barat/ Jambi	Suaka Perikanan	1.000,000 m <sup>2</sup>	Desa Sungai Dualap, Kec. Betara	SK. Bupati Tanjung Jabur Barat No. 493/Th. 2001, tgl. 11 Des 2001, ttg Penetapan Pantai Ds. Sungai Dualap sbg Suaka Perikanan (Reservat) Di Kec. Betara, Kab. Tj. Jabung Barat
6	Muaro/ Jambi	Suaka Perikanan	1,5 Ha	Desa Arang-Arang, Kec. Kumpe Hulu	SK. Bupati Muaro Jambi No. 271/Th. 2003, tgl. 21 Des 1993, ttg Penetapan Danau Arang-Arang Ds Arang-Arang Kec Kumpe Hulu sbg Lokasi Reservat Ikan (Suaka Perikanan)
7	Bungo/ Jambi	Suaka Perikanan Lubuk Larangan	13,952 m <sup>2</sup> 9,950 m <sup>2</sup>	Desa Rantel, Kec. Pelepat	SK. Bupati Muaro Jambi No. 271/Th. 2003, tgl. 21 Des 1993, ttg Penetapan Danau Arang-Arang Ds Arang-Arang Kec Kumpe Hulu sbg Lokasi Reservat Ikan (Suaka Perikanan)
8	Bungo Tebo/ Jambi	Suaka Perikanan Lubuk Larangan	18,455 m <sup>2</sup> 24,580 m <sup>2</sup>	Ds Teluk Kayu Putih, Kec. Pembantu VII Koto	SK. Bupati Bungo Tebo No. 294/Th. 1997, tgl. 22 Jan 1997, ttg Penetapan Lubuk Teluk Kayu Putih sbg Suaka Perikanan (Reservat) Serta Lubuk Teluk Inti Air Sebelah Ulu dan Lubuk Teluk Luncuran Nago Sebelah Ilir untuk Lubuk Larangan sbg zona Penyangga
9	Sarolangun Bangko/ Jambi	Suaka Perikanan Lubuk Larangan	500 m <sup>2</sup>	Desa Telentam, Kec. Tabir Ulu	SK. Bupati Sarolangun Bangko No. 135/Th. 1996, tgl. 25 Jan 1996, ttg Penetapan Lubuk Batu Ciri Taman Ciri Ds. Telentam Perwakilan Kec. Tabir Ulu sbg Suaka Ikan (Reservat) Serta Lubuk Lanca Bemban Sebelah Ulu dan Lubuk Pauh Sebelah Ilir Untuk
10	Cirebon/ Jawa Barat	Suaka Margasatwa Kura-Kura Belawa	1.000 m <sup>2</sup>	Desa Belawa, Kec. Sedong	SK. Bupati Cirebon No. 522.51/SK.29-PEREK/1993, ttg Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 13/Th. 1997, ttg Pengelolaan Kawasan Lindung
11	Semarang/ Jawa Tengah	Suaka Perikanan Penangkapan Ikan Budidaya Ikan	- - 15Ha	Ds Bejalen, Asinan, Tuntang, Lopait, Kesongo, Sragen, Rowosari, Rowoboni dan Kebondowo	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 25/Th. 2001, tgl. 14 September 2001, tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan Di Rawa Pening
12	Sidoarjo Jawa Timur	Kawasan Lindung	- - - - -	Sempadan air dan sungai Kawasan sekitar rawa dan hutan rawa Sempadan pantai sekitar waduk Ruang terbuka hijau /hutan kota	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 17/Th. 2003, tgl. 18 Juni 2003, tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Sidoarjo
13	Kapuas Hulu/ Kalbar	Kabupaten Konservasi		Kab. Kapuas Hulu	Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 114/Tahun 2004, tentang penetapan Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi.
14	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Teluk Aur, Kec. Bunut Hilir	Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 6/Tahun 2001, tentang Penetapan Danau Nanga Empangau sebagai Danau Lindung
15	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Semaitau, Kecamatan Sematau	Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 55/Tahun 2004, tentang Penetapan Danau Mersedan Desa Semaitau Kecamatan Sematau sebagai Danau Lindung

NO	KAB/PROP	STATUS	LUAS	LOKASI	DASAR HUKUM
16	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Dalam Kecamatan Selimbau	Kep. Bupati Kapuas Hulu No. 69/Tahun 2004, ttg Penetapan Danau Pengulan Desa Dalam Kecamatan Selimbau sebagai Danau Lindung
17	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Nibung Kecamatan Selimbau	Kep. Bupati Kapuas Hulu No.70/Thn 2004, ttg Penetapan Danau Vega Desa Nibung Kec. Selimbau sebagai Danau Lindung
18	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Papua Mendalam Kecamatan Putussibau	Kep. Bupati Kapuas Hulu No.77/Thn 2004, ttg Penetapan Danau Sadong Desa Papua Mendalam Kec. Putussibau sbg Danau Lindung
19	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Ds Jongkong Kiri Hilir, Kec. Embau, Ds Nanga Tuan, Bunut Hilir, dan Bunut Hulu Kec. Bunut Hilir	Kep. Bupati Kapuas Hulu No.79/Thn 2004, ttg Penetapan Lokasi Danau Mersedan di wil. Kab. Kapuas Hulu (Danau Jongkong Kiri Hilar, Peka-yau Siawan, Pulau Begansar, dan Sentajau)
20	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Nanga Tuan Kec. Bunut Hilir	Kep. Bupati Kapuas Hulu No.138/Thn 2004, ttg Penetapan Danau Terduata @ Danau Pulau Danau Dusun Tanjung Entibab Ds. Nanga Tuan Kec. Bunut Hilir sbg Danau Lindung
21	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir	
22	Kapuas Hulu/ Kalbar	Danau Lindung		Desa Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir	Keputusan Bupati Kapuas Hulu No.142/Thn 2004, ttg Penetapan Danau Perantu Ds. Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir sbg Danau Lindung
23	Kotawaringin Timur/ Kalteng	Reservaat	7,0 Ha	Desa Sembuluh, Kec. Danau Sembuluh	SK. Gubernur Kalteng No. 71 Thn 1994, tgl 20 Des 2004, ttg Penetapan Perairan Danau Telaga Bintang di Danau Sembuluh Wil. Ds. Sembuluh I, Kec. Danau Sembuluh, Kab. Kotawaringin
24	Kapuas/ Kalteng	Reservaat	7,5 Ha	Kec. Timpah	SK. Gub. Kalteng No. 72 Thn 1994, tgl 21 Des. 2004, ttg Penetapan Perairan Danau Lapimping Wil. Kec. Timpah, Kab. Kapuas sbg Daerah Reservaat
25	Kota Padang/ Sumbar	Lubuk Larangan	2 Lks	Kel. Bunga Pasang, Sungai Bangek, Kec. Koto Tengah	SK Bupati/Walikota ttg Lubuk Larangan di Prov. Sumbar, diharapkan dpt diselesaikan (diterbitkan) dim thn 2007 melalui anggaran Dana Dekonsentrasi Prov Sumbar Thn 2007
			3 Lks	Irigasi Gunung Nago RT. 01 RW. 01, Irigasi Gunung Nago RT. 01 RW. 02, Kec. Kuranji	
			1 Lks	Irigasi Gnung Nago, Bungo Pasang, Kel. Lambung Bukit, Kec. Pauh	
26	Pesisir Selatan/ Sumbar	Lubuk Larangan	1 Lks	Sungai Lubuk Panjang, Nagari Barung-barung Belantai, Kec. Koto XI Tarusan	Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 117/Tahun 2007, tanggal Mei 2007, tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Tawar di Kabupaten Pesisir Selatan
			1 Lks	Irigasi Bt. Jalamu Kenagarian IV Koto Hile, dan	
			1 Lks	Irigasi Kampung Lb. Nyiur Kenagarian IV Koto Mudiak, Kec. Batang Kapas	
			1 Lks	Irigasi Indrapura, Kampung Koto Pandan dan Kampung Kudo-Kudo, Kec. Pancung Soal Kec. Kambang	
27	Padang Pariaman/ Sumbar	Lubuk Larangan	1 Lks	Pasar Aur Melintang, Kec. IV Koto Amal	
			1 Lks	Gasam Gadang, Kec. Batang Gasan	
			1 Lks	Cimpago, Sungai Limau, Kec. V Koto Kampung Dalam	
			1 Lks	Santok Kec. Pariaman Tengah	
			1 Lks	Kampung Dalam Kec. Padang Sago	
			1 Lks	Sei Sarik, Kec. VII Koto	
			2 Lks	Tandiat @ S. Durian Kec. Patamuna	
			2 Lks	Korong Kampungdan Pakandangan Kec. Enam Lingkung	
28	Tanah Datar/ Sumbar	Lubuk Larangan	2 Lks	Ds. Koto Alam, Kec. Padang Ganting	
			2 Lks	Ds. Turauan, Kec. Rambatan	
			1 Lks	Ds. Kubu NanAmpek Kec. Nagari Batipuh	
			1 Lks	Desa Sikakek Kec. Batipuh Ateh	

NO	KAB/PROP	STATUS	LUAS	LOKASI	DASAR HUKUM
29	Sawahlunto Sijunjung/ Sumbar	Lubuk Larangan	1 Lks	Desa Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang	
			2 Lks	Desa Sijunjung Tengah Kec. Sijunjung	
			3 Lks	Desa Latang, Jambu Lipo, dan Koto Tuo, Kec. Lubuk Tarok	
			3 Lks	Desa Sumpur Kudus Kec. Sisawah	
30	Solok/ Sumbar	Lubuk Larangan	3 Lks	Kec. Payung Sekaki	
			5 Lks	Kec. Lembang Jaya	
			3 Lks	Kec. IX Koto Sei Lasi	
			3 Lks	Kec. Kubung	
			3 Lks	Kec. Sangir Tujuan	
			3 Lks	Kec. Junjung Sirih	
			28 Lks	Kec. Sei Pagu	
			8 Lks	Kec. Bukit Sundi	
			1 Lks	Kec. Gunung Talang	
31	Solok/ Sumbar	Lubuk Larangan	1 Lks	Desa Tanjung Paku Kec.	
32	Kota Padang Panjang/ Sumbar	Lubuk Larangan	1 Lks	Desa Selaying Atas Kec. Padang Panjang Barat	
			1 Lks	Desa Selaying Bawah Kec. Padang Panjang	
33	Bukit Tinggi/ Sumbar	Lubuk Larangan	3 Lks	Kel. Campago, Garegeh, @ Koto Salayan Kec. Mandianing Koto Selayan	
34	Agam/ Sumbar	Lubuk Larangan	1 Lks	Ds Siguhung, Batu Karak Geragahan Timur, Parit Rantang, Geragahan Tengah, Batang Lolo, Batu Hampa Manggopoh, Batu Hampa, Parit Panjang, Batu Gajah, Pasar Durian Manggopoh Kec. Lubuk Basung	
			3 Lks	Ds Durian Kapas, Cacang Tinggi, dan Bukit Malintang Kec. Tanjung Mutiara	
			1 Lks	Desa Pasar Bawan, Kec. Ampek Nagari	
35	Sawahlunto/ Sumbar	Lubuk Larangan	9 Lks	Kel. Talawi Hilir, Talawi Mudik, Sijantang Koto, Salak, Sikalang, dan Rantih, Kec. Talawi	
			6 Lks	Kel. Telago Gunung, Kolok Mudik, dan Kelok Nan Tuo, Kec. Barangin	
			7 Lks	Kel. Lunto Timur, Kubang Tengah, Kubang Sirk Utara, Kubang Utara Sikabu, Saringan, dan Air Dingin, Kec. Lubuk Segar	
			8 Lks	Kel. Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo, dan Muoro Kalaban, Kec. Silungkang	
36	Kab. Lima Puluh Kota/ Sumbar	Lubuk Larangan	17 Lks	Ngr. Batu Hampar, Sialang, Durian Gadang, Mungka, Situjuah Batua, Guguk VII Koto, Labuah Gunung, Rimbang, Sitanang, Taeh Baruah, Talang Maur, Batu Payung	
37	Payakumbuh/ Sumbar	Lubuk Larangan	1 Lks	Desa Padang Alai Kec. Payakumbuh Timur	
38	Brebes/ Jawa Tengah	Suaka Perikanan Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin	2 Lks	Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Desa Penjalin Kec. Paguyangan	Surat Keputusan Bupati Kab. Brebes No. 523/177 Thn 2007, tentang Penetapan Daerah Perlindungan Sumberdaya Ikan (Suaka Perikanan) sebagai zona penyangga penebaran benih ikan di perairan umum waduk Malahayu Kec. Banjarharjo dan waduk Penjalin Kec. Paguyangan Kab. Brebes.



## Daftar Pustaka

- Babcock, R.C., Kelly, S., Shears, N.T., Walker, J.W. & Willis, T.J. 1999. Changes in community structure in temperate marine reserves. *Marine Ecology Progress Series*, 189: 125-134.
- Balmford, A., Gravestock, P., Hockley, N., McClean, C.J. & Roberts, C.M. 2004. The worldwide costs of marine protected areas. *Proceeding of the National Academy of Science*, 101(26): 9694-9697.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2010-2014.
- Basuki, R. & Suraji. 2012. *Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia: Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya*. Makalah Konas VIII Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, 22-24 Oktober 2012, Mataram, NTB.
- Bohnsack, J.A., Causey, B., Crosby, M.P., Griffins, R.B., Hixon, M.A., Hourigan, T.F., Koltz, K.H., Maragos, J.E., Simons, A. & Tilmant, J.T. 2000. A rationale for minimum 20-30% no-take protection. *Proceeding of the 9<sup>th</sup> International Coral Reef Symposium*, 23-27 October 2000, Bali, Indonesia.
- Carter, E., Soemodinoto, A. & White, A.T. 2010. *Guide for Improving Marine Protected Area Management Effectiveness in Indonesia*. Bali, Indonesia: The Nature Conservancy Indonesia Marine Program, xi + 49p.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P. & Sitepu, M.J. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dermawan, A. 2010. *Refleksi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan 2010 dan Outlook 2011*. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Rencana Strategis 2010 – 2014 Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).
- Gell, F.R. & Roberts, C.M. 2003. Benefits Beyond Boundaries: The Fisheries Effects of Marine Reserves. *Trends in Ecology and Evolution*, 18(9): 448-455.

- Huffard, C.L., Erdman, M.V. & Gunawan, T. 2010. *Defining Geographic Priorities for Marine Biodiversity Conservation in Indonesia*. Coral Triangle Support Partnership, Jakarta.
- Dermawan A. dan Y. Mulyana (2008). *"Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan Dunia"*. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- IUCN-WCPA (International Union for the Conservation of Nature-World Commission on Protected Areas). 2008. *Establishing Marine Protected Area Networks - Making it Happen*. IUCN-WCPA, National Oceanic and Atmosphere Administration & The Nature Conservancy, Washington D.C., 118p.
- Kahn, B. 2005. Indonesia Oceanic Cetacean Program Activity Report-January-February 2005: The rapid ecological assessment (REA) of oceanic cetaceans and associated habitats in the Bali-Lombok Strait region; Capacity building workshop: 'Indonesia's Whales and Dolphins - A Tourism Perspective'; Indonesian Marine Protected Areas (MPA) and cetaceans -the Solor Alor MPA development. 21 hal
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Statistik Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Kusumastanto, T., Zamani, P.N., Kinseng, R.A. & Adrianto, L. 1998. *Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat*. Kerjasama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor.
- Kusumaatmadja, S. 1996. *Empowering Coastal Communities*. Conservation Indonesia January-March. 1996.
- Mikalsen, K. H. & Jentoft, S. 2001. From user-groups to stakeholders? The public interest in fisheries management. *Marine Policy*, 25(4): 281-292.
- Mikkelsen, B. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. 1978. *Hukum Laut Internasional*. Trimitra Mandiri, Bandung.
- Solihin, M.A. & Sudirja, R. 2007. *Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic*. Sumber: <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/>.
- Mous, P. J., Pet, J.S., Arifin, Z., Djohani, R., Erdmann, M.V., Halim, A., Knight, M., Pet-Soede, L. & Wiadnya, G. 2005. Policy needs to improve marine capture fisheries management and to define a role for marine protected areas in Indonesia. *Fisheries Management and Ecology*, 12: 259-268.
- Mulyana, Y. & Dermawan, A. 2008. *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan Dunia*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- NRC (National Research Council). 2001. *Marine Protected Areas: Tools for Sustaining Ocean Ecosystems*. National Academy Press, Washington, D.C.
- PCI (Pacific Consultants International). 2001. *Study on fisheries development policy formulation, volume 1, white paper*. Pacific Consultants International under Jakarta Fishing Port / Market Development Project (Phase IV: JBIC Loan No. IP-403), Jakarta, 234 pp.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.51/Men/2011 Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Pet-Soede, L., Machiels, M.A.M., Stam, M.A. & Van Densen, W.L.T. 1999. Trend in an Indonesian coastal fishery based on catch and effort statistics and implications for the perception of the state of the stocks by fisheries officials. *Fisheries Research*, 42: 41-56.
- PISCO (Partnership for the Interdisciplinary Study of Coastal Oceans). 2002. *The Science of marine reserves*. [www.piscoweb.org](http://www.piscoweb.org).
- PKSPL-IPB (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor). 1999. *Konsep Penyusunan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pomeroy, R.S. & Berkes, F. 1997. Two to tango: the role of government in fisheries co-management. *Marine Policy*, 21(5): 465-480.
- Roberts, C.M. & Hawkins, J.P. 2000. *Fully-Protected Marine Reserves: A Guide*, WWF in Washington DC USA. University of York, York, UK. 131p.

Ross, M.G. & Lippin, B.W. 1967. *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. New York: Harper & Row Publishers.

Ruchimat, T. 2012. *Implementasi Wawasan Nusantara terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan guna Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Pesisir dalam rangka Ketahanan Nasional*. Kertas Karya Perorangan (TASKAP). Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVII Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta.

Ruchimat, T., Dermawan, A., Susanto, H. A. & Suraji, 2012. *A New Paradigm of Marine Protected Area Management In Indonesia*. Makalah disampaikan pada 12<sup>th</sup> International Coral Reef Symposium (12<sup>th</sup> ICRS). Cairns. Australia.

Salm, R.V. & Kenchington, R.A. 1984. *The Need for Management in: Kenchington, R.A. and Hudson, B.E.T. (eds) Coral Reef Management Handbook*. UNESCO. Indonesia.

Sembiring, S.N. dan F. Husbani. 1999. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia : Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia /ICEL.

Siaran Pers. 2011. Hari Nusantara 2011: Kembalikan Kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim. <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/6681/Hari-Nusantara-2011-Kembalikan-Kejayaan-Indonesia-sebagai-Negara-Maritim/>

Sumardja, E. 2002. *Kawasan Konservasi Laut (KKL) : Kini Bukan Untuk Konservasi Saja*. Bahan Presentasi Pada WCPA Workshop di Bangkok, Thailand.

Suraji. 2010. *Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan untuk Mewujudkan Perikanan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat*. <http://surajis.wordpress.com/2010/01/15/>

Suraji. 2012. *Menyasar Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - E-KKP3K: metode evaluasi efektivitas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K)*. <http://surajis.wordpress.com/2012/05/02/>.

Suraji, Basuki, R., Soemodinoto, A. & Susanto, H.A. 2012. *Menuju Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia: Metode Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K)*. Makalah Konas VIII Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, 22-24 Oktober 2012. Mataram. NTB.

Suraji, Ruchimat, T., Saad, S. & Sriyanti, W. 2012. *New Paradigm of Co-Management of MPAs in Indonesia, Lesson Learned from COREMAP*. <http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2012/01/06/new-paradigm-of-co-management-of-mpas-in-indonesia-lessons-learned-from-coremap/>.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Ward, T. & Hegeri, E. 2003. *Wilayah Suaka Laut dalam Manajemen Perikanan Berbasis Ekosistem*. Terjemahan bahasa Indonesia. Departemen Lingkungan Hidup dan Kelestarian Alam Pemerintah Australia. 80 halaman.

Ward T.J., Heinemann, D. & Evans, N. 2001. *The Role of Marine Reserves as Fisheries Management Tools: a review of concepts, evidence and international experience*. Bureau of Rural Sciences, Canberra, Australia, 192pp.